



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN TAHUN 2023



DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN TAHUN 2023

disusun oleh:

Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
2024

**LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
KONSOLIDASIAN
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) merupakan laporan yang mengonsolidasikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dengan Konsolidasian 546 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) seluruh Indonesia. LKPK Tahun 2023 disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

LKPK terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian, Neraca Konsolidasian, dan Laporan Operasional Konsolidasian, yang menggambarkan pendapatan dan belanja dari semua tingkatan pemerintah di Indonesia sebagai satu entitas keuangan Negara Kesatuan Republik Indonesia. LKPK merupakan upaya untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang keuangan pemerintah, yang tidak hanya mencerminkan pencapaian dan kondisi keuangan pemerintah tetapi juga komitmen untuk memenuhi transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.

Penyusunan LKPK ini adalah bentuk sinergi antar instansi pemerintah, terutama Pemerintah Pusat dan Daerah. Untuk mendukung sinergi tersebut, telah dikembangkan sistem informasi, berupa Sistem Informasi Keuangan Republik Indonesia (SIKRI) sebagai langkah strategis untuk meningkatkan validitas data dan kualitas laporan keuangan pemerintah.

Kami menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan ini. Penghargaan khusus kami sampaikan kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, serta seluruh Pemerintah Daerah di Indonesia. Dukungan tersebut sangat berarti dalam memastikan data yang akurat dan informasi yang komprehensif, guna meningkatkan kualitas pelaporan fiskal pemerintah.

Jakarta, November 2024
Direktur Jenderal Perbendaharaan



Ditandatangani secara elektronik
ASTERA PRIMANTO BHAKTI



Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian penting untuk meningkatkan manajemen keuangan publik, karena menghubungkan aset, kewajiban, pendapatan, dan pengeluaran, sehingga pemerintah dapat memproyeksikan kemampuan pembiayaan kewajiban dan potensi pendapatan.



RINGKASAN EKSEKUTIF

Photo by Guillaume Meurice: <https://www.pexels.com/photo/low-angle-photography-of-glass-buildings-2529179/>

A. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian

Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) disusun berdasarkan kerangka konsolidasi akuntansi sebagaimana diatur dalam PSAP 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian Lampiran I PP 71 tahun 2010. Konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya dengan mengeliminasi akun timbal balik (*reciprocal accounts*). Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya. Entitas pelaporan yang dicakup dalam laporan keuangan pemerintah konsolidasian ini adalah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Laporan tersebut meliputi Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian, Neraca Konsolidasian, dan Laporan Operasional Konsolidasian yang proses konsolidasinya dilakukan dengan tiga tahap, yaitu Konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) melalui konsolidasi antara Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian (LKPD-K). Untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Tahun 2023 ini, proses konsolidasi dilakukan terhadap 546 Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Laporan Operasional (LO) yang berasal dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2023.

Pada Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian ini, kebijakan eliminasi akun timbal balik dilakukan sebanyak dua kali, yakni antar akun resiprokal Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota pada tingkat LKPD-K dan antar akun resiprokal Pemerintah Daerah Konsolidasian dengan Pemerintah Pusat pada tingkat LKPK.

B. Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Konsolidasian Tahun 2023

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Konsolidasian mencakup konsolidasi realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan baik untuk LRA Pemerintah Pusat maupun untuk LRA Pemerintah Daerah. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Konsolidasian ini mencakup konsolidasi terhadap angka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pada Tahun 2023, Pendapatan dan Hibah Konsolidasian mencapai Rp3.132,87 triliun, yang merupakan konsolidasi pendapatan negara dan hibah Pemerintah Pusat sebesar Rp2.783,93 triliun dan pendapatan Pemerintah Daerah konsolidasian sebesar Rp1.251,96 triliun setelah dieliminasi akun resiprokal sebesar Rp903,02 triliun. Pendapatan dan Hibah Konsolidasian tersebut terdiri dari Pendapatan Perpajakan Konsolidasian sebesar Rp2.452,86 triliun, Pendapatan Bukan Pajak Konsolidasian sebesar Rp675,49 triliun, dan Pendapatan Hibah Konsolidasian sebesar Rp4,52 triliun, sedangkan Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah dieliminasi dengan Belanja Transfer Pemerintah Pusat.

Pendapatan dan Hibah Konsolidasian Tahun 2023 didominasi oleh Pendapatan Perpajakan yang mengalami peningkatan sebesar Rp179,47 triliun atau 7,89 persen dari Pendapatan Perpajakan Tahun 2022. Pendapatan Bukan Pajak mengalami peningkatan sebesar Rp26,36 triliun atau 4,06 persen dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya, sedangkan Pendapatan Hibah mengalami penurunan sebesar Rp1,53 triliun atau 25,28 persen.



Grafik 1. Komposisi Pendapatan dan Hibah Konsolidasian Tahun 2023

Belanja dan Transfer Konsolidasian Tahun 2023 sebesar Rp3.476,10 triliun, merupakan konsolidasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp3.121,22 triliun dan Belanja Pemerintah Daerah sebesar Rp1.257,90 triliun setelah dieliminasi akun resiprokal sebesar Rp903,02 triliun. Belanja dan Transfer Pemerintah Pusat berkontribusi sebesar 71,28 persen dari total Belanja dan Transfer Pemerintah Konsolidasian, sedangkan sisanya 28,72 persen merupakan Belanja dan Transfer Pemerintah Daerah. Belanja dan Transfer Konsolidasian Tahun 2023 meningkat sebesar Rp89,81 triliun atau sebesar 2,65 persen dibandingkan dengan Belanja dan Transfer Konsolidasian Tahun 2022.

Belanja dan Transfer Konsolidasian Tahun 2023 terdiri dari Belanja Pegawai Konsolidasian sebesar Rp818,58 triliun, Belanja Barang Konsolidasian Rp838,95 triliun, Belanja Modal Konsolidasian sebesar Rp526,61 triliun, Pembayaran Bunga Utang Konsolidasian Rp439,84 triliun, Belanja Subsidi Konsolidasian Rp281,24 triliun, Belanja Hibah Konsolidasian sebesar Rp52,56 triliun, Belanja Bantuan Sosial Konsolidasian Rp171,82 triliun, Belanja Lain-lain Konsolidasian sebesar Rp227,68 triliun dan Transfer sebesar Rp118,81 triliun.



Grafik 2. Komposisi Belanja dan Transfer Konsolidasian Tahun 2023

Pada Tahun 2023 terdapat Defisit Konsolidasian sebesar Rp343,23 triliun. Nilai defisit tersebut membaik sebesar Rp114,49 triliun jika dibandingkan dengan Defisit Konsolidasian Tahun 2022 sebesar Rp457,72 triliun. Pembiayaan Konsolidasian Tahun 2023 sebesar Rp461,82 triliun yang terdiri dari Pembiayaan Dalam Negeri Konsolidasian sebesar Rp382,24 triliun dan Pembiayaan Luar Negeri Konsolidasian sebesar Rp79,58 triliun. SiLPA Konsolidasian Tahun 2023 sebesar Rp118,59 triliun, yang terdiri dari SiLPA realisasi APBN sebesar Rp19,38 triliun dan SiLPA realisasi APBD sebesar Rp99,21 triliun.

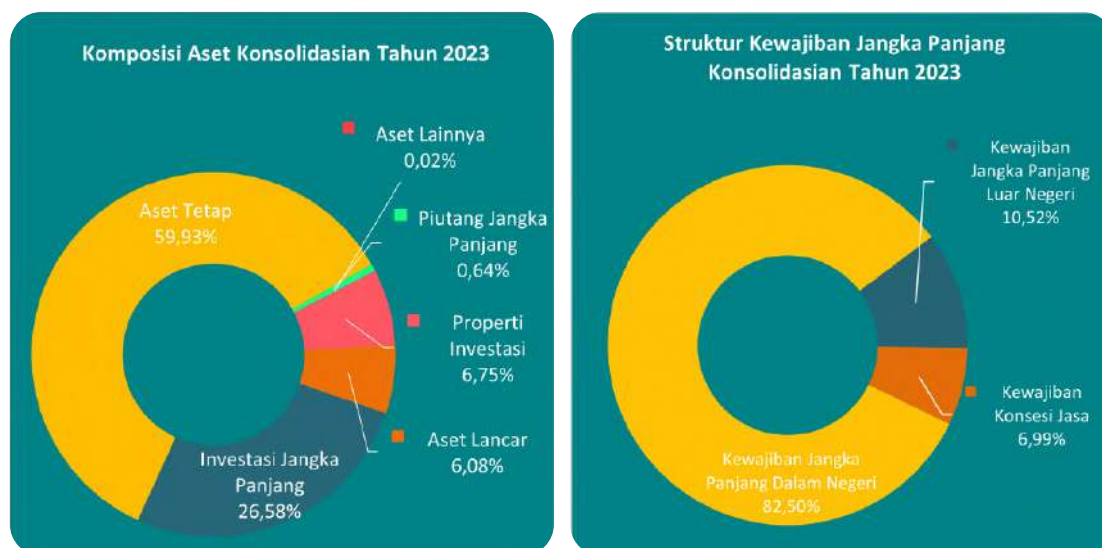
C. Neraca Pemerintah Konsolidasian Tahun 2023

Total Aset Konsolidasian per 31 Desember 2023 sebesar Rp16.315,41 triliun terdiri dari Aset Lancar Konsolidasian sebesar Rp992,10 triliun, Investasi Jangka Panjang Konsolidasian sebesar Rp4.336,80 triliun, Aset Tetap Konsolidasian sebesar Rp9.777,94 triliun, Properti Investasi sebesar Rp104,37 triliun, Piutang Jangka Panjang Konsolidasian sebesar Rp3,62 triliun, dan Aset Lainnya Konsolidasian sebesar Rp1.100,58 triliun. Aset Konsolidasian didominasi oleh Aset Tetap, yaitu sebesar 59,93 persen dari Total Aset. Aset Konsolidasian terdiri dari total Aset Pemerintah Pusat per 31 Desember 2023 sebesar Rp13.072,82 triliun dan total Aset Konsolidasian Pemerintah Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.426,89 triliun setelah eliminasi akun resiprokal antar pemerintah daerah.

Kewajiban Konsolidasian per 31 Desember 2023 sebesar Rp9.431,95 triliun terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek Konsolidasian per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.003,17 triliun atau sebesar 10,64 persen dan Kewajiban Jangka Panjang Konsolidasian per 31 Desember 2023 sebesar Rp8.428,78 triliun atau sebesar 89,36 persen.

Ekuitas Konsolidasian Tahun 2023 sebesar Rp6.883,45 triliun, terdiri dari Ekuitas Pemerintah Pusat sebesar Rp3.536,14 triliun dan Ekuitas Pemerintah Daerah sebesar Rp3.347,32 triliun.

Eliminasi dilakukan terhadap akun yang bersifat resiprokal pada Neraca Pemerintah Pusat dengan Neraca Pemerintah Daerah Konsolidasian.



Grafik 3. Komposisi Aset dan Kewajiban Konsolidasian Tahun 2023

D. Laporan Operasional Pemerintah Konsolidasian Tahun 2023

Laporan Operasional merupakan salah satu komponen pada Laporan Keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan Operasional menyajikan Surplus/Defisit dari kegiatan operasi suatu entitas. Laporan Operasional (LO) Pemerintah Konsolidasian mencakup konsolidasi pendapatan, beban, serta surplus/defisit dari kegiatan operasi, baik untuk Laporan Operasional Pemerintah Pusat maupun Laporan Operasional Pemerintah Daerah.

Pada Tahun 2023, Surplus-LO Konsolidasian mencapai Rp187,47 triliun, yang merupakan konsolidasi dari Surplus-LO Pemerintah Pusat sebesar Rp31,63 triliun dan Surplus Pemerintah Daerah sebesar Rp155,85 triliun. Surplus-LO Konsolidasian tersebut terdiri dari Surplus dari Kegiatan Operasional sebesar Rp130,79 triliun; Surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp58,30 triliun dan Defisit dari Kegiatan Luar Biasa sebesar Rp1,63 triliun. Nilai Surplus-LO Konsolidasian Tahun 2023 mengalami perbaikan sebesar Rp433,74 triliun atau sebesar 176,13 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2022 yang mengalami Defisit sebesar Rp246,27 triliun.

Surplus dari Kegiatan Operasional Konsolidasian Tahun 2023 terdiri dari Pendapatan Operasional Konsolidasian sebesar Rp3.543,03 triliun dikurangi Beban Operasional Konsolidasian sebesar Rp3.412,23 triliun setelah dilakukan eliminasi konsolidasian sebesar Rp843,69 triliun. Pendapatan Operasional Konsolidasian mengalami peningkatan sebesar Rp249,97 triliun atau 7,59 persen dari Tahun 2022, sedangkan Beban Operasional Konsolidasian mengalami peningkatan sebesar Rp120,12 triliun atau sebesar 3,65 persen dari tahun 2022. Pendapatan Operasional Konsolidasian terdiri dari Pendapatan Operasional Pemerintah Pusat sebesar Rp3.083,23 triliun dan Pendapatan Operasional Pemerintah Daerah sebesar Rp1.303,48 triliun serta eliminasi sebesar Rp843,69 triliun. Beban Operasional Konsolidasian terdiri dari Beban Operasional Pemerintah Pusat Rp3.111,67 triliun dan Beban Operasional Pemerintah Daerah sebesar Rp1.144,25 triliun serta eliminasi sebesar Rp843,69 triliun.

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Konsolidasian terdiri dari Defisit Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp17,31 triliun, Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp431,44 miliar, dan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp77,81 triliun. Defisit Pelepasan Aset Non Lancar, Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, dan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya merupakan transaksi Pemerintah Pusat. Selanjutnya, Defisit dari Pos Luar Biasa sebesar Rp1,62 triliun yang seluruhnya berasal dari Defisit Pos Luar Biasa pada Pemerintah Daerah.



Grafik 5. Perbandingan Surplus/Defisit Konsolidasian Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2023

Halaman ini sengaja dikosongkan

“ Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) merupakan langkah menuju pengelolaan keuangan negara yang lebih transparan dan akuntabel



Daftar Isi

Kata Pengantar	4
Ringkasan Eksekutif	6
Daftar Isi	13
Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Konsolidasian	16
Neraca Pemerintah Konsolidasian	18
Laporan Operasional Pemerintah Konsolidasian	20
Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian	22
A. Penjelasan Umum	24
B. Catatan Atas Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Konsolidasian Tahun 2023	62
C. Catatan Atas Neraca Pemerintah Konsolidasian Tahun 2023	72
D. Catatan Atas Laporan Operasional Pemerintah Konsolidasian Tahun 2023	88
Lampiran	94

FACE

LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KONSOLIDASIAN
TAHUN 2023





Photo by Tom Fisk: <https://www.pexels.com/photo/photo-of-people-standing-near-water-fountain-2126389/>

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

Uraian	TA 2023			TA 2022
	Anggaran Konsolidasi	Realisasi Konsolidasi	% Realisasi Terhadap Anggaran	Realisasi Konsolidasi
PENDAPATAN DAN HIBAH				
Pendapatan Perpajakan	2.371.892.826.939.090	2.452.856.512.391.650	103,41%	2.273.382.941.187.980
Pajak Dalam Negeri	2.298.994.826.939.090	2.388.366.577.927.230	103,89%	2.182.485.275.670.240
Pajak Perdagangan Internasional	72.898.000.000.000	64.489.934.464.413	88,47%	90.897.665.517.741
Pendapatan Bukan Pajak	570.805.978.535.675	675.494.892.669.374	118,34%	649.134.450.219.241
Pendapatan Sumber Daya Alam	223.312.141.813.000	254.203.031.073.614	113,83%	268.770.896.270.784
Bagian Pemerintah atas Laba BUMN/D	95.489.151.244.253	95.159.123.295.559	99,65%	51.520.129.417.118
Pendapatan Bukan Pajak Lainnya	120.511.116.614.422	164.683.671.087.337	136,65%	180.436.053.448.662
Pendapatan BLU	131.493.568.864.000	161.449.067.212.864	122,78%	148.407.371.082.677
Pendapatan Hibah	9.720.803.697.842	4.515.247.466.723	46,45%	6.043.160.721.895
JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	2.952.419.609.172.610	3.132.866.652.527.740	106,11%	2.928.560.552.129.120
BELANJA				
Belanja Pegawai	869.923.909.080.571	818.581.986.381.907	94,10%	783.040.332.629.970
Belanja Barang	742.953.795.976.471	838.954.975.896.851	112,92%	777.421.836.457.284
Belanja Modal	419.950.375.781.759	526.606.409.707.162	125,40%	435.819.438.389.088
Pembayaran Bunga Utang	442.984.313.671.760	439.844.004.881.574	99,29%	387.410.107.644.675
Subsidi	305.051.653.125.539	281.237.065.764.156	92,19%	259.550.622.125.536
Hibah	54.651.755.865.036	52.561.548.448.118	96,18%	48.866.740.913.195
Belanja Bantuan Sosial	159.084.826.296.103	171.818.328.929.770	108,00%	173.676.459.522.319
Belanja Lain-lain	395.539.899.451.781	227.681.377.964.353	57,56%	408.032.668.476.177
Transfer ke Daerah dan Dana Desa	145.399.423.499.945	118.810.110.724.755	81,71%	112.465.483.709.173
JUMLAH BELANJA	3.535.539.952.748.960	3.476.095.808.698.650	98,32%	3.386.283.689.867.410
SURPLUS/DEFISIT ANGGARAN	(583.120.343.576.359)	(343.229.156.170.903)	58,86%	(457.723.137.738.295)

Uraian	TA 2023			TA 2022
	Anggaran Konsolidasi	Realisasi Konsolidasi	% Realisasi Terhadap Anggaran	Realisasi Konsolidasi
PEMBIAYAAN				
Pembiayaan Dalam Negeri Pemerintah	554.610.462.674.763	382.235.789.677.378	68,92%	684.302.101.674.637
Penggunaan SAL dan SILPA TA sebelumnya	304.834.689.827.458	167.826.408.680.540	55,05%	121.347.568.958.958
Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	6.467.035.122.589	6.403.968.605.644	99,02%	3.935.074.879.041
Privatisasi, Penjualan Aset Program Restrukturisasi dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	612.739.083.200	1.099.037.350.531	179,36%	687.290.455.669
Surat Berharga Negara (Neto)	437.834.050.997.000	308.193.788.405.962	70,39%	658.816.905.421.376
Pinjaman Dalam Negeri/Daerah	9.389.719.332.763	19.884.112.984.486	211,76%	26.006.168.590.824
Pembayaran Pokok Utang	(12.088.632.693.257)	(13.451.200.277.317)	111,27%	(6.458.936.801.919)
Penyertaan Modal Negara dan Daerah/Dana Investasi Pemerintah	(167.629.173.420.913)	(87.202.989.310.721)	52,02%	(97.087.759.706.520)
Dana Cadangan	(24.195.936.388.102)	(20.195.382.987.845)	83,47%	(21.731.033.555.385)
Pembentukan Dana Cadangan (termasuk Dana Pengembangan Pendidikan Nasional)	(24.613.147.207.864)	(24.236.663.229.761)	98,47%	(22.046.090.169.885)
Pencairan dana cadangan	417.210.819.762	4.041.280.241.916	968,64%	315.056.614.500
Pemberian Pinjaman Daerah	(281.205.089.575)	(139.957.120.387)	49,77%	(82.313.567.408)
Kewajiban Penjaminan	(330.511.505.000)	(330.511.505.000)	100,00%	(1.130.863.000.000)
Pembiayaan Lain-lain	(2.312.591.400)	148.514.851.485	(6.422,01%)	0
Pembiayaan Luar Negeri (Neto)	(18.435.249.833.000)	79.580.324.525.204	(431,67%)	27.217.250.365.846
Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto)	62.056.062.121.000	162.650.352.798.218	262,10%	108.283.083.586.601
Penarikan Pinjaman Program	29.500.000.000.000	82.990.780.840.684	281,32%	65.592.711.439.666
Penarikan Pinjaman Proyek	32.556.062.121.000	79.659.571.957.534	244,68%	42.690.372.146.935
Penerusan Pinjaman	(1.065.247.517.000)	(1.619.721.482.521)	152,05%	(1.783.927.975.298)
Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	(79.426.064.437.000)	(81.450.306.790.493)	102,55%	(79.281.905.245.457)
JUMLAH PEMBIAYAAN	536.175.212.841.763	461.816.114.202.582	86,13%	711.519.352.040.483
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN	(46.945.130.734.596)	118.586.958.031.679	(252,61%)	253.796.214.302.188

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NERACA PEMERINTAH KONSOLIDASIAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Persentase Selisih
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Bank			
Kas di Kas Negara dan Kas Daerah	428.788.025.843.573	507.083.038.326.554	(15,44%)
Kas di Bendahara Pengeluaran	422.931.646.495	415.548.946.206	1,78%
Kas di Bendahara Penerimaan	457.291.956.742	104.017.799.878	339,63%
Kas Lainnya dan Setara Kas	24.424.866.584.105	7.318.506.570.951	233,74%
Kas pada BLU	68.306.406.691.319	69.143.340.150.544	(1,21%)
Jumlah Kas dan Bank	522.399.522.722.234	584.064.451.794.131	(10,56%)
Belanja dibayar di Muka dan Uang Muka Belanja	30.358.006.525.759	51.974.301.301.918	(41,59%)
Pendapatan yang masih harus diterima	15.268.713.521.615	17.562.805.658.048	(13,06%)
Piutang	150.403.717.820.220	115.308.505.087.083	30,44%
Investasi Jangka Pendek	36.353.500.341.007	26.570.205.966.378	36,82%
Persediaan	237.313.693.469.842	221.423.513.825.632	7,18%
Jumlah Aset Lancar	992.097.154.400.676	1.016.903.783.633.190	(2,44%)
INVESTASI JANGKA PANJANG			
Investasi Non Permanen			
Dana Bergulir (Netto)	19.162.378.589.413	14.675.357.574.027	30,58%
Pinjaman kepada BUMN/D dan Pemda Lainnya	98.778.677.710	109.420.672.893	(9,73%)
Investasi Non Permanen Lainnya (Netto)	279.694.665.737.127	239.299.404.173.307	16,88%
Jumlah Investasi Non Permanen	298.955.823.004.250	254.084.182.420.227	17,66%
Investasi Permanen			
Investasi Permanen PMN/D	3.350.821.304.141.400	3.142.496.994.400.680	6,63%
Investasi Permanen BLU	8.053.004.500	8.958.055.146	(10,10%)
Investasi Permanen Lainnya	687.018.979.056.485	598.441.920.545.355	14,80%
Jumlah Investasi Permanen	4.037.848.336.202.390	3.740.947.873.001.190	7,94%
Jumlah Investasi Jangka Panjang	4.336.804.159.206.640	3.995.032.055.421.410	8,55%
ASET TETAP			
Tanah	5.739.409.371.076.210	5.647.510.206.991.930	1,63%
Peralatan dan Mesin	1.444.809.917.594.980	1.329.202.103.574.430	8,70%
Gedung dan Bangunan	1.320.577.613.195.350	1.257.103.783.143.750	5,05%
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.669.112.701.491.820	2.509.181.246.639.060	6,37%
Aset Tetap Lainnya	108.756.526.615.397	108.681.215.018.208	0,07%
Konstruksi Dalam Pengerjaan	308.430.149.266.849	223.651.618.851.976	37,91%
Akumulasi Penyusutan	(2.821.031.221.075.750)	(2.562.178.364.773.400)	10,10%
Konsesi Jasa	1.088.210.735.514.390	951.101.558.226.429	14,42%
Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa	(80.340.569.263.966)	(57.336.912.361.836)	40,12%
Jumlah Aset Tetap	9.777.935.224.415.280	9.406.916.455.310.550	3,94%
PROPERTI INVESTASI			
Properti Investasi	160.506.675.838.552	93.519.146.329.512	71,63%
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(56.132.925.175.972)	(54.320.086.389.921)	3,34%
Jumlah Properti Investasi	104.373.750.662.580	39.199.059.939.591	166,27%
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan Penjualan Angsuran	806.842.240.088	282.153.482.276	185,96%
Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	2.063.192.848.792	1.944.485.328.395	6,10%

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Persentase Selisih
Piutang Jangka Panjang Lainnya	4.576.224.167.487	4.785.472.283.878	(4,37%)
Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman	596.253.315.754	603.000.476.225	(1,12%)
Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(4.421.514.439.573)	(4.537.490.610.399)	(2,56%)
Jumlah Piutang Jangka Panjang	3.620.998.132.548	3.077.620.960.375	17,66%
ASET LAINNYA			
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	68.551.511.029.425	79.989.638.736.066	(14,30%)
Dana Jangka Panjang	-	28.798.237.380.309	(100,00%)
Aset Tak Berwujud	81.648.119.881.859	70.815.831.316.123	15,30%
Dana yang Dibatasi Penggunaannya	384.685.565.264.802	324.930.703.435.536	18,39%
Dana Penjaminan	12.829.602.055.000	12.449.624.844.000	3,05%
Dana Cadangan	5.815.434.423.939	5.026.052.605.271	15,71%
Dana Kelolaan BLU	52.063.867.817.609	10.340.470.045.889	403,50%
Aset Lain-lain	853.030.181.758.462	807.837.004.578.020	5,59%
Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya	29.854.766.285.853	29.625.443.493.878	0,77%
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(44.823.921.812.698)	(38.353.438.037.732)	16,87%
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(343.079.425.565.565)	(318.133.969.689.488)	7,84%
Jumlah Aset Lainnya	1.100.575.701.138.690	1.013.325.598.707.870	8,61%
JUMLAH ASET	16.315.406.987.956.400	15.474.454.573.973.000	5,43%
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	5.112.220.766.011	4.386.462.382.614	16,55%
Utang Kepada Pihak Ketiga	125.095.299.415.034	131.586.294.906.917	(4,93%)
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	27.965.899.727.133	10.332.306.519.164	170,66%
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya	632.090.824.617.776	517.654.890.383.281	22,11%
Utang Biaya Pinjaman	109.310.545.725.595	94.148.973.384.551	16,10%
Utang Subsidi	25.207.352.917.324	15.233.102.271.564	65,48%
Utang Surat Berharga Negara	30.944.349.415.000	48.479.626.001.000	(36,17%)
Utang Belanja	27.928.613.604.246	18.193.621.828.438	53,51%
Pendapatan yang di Tangguhkan	403.617.716.901	4.056.160.026	9.850,73%
Pendapatan Diterima Dimuka	9.604.331.404.491	11.996.793.811.347	(19,94%)
Utang Jangka Pendek Lainnya	9.506.131.267.576	10.096.845.210.077	(5,85%)
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	1.003.169.186.577.090	862.112.972.858.978	16,36%
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri			
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Non Perbankan (SBN)	6.951.201.303.391.440	6.684.405.750.787.850	3,99%
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya	2.273.888.405.970	3.890.394.622.127	(41,55%)
Jumlah Utang Jangka Panjang Dalam Negeri	6.953.475.191.797.410	6.688.296.145.409.980	3,96%
Utang Jangka Panjang Luar Negeri			
Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan	886.277.290.731.920	822.838.479.742.048	7,71%
Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya	26.579.390.708	26.646.297.359	(0,25%)
Jumlah Utang Jangka Panjang Luar Negeri	886.303.870.122.628	822.865.126.039.407	7,71%
Kewajiban Konsesi Jasa			
Kewajiban Konsesi Jasa	589.002.419.926.666	504.065.294.802.522	16,85%
Jumlah Kewajiban Konsesi Jasa	589.002.419.926.666	504.065.294.802.522	16,85%
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	8.428.781.481.846.710	8.015.226.566.251.910	5,16%
JUMLAH KEWAJIBAN	9.431.950.668.423.790	8.877.339.539.110.890	6,25%
EKUITAS	6.883.456.319.532.620	6.597.115.034.862.110	4,34%
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	16.315.406.987.956.400	15.474.454.573.973.000	5,43%

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN OPERASIONAL PEMERINTAH KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Persentase Selisih
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN PERPAJAKAN			
Pendapatan Pajak Penghasilan	1.056.264.876.071.450	991.488.696.172.421	6,53%
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	749.872.917.946.326	694.776.882.555.958	7,93%
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	64.598.772.845.704	42.712.888.407.951	51,24%
Pendapatan Cukai	218.828.516.227.555	226.661.405.402.388	(3,46%)
Pendapatan Pajak Lainnya	9.962.359.820.249	6.779.467.430.496	46,95%
Pendapatan Bea Masuk	50.951.896.485.742	51.215.480.999.153	(0,51%)
Pendapatan Bea Keluar	13.814.253.622.480	39.784.089.995.800	(65,28%)
Pendapatan Pajak Lain-lain	232.908.882.447.061	224.059.053.657.697	3,95%
Jumlah Pendapatan Perpajakan	2.397.202.475.466.570	2.277.477.964.621.860	5,26%
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK			
Pendapatan Sumber Daya Alam	280.285.831.628.760	302.124.663.573.157	(7,23%)
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN /Pendapatan Dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)	20.946.682.497.830	22.713.848.414.013	(7,78%)
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	634.850.782.307.705	514.862.274.022.567	23,30%
Pendapatan Badan Layanan Umum	158.182.137.603.112	127.689.784.291.367	23,88%
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	1.094.265.434.037.410	967.390.570.301.103	13,12%
PENDAPATAN HIBAH			
Pendapatan Hibah	51.559.936.308.831	48.185.825.440.196	7,00%
Jumlah Pendapatan Hibah	51.559.936.308.831	48.185.825.440.196	7,00%
PENDAPATAN TRANSFER			
Pendapatan Transfer	-	-	0,00%
Jumlah Pendapatan Transfer	-	-	0,00%
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	3.543.027.845.812.800	3.293.054.360.363.160	7,59%
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	817.451.058.942.146	815.824.195.436.946	0,20%
Beban Persediaan	58.854.465.930.968	63.071.147.279.451	(6,69%)
Beban Barang dan Jasa	523.816.068.041.696	490.841.051.849.067	6,72%
Beban Pemeliharaan	57.362.019.873.981	55.831.223.001.473	2,74%
Beban Perjalanan Dinas	91.373.989.210.240	73.896.979.345.131	23,65%
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	68.231.757.433.738	73.184.060.840.892	(6,77%)
Beban Bunga	490.875.753.084.126	410.801.519.564.832	19,49%
Beban Subsidi	248.079.317.211.602	250.949.846.878.617	(1,14%)
Beban Hibah	56.120.652.490.274	49.959.880.402.761	12,33%
Beban Bantuan Sosial	167.214.490.221.817	175.543.584.412.218	(4,74%)
Beban Transfer	176.982.042.102.102	16.378.179.560.440	980,60%
Beban Lain-lain	295.008.459.290.593	414.659.631.457.845	(28,86%)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Persentase Selisih
Beban Penyusutan dan Amortisasi	353.014.357.212.803	358.631.499.363.974	(1,57%)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	7.850.363.170.050	42.546.007.711.007	(81,55%)
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	3.412.234.794.216.140	3.292.118.807.104.650	3,65%
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	130.793.051.596.667	935.553.258.510	13.880,29%
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	4.790.439.038.810	6.950.489.265.826	(31,08%)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	23.864.603.451.960	134.216.842.597.171	(82,22%)
Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	(19.074.164.413.150)	(127.266.353.331.345)	(85,01%)
SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	105.211.500.000	-	0,00%
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	536.653.910.900	1.337.452.801.614	(59,87%)
Jumlah Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	(431.442.410.900)	(1.337.452.801.614)	(67,74%)
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	112.360.987.542.646	96.002.565.101.242	17,04%
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	34.554.263.534.160	212.613.734.435.340	(83,75%)
Jumlah Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	77.806.724.008.486	(116.611.169.334.098)	(166,72%)
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	58.301.117.184.436	(245.214.975.467.057)	123,78%
POS LUAR BIASA			
Pendapatan Luar Biasa	28.244.220.109	15.503.871.268	82,18%
Beban Luar Biasa	1.649.822.142.583	2.004.769.296.477	(17,71%)
Jumlah Surplus/(Defisit) Dari Pos Luar Biasa	(1.621.577.922.474)	(1.989.265.425.209)	18,48%
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA	(1.621.577.922.474)	(1.989.265.425.209)	18,48%
SURPLUS/(DEFISIT) LO	187.472.590.858.629	(246.268.687.633.757)	176,13%

CATATAN ATAS

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN TAHUN 2023



A. PENJELASAN UMUM

A. 1. DASAR HUKUM

1. UUD 1945 Pasal 23 ayat (1) menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual).
7. Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona *Virus Disease* 2021 (Covid-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar.
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Lampiran I dan II).
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 dan dan Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
15. Peraturan Daerah yang mengatur tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2023.

A. 2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN

Proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) didasarkan pada PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian (Lampiran I PP 71 tahun 2010). Konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya dengan atau tanpa mengeliminasi akun timbal balik (*reciprocal accounts*). Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya. Entitas pelaporan yang dicakup dalam laporan keuangan pemerintah konsolidasian ini adalah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Penyusunan LKPK meliputi tiga tahap, antara Lain: (1) Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat; (2) Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; (3) Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian.

A. 2.1. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) melalui Konsolidasi Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) disusun untuk tujuan umum (*general purposes financial statement*) dalam memenuhi kebutuhan sebagian besar pengguna laporan dan dengan pendekatan kegunaan dalam pembuatan keputusan (*decision usefulness approach*). LKPP mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh seluruh entitas Pemerintah Pusat, yang terdiri dari Bendahara Umum Negara (BUN) dan Kementerian Negara/Lembaga (K/L), beserta unit organisasi di bawahnya yang meliputi Eselon I, Kantor Wilayah, dan satuan kerja (satker) yang bertanggung jawab atas otorisasi kredit anggaran yang diberikan kepadanya termasuk satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pengguna Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Urusan Bersama. LKPP disusun oleh Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal berdasarkan konsolidasi Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN).

"LKPP Tahun 2023 merupakan konsolidasian atas laporan keuangan entitas pelaporan BUN dan entitas pelaporan K/L"

LKPP Tahun 2023 merupakan konsolidasian atas laporan keuangan entitas pelaporan BUN dan entitas pelaporan K/L. LKPP merupakan konsolidasian dari laporan keuangan entitas akuntansi satuan kerja di bawahnya.

LKPP mencakup transaksi-transaksi sebagai berikut.

1. Transaksi keuangan yang berasal dari APBN, termasuk dana APBN yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD), yaitu dana dekonsentrasi, dana tugas pembantuan, dan dana urusan bersama;
2. Ekuitas bersih dari Unit Badan Lainnya (UBL) Bukan Satker.

LKPP tidak mencakup entitas:

- Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH);
- Pemerintah Daerah; dan
- Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Sesuai dengan PMK Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, LKPP dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP), yang terdiri dari Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI). SAI diselenggarakan oleh K/L secara berjenjang mulai dari tingkat satker sampai tingkat K/L termasuk satker BLU dan SKPD yang mendapatkan alokasi Dana Dekonsentrasi/Dana Tugas Pembantuan/Dana Urusan Bersama, untuk menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Dalam pelaksanaannya, K/L membentuk Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan Unit Akuntansi dan Pelaporan Barang Milik Negara (BMN).

Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) menyelenggarakan Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) untuk menghasilkan Laporan Keuangan BUN. SA-BUN terdiri dari beberapa sub sistem, yaitu Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat (SiAP), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah (SAUP), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah (SIKUBAH), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah (SAIP), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan Penerusan Pinjaman (SAPPP), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah (SATD), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi (SABS), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Lain-lain (SABL), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus (SATK), dan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya (SAPBL). SiAP menghasilkan Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat dan Neraca Kuasa BUN sebagai

data yang akan direkonsiliasi dengan data SAI.

SAPP dijalankan untuk menghasilkan LKPP yang terdiri dari:

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan kompilasi Laporan Realisasi Anggaran seluruh entitas pelaporan K/L dan entitas pelaporan BUN. Laporan Realisasi APBN terdiri dari Pendapatan Negara, Belanja Negara, dan Pembiayaan.

- Angka realisasi Pendapatan Negara yang disajikan pada Laporan Realisasi APBN Tahun Anggaran Berjalan berdasarkan data penerimaan kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN yang berasal dari pembukuan intrakomptabel atas seluruh penerimaan uang yang riil masuk ke Kas Negara dan/atau melalui pengesahan pendapatan. Angka realisasi Pendapatan Negara yang disajikan pada laporan keuangan pemerintah konsolidasian ini adalah angka yang disajikan pada Laporan Realisasi APBN Tahun 2023.
- Angka realisasi Belanja Negara pada Laporan Realisasi APBN Tahun Anggaran Berjalan disajikan berdasarkan data pengeluaran kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN yang berasal dari pembukuan intrakomptabel atas seluruh pengeluaran uang riil keluar dari Kas Negara dan/atau melalui pengesahan atas transaksi belanja. Angka realisasi Belanja Negara yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah konsolidasian ini adalah data realisasi pengeluaran yang disajikan pada Laporan Realisasi APBN Tahun 2023.
- Angka realisasi Pembiayaan yang disajikan pada Laporan Realisasi APBN Tahun Anggaran Berjalan berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN yang berasal dari pembukuan intrakomptabel atas seluruh penerimaan dan pengeluaran uang riil yang masuk ke atau keluar dari Kas Negara dan/atau melalui pengesahan transaksi pembiayaan. Angka realisasi Pembiayaan yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah konsolidasian ini adalah data realisasi pembiayaan yang disajikan dalam Laporan Realisasi APBN Tahun 2023.

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Awal Anggaran Lebih (LPSAL) disusun berdasarkan beberapa komponen seperti nilai SAL awal yang berasal dari SAL Pemerintah Pusat Awal Tahun Anggaran Berjalan, Penggunaan SAL di tahun anggaran berjalan, SiLPA/SiKPA yang berasal dari Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran Berjalan, Penyesuaian Pembukuan, serta Koreksi-Koreksi yang mempengaruhi SAL dan SiLPA/SiKPA. Seluruh penyesuaian/koreksi

yang mempengaruhi perhitungan catatan SAL disajikan sebagai Penyesuaian SAL pada tahun anggaran berjalan (tidak dilakukan penyesuaian terhadap SAL Awal).

c. Neraca

Neraca Pemerintah Pusat disusun berdasarkan konsolidasi Neraca seluruh LKKL dan Neraca LKBUN. Neraca LKBUN disusun berdasarkan konsolidasi Neraca Kuasa BUN dan Neraca Bagian Anggaran BUN termasuk Laporan Keuangan Badan Lainnya. Khusus data mengenai Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, dan Kas pada BLU didasarkan pada Neraca K/L yang disusun melalui SA

d. Laporan Operasional

Laporan Operasional disusun berdasarkan data Pendapatan-LO, Beban, Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional dan Surplus/Defisit Pos Luar Biasa Tahun Berjalan yang dikompilasi dari seluruh LK K/L dan LK BUN. Seluruh data tersebut diperhitungkan untuk menghasilkan Surplus/Defisit-LO yang menjadi nilai yang akan disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

e. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas disusun berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN. Laporan Arus Kas Tahun Anggaran Berjalan mencakup data penerimaan dan pengeluaran kas melalui rekening KPPN dan rekening BUN, termasuk transaksi pengesahan pendapatan hibah langsung dan belanja yang dananya berasal dari pendapatan hibah langsung, pengesahan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) dan belanja yang bersumber dari PHLN yang penarikannya melalui mekanisme direct payment, serta pengesahan pendapatan dan belanja pada BLU.

f. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas disusun berdasarkan nilai Ekuitas Awal yang berasal dari Ekuitas Awal Pemerintah Pusat pada Tahun Anggaran Berjalan, Surplus/Defisit LO yang berasal dari hasil akhir Laporan Operasional Tahun Anggaran Berjalan, dan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas yang diperhitungkan untuk menghasilkan nilai Ekuitas Akhir yang akan disajikan di Neraca.

g. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro, pendekatan penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, serta penjelasan, daftar rincian dan/atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi APBN, Laporan Perubahan SAL,

Neraca Pemerintah Pusat, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta informasi penting lainnya dalam rangka pengungkapan yang memadai.

A. 2.2. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian (LKPD-K)

Kebutuhan untuk melakukan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) telah direkomendasikan oleh BPK dalam hasil pemeriksaan terkait dengan reviu pelaksanaan unsur transparansi fiskal setiap tahunnya berupa Laporan Hasil Reviu Transparansi Fiskal. Laporan dimaksud menyatakan bahwa pelaksanaan peran dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dalam pengelolaan fiskal masih memiliki kelemahan-kelemahan, antara lain belum adanya mekanisme konsolidasi LKPD dan rendahnya transparansi fiskal pada tingkat Pemerintah Daerah.

LKPD-K merupakan laporan keuangan yang dihasilkan dari entitas-entitas pelaporan yang independen satu terhadap yang lainnya. Lingkup penyajian LKPD-K ini dibatasi pada Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Konsolidasian, Neraca Pemerintah Daerah Konsolidasian, Laporan Operasional Pemerintah Daerah Konsolidasian dan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Tahun 2023, merupakan konsolidasi dari seluruh 546 pemerintahan daerah yang ada di Indonesia pada Tahun 2023. Konsolidasi atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Operasional dilakukan terhadap 546 LRA, Neraca, dan LO LKPD Tahun 2023.

Dengan penyajian dimaksud, laporan konsolidasi menunjukkan aliran dana yang masuk ke sektor pemerintahan baik yang berasal dari transfer Pemerintah Pusat maupun yang dihasilkan sendiri oleh Pemerintah Daerah di wilayah yang bersangkutan dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Laporan konsolidasi juga menunjukkan dana yang dibelanjakan oleh Pemerintah Daerah masing-masing.

“LKPDK merupakan konsolidasi dari seluruh 546 pemerintahan daerah yang ada di Indonesia pada tahun 2023”

No	Pemerintah Daerah	Laporan Realisasi Anggaran	Neraca	Laporan Operasional
PROVINSI ACEH				
1.	Provinsi Aceh	LKPD Tahun 2023		
2.	Kabupaten Aceh Besar	LKPD Tahun 2023		
3.	Kabupaten Aceh Utara	LKPD Tahun 2023		
4.	Kabupaten Aceh Timur	LKPD Tahun 2023		
5.	Kabupaten Aceh selatan	LKPD Tahun 2023		
6.	Kabupaten Aceh barat	LKPD Tahun 2023		
7.	Kabupaten Simeule	LKPD Tahun 2023		
8.	Kabupaten Aceh singkil	LKPD Tahun 2023		
9.	Kabupaten Bireun	LKPD Tahun 2023		
10.	Kota Banda Aceh	LKPD Tahun 2023		
11.	Kabupaten Aceh Tengah	LKPD Tahun 2023		
12.	Kabupaten Aceh Tenggara	LKPD Tahun 2023		
13.	Kabupaten Pidie	LKPD Tahun 2023		
14.	Kota Sabang	LKPD Tahun 2023		
15.	Kota Langsa	LKPD Tahun 2023		
16.	Kota Lhokseumawe	LKPD Tahun 2023		
17.	Kabupaten Gayo Lues	LKPD Tahun 2023		
18.	Kabupaten Aceh Barat Daya	LKPD Tahun 2023		
19.	Kabupaten Aceh Jaya	LKPD Tahun 2023		
20.	Kabupaten Nagan Raya	LKPD Tahun 2023		
21.	Kabupaten Aceh Tamiang	LKPD Tahun 2023		
22.	Kabupaten Bener Meriah	LKPD Tahun 2023		
23.	Kabupaten Pidie Jaya	LKPD Tahun 2023		
24.	Kota Subulussalam	LKPD Tahun 2023		
PROVINSI SUMATERA UTARA				
25.	Provinsi Sumatera Utara	LKPD Tahun 2023		
26.	Kabupaten Deli Serdang	LKPD Tahun 2023		
27.	Kabupaten Langkat	LKPD Tahun 2023		
28.	Kabupaten Tapanuli Tengah	LKPD Tahun 2023		
29.	Kabupaten Tapanuli Selatan	LKPD Tahun 2023		
30.	Kabupaten Asahan	LKPD Tahun 2023		
31.	Kabupaten Mandailing Natal	LKPD Tahun 2023		
32.	Kabupaten Pakpak Barat	LKPD Tahun 2023		
33.	Kabupaten Humbang Hasundutan	LKPD Tahun 2023		
34.	Kabupaten Padang Lawas	LKPD Tahun 2023		
35.	Kabupaten Labuhan Batu Selatan	LKPD Tahun 2023		
36.	Kabupaten Nias Utara	LKPD Tahun 2023		
37.	Kota Tanjung Balai	LKPD Tahun 2023		
38.	Kota Padang Sidempuan	LKPD Tahun 2023		
39.	Kota Gunung Sitoli	LKPD Tahun 2023		
40.	Kabupaten Dairi	LKPD Tahun 2023		

No	Pemerintah Daerah	Laporan Realisasi Anggaran	Neraca	Laporan Operasional
41.	Kabupaten Tanah Karo	LKPD Tahun 2023		
42.	Kabupaten Labuhan Batu	LKPD Tahun 2023		
43.	Kabupaten Nias	LKPD Tahun 2023		
44.	Kabupaten Simalungun	LKPD Tahun 2023		
45.	Kabupaten Tapanuli Utara	LKPD Tahun 2023		
46.	Kabupaten Toba Samosir	LKPD Tahun 2023		
47.	Kota Binjai	LKPD Tahun 2023		
48.	Kota Medan	LKPD Tahun 2023		
49.	Kota Pematang Siantar	LKPD Tahun 2023		
50.	Kota Sibolga	LKPD Tahun 2023		
51.	Kota Tebing Tinggi	LKPD Tahun 2023		
52.	Kabupaten Nias Selatan	LKPD Tahun 2023		
53.	Kabupaten Serdang Bedagai	LKPD Tahun 2023		
54.	Kabupaten Samosir	LKPD Tahun 2023		
55.	Kabupaten Batu Bara	LKPD Tahun 2023		
56.	Kabupaten Padang Lawas Utara	LKPD Tahun 2023		
57.	Kabupaten Labuhanbatu Utara	LKPD Tahun 2023		
58.	Kabupaten Nias Barat	LKPD Tahun 2023		
PROVINSI SUMATERA BARAT				
59.	Provinsi Sumatera Barat	LKPD Tahun 2023		
60.	Kabupaten Pesisir Selatan	LKPD Tahun 2023		
61.	Kabupaten Tanah Datar	LKPD Tahun 2023		
62.	Kota Bukit Tinggi	LKPD Tahun 2023		
63.	Kota Padang Panjang	LKPD Tahun 2023		
64.	Kota Payakumbuh	LKPD Tahun 2023		
65.	Kota Sawahlunto	LKPD Tahun 2023		
66.	Kota Solok	LKPD Tahun 2023		
67.	Kabupaten Dharmasraya	LKPD Tahun 2023		
68.	Kabupaten Solok Selatan	LKPD Tahun 2023		
69.	Kabupaten Agam	LKPD Tahun 2023		
70.	Kabupaten Pasaman	LKPD Tahun 2023		
71.	Kabupaten Limapuluh Kota	LKPD Tahun 2023		
72.	Kabupaten Solok	LKPD Tahun 2023		
73.	Kabupaten Padang Pariaman	LKPD Tahun 2023		
74.	Kabupaten Kepulauan Mentawai	LKPD Tahun 2023		
75.	Kabupaten Pasaman Barat	LKPD Tahun 2023		
76.	Kabupaten Sijunjung	LKPD Tahun 2023		
77.	Kota Padang	LKPD Tahun 2023		
78.	Kota Pariaman	LKPD Tahun 2023		
79.	Provinsi Riau	LKPD Tahun 2023		
80.	Kabupaten Kampar	LKPD Tahun 2023		
81.	Kabupaten Bengkalis	LKPD Tahun 2023		

No	Pemerintah Daerah	Laporan Realisasi Anggaran	Neraca	Laporan Operasional
PROVINSI RIAU				
82.	Kabupaten Indragiri Hilir		LKPD Tahun 2023	
83.	Kabupaten Pelalawan		LKPD Tahun 2023	
84.	Kabupaten Rokan Hulu		LKPD Tahun 2023	
85.	Kabupaten Siak		LKPD Tahun 2023	
86.	Kabupaten Kuantan Singingi		LKPD Tahun 2023	
87.	Kabupaten Kepulauan Meranti		LKPD Tahun 2023	
88.	Kota Dumai		LKPD Tahun 2023	
89.	Kabupaten Indragiri Hulu		LKPD Tahun 2023	
90.	Kabupaten Rokan Hilir		LKPD Tahun 2023	
91.	Kota Pekanbaru		LKPD Tahun 2023	
PROVINSI JAMBI				
92.	Provinsi Jambi		LKPD Tahun 2023	
93.	Kabupaten Batanghari		LKPD Tahun 2023	
94.	Kabupaten Sarolangun		LKPD Tahun 2023	
95.	Kabupaten Tebo		LKPD Tahun 2023	
96.	Kabupaten Tanjung Jabung Barat		LKPD Tahun 2023	
97.	Kabupaten Bungo		LKPD Tahun 2023	
98.	Kabupaten Kerinci		LKPD Tahun 2023	
99.	Kabupaten Merangin		LKPD Tahun 2023	
100.	Kabupaten Tanjung Jabung Timur		LKPD Tahun 2023	
101.	Kabupaten Muaro Jambi		LKPD Tahun 2023	
102.	Kota Jambi		LKPD Tahun 2023	
103.	Kota Sungai Penuh		LKPD Tahun 2023	
PROVINSI SUMATERA SELATAN				
104.	Provinsi Sumatera Selatan		LKPD Tahun 2023	
105.	Kabupaten Musi Banyu Asin		LKPD Tahun 2023	
106.	Kabupaten Ogan Komering Ulu		LKPD Tahun 2023	
107.	Kabupaten Muara Enim		LKPD Tahun 2023	
108.	Kabupaten Lahat		LKPD Tahun 2023	
109.	Kabupaten Banyuasin		LKPD Tahun 2023	
110.	Kabupaten Oku Timur		LKPD Tahun 2023	
111.	Kabupaten Oku Selatan		LKPD Tahun 2023	
112.	Kabupaten Empat Lawang		LKPD Tahun 2023	
113.	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir		LKPD Tahun 2023	
114.	Kota Palembang		LKPD Tahun 2023	
115.	Kota Prabumulih		LKPD Tahun 2023	
116.	Kabupaten Musi Rawas		LKPD Tahun 2023	
117.	Kabupaten Ogan Komering Ilir		LKPD Tahun 2023	
118.	Kota Pagar Alam		LKPD Tahun 2023	
119.	Kota Lubuk Linggau		LKPD Tahun 2023	
120.	Kabupaten Ogan Ilir		LKPD Tahun 2023	

No	Pemerintah Daerah	Laporan Realisasi Anggaran	Neraca	Laporan Operasional
121.	Kabupaten Musi Rawas Utara	LKPD Tahun 2023		
PROVINSI BENGKULU				
122.	Provinsi Bengkulu	LKPD Tahun 2023		
123.	Kabupaten Bengkulu Utara	LKPD Tahun 2023		
124.	Kabupaten Bengkulu selatan	LKPD Tahun 2023		
125.	Kabupaten Rejang Lebong	LKPD Tahun 2023		
126.	Kabupaten Kaur	LKPD Tahun 2023		
127.	Kabupaten Muko-Muko	LKPD Tahun 2023		
128.	Kabupaten Lebong	LKPD Tahun 2023		
129.	Kabupaten Kepahiang	LKPD Tahun 2023		
130.	Kabupaten Bengkulu Tengah	LKPD Tahun 2023		
131.	Kota Bengkulu	LKPD Tahun 2023		
132.	Kabupaten Seluma	LKPD Tahun 2023		
PROVINSI LAMPUNG				
133.	Provinsi Lampung	LKPD Tahun 2023		
134.	Kabupaten Lampung Tengah	LKPD Tahun 2023		
135.	Kabupaten Lampung Utara	LKPD Tahun 2023		
136.	Kabupaten Lampung Barat	LKPD Tahun 2023		
137.	Kabupaten Tulang Bawang	LKPD Tahun 2023		
138.	Kabupaten Lampung Timur	LKPD Tahun 2023		
139.	Kabupaten Pesawaran	LKPD Tahun 2023		
140.	Kabupaten Pringsewu	LKPD Tahun 2023		
141.	Kabupaten Mesuji	LKPD Tahun 2023		
142.	Kabupaten Tulang Bawang Barat	LKPD Tahun 2023		
143.	Kabupaten Pesisir Barat	LKPD Tahun 2023		
144.	Kota Metro	LKPD Tahun 2023		
145.	Kabupaten Lampung Selatan	LKPD Tahun 2023		
146.	Kabupaten Tanggamus	LKPD Tahun 2023		
147.	Kabupaten Way Kanan	LKPD Tahun 2023		
148.	Kota Bandar Lampung	LKPD Tahun 2023		
PROVINSI JAWA BARAT				
149.	Provinsi Jawa Barat	LKPD Tahun 2023		
150.	Kabupaten Bogor	LKPD Tahun 2023		
151.	Kabupaten Sukabumi	LKPD Tahun 2023		
152.	Kabupaten Karawang	LKPD Tahun 2023		
153.	Kabupaten Bandung	LKPD Tahun 2023		
154.	Kabupaten Sumedang	LKPD Tahun 2023		
155.	Kabupaten Majalengka	LKPD Tahun 2023		
156.	Kota Bogor	LKPD Tahun 2023		
157.	Kota Sukabumi	LKPD Tahun 2023		
158.	Kota Cirebon	LKPD Tahun 2023		
159.	Kota Bekasi	LKPD Tahun 2023		

No	Pemerintah Daerah	Laporan Realisasi Anggaran	Neraca	Laporan Operasional
160.	Kota Tasikmalaya			LKPD Tahun 2023
161.	Kabupaten Bandung			LKPD Tahun 2023
162.	Kabupaten Bekasi			LKPD Tahun 2023
163.	Kabupaten Ciamis			LKPD Tahun 2023
164.	Kabupaten Cianjur			LKPD Tahun 2023
165.	Kabupaten Garut			LKPD Tahun 2023
166.	Kabupaten Indramayu			LKPD Tahun 2023
167.	Kabupaten Kuningan			LKPD Tahun 2023
168.	Kabupaten Purwakarta			LKPD Tahun 2023
169.	Kabupaten Subang			LKPD Tahun 2023
170.	Kabupaten Tasikmalaya			LKPD Tahun 2023
171.	Kota Cirebon			LKPD Tahun 2023
172.	Kota Depok			LKPD Tahun 2023
173.	Kota Cimahi			LKPD Tahun 2023
174.	Kota Banjar			LKPD Tahun 2023
175.	Kabupaten Bandung Barat			LKPD Tahun 2023
176.	Kabupaten Pangandaran			LKPD Tahun 2023
PROVINSI JAWA TENGAH				
177.	Provinsi Jawa Tengah			LKPD Tahun 2023
178.	Kabupaten Banjarnegara			LKPD Tahun 2023
179.	Kabupaten Banyumas			LKPD Tahun 2023
180.	Kabupaten Batang			LKPD Tahun 2023
181.	Kabupaten Blora			LKPD Tahun 2023
182.	Kabupaten Boyolali			LKPD Tahun 2023
183.	Kabupaten Brebes			LKPD Tahun 2023
184.	Kabupaten Cilacap			LKPD Tahun 2023
185.	Kabupaten Demak			LKPD Tahun 2023
186.	Kabupaten Grobogan			LKPD Tahun 2023
187.	Kabupaten Karanganyar			LKPD Tahun 2023
188.	Kabupaten Kebumen			LKPD Tahun 2023
189.	Kabupaten Kendal			LKPD Tahun 2023
190.	Kabupaten Kudus			LKPD Tahun 2023
191.	Kabupaten Pati			LKPD Tahun 2023
192.	Kabupaten Pekalongan			LKPD Tahun 2023
193.	Kabupaten Pemalang			LKPD Tahun 2023
194.	Kabupaten Purbalingga			LKPD Tahun 2023
195.	Kabupaten Purworejo			LKPD Tahun 2023
196.	Kabupaten Rembang			LKPD Tahun 2023
197.	Kabupaten Semarang			LKPD Tahun 2023
198.	Kabupaten Sragen			LKPD Tahun 2023
199.	Kabupaten Sukoharjo			LKPD Tahun 2023
200.	Kabupaten Tegal			LKPD Tahun 2023

No	Pemerintah Daerah	Laporan Realisasi Anggaran	Neraca	Laporan Operasional
201.	Kabupaten Temanggung	LKPD Tahun 2023		
202.	Kabupaten Wonogiri	LKPD Tahun 2023		
203.	Kabupaten Wonosobo	LKPD Tahun 2023		
204.	Kota Magelang	LKPD Tahun 2023		
205.	Kota Pekalongan	LKPD Tahun 2023		
206.	Kota Salatiga	LKPD Tahun 2023		
207.	Kota Semarang	LKPD Tahun 2023		
208.	Kota Surakarta	LKPD Tahun 2023		
209.	Kota Tegal	LKPD Tahun 2023		
210.	Kabupaten Jepara	LKPD Tahun 2023		
211.	Kabupaten Magelang	LKPD Tahun 2023		
212.	Kabupaten Klaten	LKPD Tahun 2023		
213.	Provinsi DI Yogyakarta	LKPD Tahun 2023		
214.	Kabupaten Bantul	LKPD Tahun 2023		
215.	Kabupaten Gunung Kidul	LKPD Tahun 2023		
216.	Kabupaten Kulon Progo	LKPD Tahun 2023		
217.	Kabupaten Sleman	LKPD Tahun 2023		
218.	Kota Yogyakarta	LKPD Tahun 2023		
PROVINSI JAWA TIMUR				
219.	Provinsi Jawa Timur	LKPD Tahun 2023		
220.	Kabupaten Blitar	LKPD Tahun 2023		
221.	Kabupaten Bojonegoro	LKPD Tahun 2023		
222.	Kabupaten Gresik	LKPD Tahun 2023		
223.	Kabupaten Madiun	LKPD Tahun 2023		
224.	Kabupaten Nganjuk	LKPD Tahun 2023		
225.	Kabupaten Ngawi	LKPD Tahun 2023		
226.	Kabupaten Pamekasan	LKPD Tahun 2023		
227.	Kabupaten Tuban	LKPD Tahun 2023		
228.	Kota Malang	LKPD Tahun 2023		
229.	Kota Pasuruan	LKPD Tahun 2023		
230.	Kabupaten Mojokerto	LKPD Tahun 2023		
231.	Kabupaten Sidoarjo	LKPD Tahun 2023		
232.	Kabupaten Jombang	LKPD Tahun 2023		
233.	Kabupaten Sampang	LKPD Tahun 2023		
234.	Kabupaten Sumenep	LKPD Tahun 2023		
235.	Kabupaten Bangkalan	LKPD Tahun 2023		
236.	Kabupaten Bondowoso	LKPD Tahun 2023		
237.	Kabupaten Situbondo	LKPD Tahun 2023		
238.	Kabupaten Banyuwangi	LKPD Tahun 2023		
239.	Kabupaten Jember	LKPD Tahun 2023		
240.	Kabupaten Malang	LKPD Tahun 2023		
241.	Kabupaten Pasuruan	LKPD Tahun 2023		

No	Pemerintah Daerah	Laporan Realisasi Anggaran	Neraca	Laporan Operasional
242.	Kabupaten Probolinggo		LKPD Tahun 2023	
243.	Kabupaten Lumajang		LKPD Tahun 2023	
244.	Kabupaten Kediri		LKPD Tahun 2023	
245.	Kabupaten Tulungagung		LKPD Tahun 2023	
246.	Kabupaten Trenggalek		LKPD Tahun 2023	
247.	Kabupaten Magetan		LKPD Tahun 2023	
248.	Kabupaten Ponorogo		LKPD Tahun 2023	
249.	Kabupaten Pacitan		LKPD Tahun 2023	
250.	Kabupaten Lamongan		LKPD Tahun 2023	
251.	Kota Surabaya		LKPD Tahun 2023	
252.	Kota Mojokerto		LKPD Tahun 2023	
253.	Kota Probolinggo		LKPD Tahun 2023	
254.	Kota Blitar		LKPD Tahun 2023	
255.	Kota Kediri		LKPD Tahun 2023	
256.	Kota Madiun		LKPD Tahun 2023	
257.	Kota Batu		LKPD Tahun 2023	
PROVINSI KALIMANTAN BARAT				
258.	Provinsi Kalimantan Barat		LKPD Tahun 2023	
259.	Kabupaten Bengkayang		LKPD Tahun 2023	
260.	Kabupaten Landak		LKPD Tahun 2023	
261.	Kabupaten Kapuas Hulu		LKPD Tahun 2023	
262.	Kabupaten Sintang		LKPD Tahun 2023	
263.	Kota Pontianak		LKPD Tahun 2023	
264.	Kota Singkawang		LKPD Tahun 2023	
265.	Kabupaten Sekadau		LKPD Tahun 2023	
266.	Kabupaten Sambas		LKPD Tahun 2023	
267.	Kabupaten Sanggau		LKPD Tahun 2023	
268.	Kabupaten Pontianak		LKPD Tahun 2023	
269.	Kabupaten Ketapang		LKPD Tahun 2023	
270.	Kabupaten Melawi		LKPD Tahun 2023	
271.	Kabupaten Kayong Utara		LKPD Tahun 2023	
272.	Kabupaten Kubu Raya		LKPD Tahun 2023	
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH				
273.	Provinsi Kalimantan Tengah		LKPD Tahun 2023	
274.	Kabupaten Barito Selatan		LKPD Tahun 2023	
275.	Kabupaten Kapuas		LKPD Tahun 2023	
276.	Kabupaten Kotawaringin Barat		LKPD Tahun 2023	
277.	Kabupaten Katingan		LKPD Tahun 2023	
278.	Kabupaten Seruyan		LKPD Tahun 2023	
279.	Kabupaten Lamandau		LKPD Tahun 2023	
280.	Kabupaten Gunung Mas		LKPD Tahun 2023	
281.	Kabupaten Pulang Pisau		LKPD Tahun 2023	

No	Pemerintah Daerah	Laporan Realisasi Anggaran	Neraca	Laporan Operasional
282.	Kabupaten Murung Raya	LKPD Tahun 2023		
283.	Kabupaten Barito Timur	LKPD Tahun 2023		
284.	Kabupaten Barito Utara	LKPD Tahun 2023		
285.	Kabupaten Kota Waringin Timur	LKPD Tahun 2023		
286.	Kabupaten Sukamara	LKPD Tahun 2023		
287.	Kota Palangkaraya	LKPD Tahun 2023		
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN				
288.	Provinsi Kalimantan Selatan	LKPD Tahun 2023		
289.	Kabupaten Banjar	LKPD Tahun 2023		
290.	Kabupaten Barito Kuala	LKPD Tahun 2023		
291.	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	LKPD Tahun 2023		
292.	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	LKPD Tahun 2023		
293.	Kabupaten Kotabaru	LKPD Tahun 2023		
294.	Kabupaten Tabalong	LKPD Tahun 2023		
295.	Kota Banjarbaru	LKPD Tahun 2023		
296.	Kota Banjarmasin	LKPD Tahun 2023		
297.	Kabupaten Balangan	LKPD Tahun 2023		
298.	Kabupaten Tanah Bumbu	LKPD Tahun 2023		
299.	Kabupaten Tanah Laut	LKPD Tahun 2023		
300.	Kabupaten Tapin	LKPD Tahun 2023		
301.	Kabupaten Hulu Sungai Utara	LKPD Tahun 2023		
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR				
302.	Provinsi Kalimantan Timur	LKPD Tahun 2023		
303.	Kota Bontang	LKPD Tahun 2023		
304.	Kabupaten Kutai Timur	LKPD Tahun 2023		
305.	Kabupaten Penajam Paser Utara	LKPD Tahun 2023		
306.	Kabupaten Berau	LKPD Tahun 2023		
307.	Kabupaten Kutai Kartanegara	LKPD Tahun 2023		
308.	Kabupaten Kutai Barat	LKPD Tahun 2023		
309.	Kabupaten Paser	LKPD Tahun 2023		
310.	Kota Balikpapan	LKPD Tahun 2023		
311.	Kota Samarinda	LKPD Tahun 2023		
312.	Kabupaten Mahakam Ulu	LKPD Tahun 2023		
PROVINSI SULAWESI UTARA				
313.	Provinsi Sulawesi Utara	LKPD Tahun 2023		
314.	Kabupaten Minahasa	LKPD Tahun 2023		
315.	Kota Bitung	LKPD Tahun 2023		
316.	Kota Manado	LKPD Tahun 2023		
317.	Kabupaten Kepulauan Talaud	LKPD Tahun 2023		
318.	Kabupaten Minahasa Selatan	LKPD Tahun 2023		
319.	Kabupaten Minahasa Tenggara	LKPD Tahun 2023		
320.	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	LKPD Tahun 2023		

No	Pemerintah Daerah	Laporan Realisasi Anggaran	Neraca	Laporan Operasional
321.	Kabupaten Kepulauan Sitaro		LKPD Tahun 2023	
322.	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur		LKPD Tahun 2023	
323.	Kabupaten Bolaang Mongandow		LKPD Tahun 2023	
324.	Kabupaten Bolaang Mongandow Selatan		LKPD Tahun 2023	
325.	Kabupaten Kepulauan Sangihe		LKPD Tahun 2023	
326.	Kabupaten Minahasa Utara		LKPD Tahun 2023	
327.	Kota Kotomobago		LKPD Tahun 2023	
328.	Kota Tomohon		LKPD Tahun 2023	
PROVINSI SULAWESI TENGAH				
329.	Provinsi Sulawesi Tengah		LKPD Tahun 2023	
330.	Kabupaten Banggai Kepulauan		LKPD Tahun 2023	
331.	Kabupaten Buol		LKPD Tahun 2023	
332.	Kabupaten Tolitoli		LKPD Tahun 2023	
333.	Kabupaten Donggala		LKPD Tahun 2023	
334.	Kabupaten Poso		LKPD Tahun 2023	
335.	Kota Palu		LKPD Tahun 2023	
336.	Kabupaten Tojo Una Una		LKPD Tahun 2023	
337.	Kabupaten Sigi		LKPD Tahun 2023	
338.	Kabupaten Banggai Laut		LKPD Tahun 2023	
339.	Kabupaten Morowali Utara		LKPD Tahun 2023	
340.	Kabupaten Banggai		LKPD Tahun 2023	
341.	Kabupaten Morowali		LKPD Tahun 2023	
342.	Kabupaten Parigi Mutong		LKPD Tahun 2023	
PROVINSI SULAWESI SELATAN				
343.	Provinsi Sulawesi Selatan		LKPD Tahun 2023	
344.	Kabupaten Gowa		LKPD Tahun 2023	
345.	Kabupaten Jeneponto		LKPD Tahun 2023	
346.	Kota Pare-Pare		LKPD Tahun 2023	
347.	Kabupaten Bantaeng		LKPD Tahun 2023	
348.	Kabupaten Barru		LKPD Tahun 2023	
349.	Kabupaten Bone		LKPD Tahun 2023	
350.	Kabupaten Bulukumba		LKPD Tahun 2023	
351.	Kabupaten Enrekang		LKPD Tahun 2023	
352.	Kabupaten Luwu		LKPD Tahun 2023	
353.	Kabupaten Luwu Utara		LKPD Tahun 2023	
354.	Kabupaten Maros		LKPD Tahun 2023	
355.	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan		LKPD Tahun 2023	
356.	Kabupaten Pinrang		LKPD Tahun 2023	
357.	Kabupaten Kepulauan Selayar		LKPD Tahun 2023	
358.	Kabupaten Sidenreng Rappang		LKPD Tahun 2023	
359.	Kabupaten Sinjai		LKPD Tahun 2023	
360.	Kabupaten Soppeng		LKPD Tahun 2023	

No	Pemerintah Daerah	Laporan Realisasi Anggaran	Neraca	Laporan Operasional
361.	Kabupaten Takalar	LKPD Tahun 2023		
362.	Kabupaten Tana Toraja	LKPD Tahun 2023		
363.	Kabupaten Wajo	LKPD Tahun 2023		
364.	Kota Makassar	LKPD Tahun 2023		
365.	Kota Palopo	LKPD Tahun 2023		
366.	Kabupaten Luwu Timur	LKPD Tahun 2023		
367.	Kabupaten Toraja Utara	LKPD Tahun 2023		
PROVINSI SULAWESI TENGGARA				
368.	Provinsi Sulawesi Tenggara	LKPD Tahun 2023		
369.	Kabupaten Buton	LKPD Tahun 2023		
370.	Kabupaten Konawe	LKPD Tahun 2023		
371.	Kabupaten Kolaka	LKPD Tahun 2023		
372.	Kabupaten Muna	LKPD Tahun 2023		
373.	Kota Kendari	LKPD Tahun 2023		
374.	Kabupaten Konawe Selatan	LKPD Tahun 2023		
375.	Kabupaten Bombana	LKPD Tahun 2023		
376.	Kabupaten Wakatobi	LKPD Tahun 2023		
377.	Kabupaten Kolaka Utara	LKPD Tahun 2023		
378.	Kabupaten Konawe Utara	LKPD Tahun 2023		
379.	Kabupaten Buton Utara	LKPD Tahun 2023		
380.	Kabupaten Kolaka Timur	LKPD Tahun 2023		
381.	Kabupaten Konawe Kepulauan	LKPD Tahun 2023		
382.	Kabupaten Buton Selatan	LKPD Tahun 2023		
383.	Kabupaten Buton Tengah	LKPD Tahun 2023		
384.	Kabupaten Muna Barat	LKPD Tahun 2023		
385.	Kabupaten Bau-Bau	LKPD Tahun 2023		
PROVINSI BALI				
386.	Provinsi Bali	LKPD Tahun 2023		
387.	Kabupaten Bangli	LKPD Tahun 2023		
388.	Kabupaten Buleleng	LKPD Tahun 2023		
389.	Kabupaten Gianyar	LKPD Tahun 2023		
390.	Kabupaten Jembrana	LKPD Tahun 2023		
391.	Kabupaten Karangasem	LKPD Tahun 2023		
392.	Kabupaten Tabanan	LKPD Tahun 2023		
393.	Kota Denpasar	LKPD Tahun 2023		
394.	Kabupaten Klungkung	LKPD Tahun 2023		
395.	Kabupaten Badung	LKPD Tahun 2023		
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT				
396.	Provinsi Nusa Tenggara Barat	LKPD Tahun 2023		
397.	Kabupaten Lombok Barat	LKPD Tahun 2023		
398.	Kabupaten Lombok Timur	LKPD Tahun 2023		
399.	Kabupaten Sumbawa	LKPD Tahun 2023		

No	Pemerintah Daerah	Laporan Realisasi Anggaran	Neraca	Laporan Operasional
400.	Kabupaten Dompu			LKPD Tahun 2023
401.	Kabupaten Sumbawa Barat			LKPD Tahun 2023
402.	Kabupaten Lombok Utara			LKPD Tahun 2023
403.	Kota Mataram			LKPD Tahun 2023
404.	Kota Bima			LKPD Tahun 2023
405.	Kabupaten Bima			LKPD Tahun 2023
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR				
407.	Provinsi Nusa Tenggara Timur			LKPD Tahun 2023
408.	Kabupaten Alor			LKPD Tahun 2023
409.	Kabupaten Belu			LKPD Tahun 2023
410.	Kabupaten Ende			LKPD Tahun 2023
411.	Kabupaten Kupang			LKPD Tahun 2023
412.	Kabupaten Lembata			LKPD Tahun 2023
413.	Kabupaten Ngada			LKPD Tahun 2023
414.	Kabupaten Sikka			LKPD Tahun 2023
415.	Kabupaten Sumba Barat			LKPD Tahun 2023
416.	Kabupaten Timor Tengah Selatan			LKPD Tahun 2023
417.	Kabupaten Timor Tengah Utara			LKPD Tahun 2023
418.	Kota Kupang			LKPD Tahun 2023
419.	Kabupaten Rote Ndao			LKPD Tahun 2023
420.	Kabupaten Nagekeo			LKPD Tahun 2023
421.	Kabupaten Sumba Barat Daya			LKPD Tahun 2023
422.	Kabupaten Manggarai Timur			LKPD Tahun 2023
423.	Kabupaten Sabu Raijua			LKPD Tahun 2023
424.	Kabupaten Flores Timur			LKPD Tahun 2023
425.	Kabupaten Manggarai			LKPD Tahun 2023
426.	Kabupaten Sumba Timur			LKPD Tahun 2023
427.	Kabupaten Manggarai Barat			LKPD Tahun 2023
428.	Kabupaten Sumba Tengah			LKPD Tahun 2023
429.	Kabupaten Malaka			LKPD Tahun 2023
PROVINSI MALUKU				
430.	Provinsi Maluku			LKPD Tahun 2023
431.	Kabupaten Maluku Tenggara Barat			LKPD Tahun 2023
432.	Kabupaten Maluku Tenggara			LKPD Tahun 2023
433.	Kabupaten Buru			LKPD Tahun 2023
434.	Kabupaten Kepulauan Aru			LKPD Tahun 2023
435.	Kabupaten Maluku Barat Daya			LKPD Tahun 2023
436.	Kabupaten Buru Selatan			LKPD Tahun 2023
437.	Kabupaten Maluku Tengah			LKPD Tahun 2023
438.	Kabupaten Seram Bagian Barat			LKPD Tahun 2023
439.	Kabupaten Seram Bagian Timur			LKPD Tahun 2023
440.	Kota Ambon			LKPD Tahun 2023
441.	Kota Tual			LKPD Tahun 2023

No	Pemerintah Daerah	Laporan Realisasi Anggaran	Neraca	Laporan Operasional
PROVINSI PAPUA				
442.	Provinsi Papua	LKPD Tahun 2023		
443.	Kabupaten Biak Numfor	LKPD Tahun 2023		
444.	Kabupaten Jayapura	LKPD Tahun 2023		
445.	Kabupaten Kepulauan Yapen	LKPD Tahun 2023		
446.	Kota Jayapura	LKPD Tahun 2023		
447.	Kabupaten Sarmi	LKPD Tahun 2023		
448.	Kabupaten Keerom	LKPD Tahun 2023		
449.	Kabupaten Waropen	LKPD Tahun 2023		
450.	Kabupaten Supiori	LKPD Tahun 2023		
451.	Kabupaten Mamberamo Raya	LKPD Tahun 2023		
PROVINSI MALUKU UTARA				
452.	Provinsi Maluku Utara	LKPD Tahun 2023		
453.	Kabupaten Halmahera Tengah	LKPD Tahun 2023		
454.	Kota Ternate	LKPD Tahun 2023		
455.	Kabupaten Halmahera Selatan	LKPD Tahun 2023		
456.	Kabupaten Halmahera Utara	LKPD Tahun 2023		
457.	Kabupaten Kepulauan Sula	LKPD Tahun 2023		
458.	Kota Tidore Kepulauan	LKPD Tahun 2023		
459.	Kabupaten Pulau Morotai	LKPD Tahun 2023		
460.	Kabupaten Halmahera Barat	LKPD Tahun 2023		
461.	Kabupaten Halmahera Timur	LKPD Tahun 2023		
462.	Kabupaten Kepulauan Taliabu	LKPD Tahun 2023		
PROVINSI BANTEN				
463.	Provinsi Banten	LKPD Tahun 2023		
464.	Kabupaten Serang	LKPD Tahun 2023		
465.	Kabupaten Tangerang	LKPD Tahun 2023		
466.	Kota Cilegon	LKPD Tahun 2023		
467.	Kabupaten Lebak	LKPD Tahun 2023		
468.	Kabupaten Pandeglang	LKPD Tahun 2023		
469.	Kota Tangerang	LKPD Tahun 2023		
470.	Kota Serang	LKPD Tahun 2023		
471.	Kota Tangerang Selatan	LKPD Tahun 2023		
PROVINSI GORONTALO				
472.	Provinsi Gorontalo	LKPD Tahun 2023		
473.	Kabupaten Boalemo	LKPD Tahun 2023		
474.	Kabupaten Gorontalo	LKPD Tahun 2023		
475.	Kota Gorontalo	LKPD Tahun 2023		
476.	Kabupaten Pohuwato	LKPD Tahun 2023		
477.	Kabupaten Bone Bolango	LKPD Tahun 2023		
478.	Kabupaten Gorontalo Utara	LKPD Tahun 2023		

No	Pemerintah Daerah	Laporan Realisasi Anggaran	Neraca	Laporan Operasional
PROVINSI KEPULAUAN RIAU				
479.	Provinsi Kepulauan Riau		LKPD Tahun 2023	
480.	Kabupaten Bintan		LKPD Tahun 2023	
481.	Kabupaten Karimun		LKPD Tahun 2023	
482.	Kabupaten Lingga		LKPD Tahun 2023	
483.	Kabupaten Natuna		LKPD Tahun 2023	
484.	Kota Batam		LKPD Tahun 2023	
485.	Kota Tanjung Pinang		LKPD Tahun 2023	
486.	Kabupaten Kepulauan Anambas		LKPD Tahun 2023	
PROVINSI PAPUA BARAT				
487.	Provinsi Papua Barat		LKPD Tahun 2023	
488.	Kabupaten Fak-Fak		LKPD Tahun 2023	
489.	Kabupaten Manokwari		LKPD Tahun 2023	
490.	Kabupaten Teluk Bintuni		LKPD Tahun 2023	
491.	Kabupaten Teluk Wondama		LKPD Tahun 2023	
492.	Kabupaten Kaimana		LKPD Tahun 2023	
493.	Kabupaten Manokwari Selatan		LKPD Tahun 2023	
494.	Kabupaten Pegunungan Arfak		LKPD Tahun 2023	
PROVINSI SULAWESI BARAT				
495.	Provinsi Sulawesi Barat		LKPD Tahun 2023	
496.	Kabupaten Majene		LKPD Tahun 2023	
497.	Kabupaten Mamuju		LKPD Tahun 2023	
498.	Kabupaten Polewali Mandar		LKPD Tahun 2023	
499.	Kabupaten Mamuju Utara		LKPD Tahun 2023	
500.	Kabupaten Mamuju Tengah		LKPD Tahun 2023	
501.	Kabupaten Mamasa		LKPD Tahun 2023	
PROVINSI KALIMANTAN UTARA				
502.	Provinsi Kalimantan Utara		LKPD Tahun 2023	
503.	Kabupaten Malinau		LKPD Tahun 2023	
504.	Kabupaten Nunukan		LKPD Tahun 2023	
505.	Kota Tarakan		LKPD Tahun 2023	
506.	Kabupaten Tana Tidung		LKPD Tahun 2023	
507.	Kabupaten Bulungan		LKPD Tahun 2023	
PROVINSI BANGKA BELITUNG				
508.	Provinsi Bangka Belitung		LKPD Tahun 2023	
509.	Kabupaten Belitung		LKPD Tahun 2023	
510.	Kabupaten Bangka Barat		LKPD Tahun 2023	
511.	Kabupaten Belitung Timur		LKPD Tahun 2023	
512.	Kabupaten Bangka Tengah		LKPD Tahun 2023	
513.	Kabupaten Bangka		LKPD Tahun 2023	
514.	Kota Pangkal Pinang		LKPD Tahun 2023	
515.	Kabupaten Bangka Selatan		LKPD Tahun 2023	

No	Pemerintah Daerah	Laporan Realisasi Anggaran	Neraca	Laporan Operasional
PROVINSI DKI JAKARTA				
516.	Provinsi DKI Jakarta	LKPD Tahun 2023		
PROVINSI PAPUA SELATAN				
517.	Provinsi Papua Selatan	LKPD Tahun 2023		
518.	Kabupaten Merauke	LKPD Tahun 2023		
519.	Kabupaten Boven Digoel	LKPD Tahun 2023		
520.	Kabupaten Mappi	LKPD Tahun 2023		
521.	Kabupaten Asmat	LKPD Tahun 2023		
PROVINSI PAPUA TENGAH				
522.	Provinsi Papua Tengah	LKPD Tahun 2023		
523.	Kabupaten Mimika	LKPD Tahun 2023		
524.	Kabupaten Nabire	LKPD Tahun 2023		
525.	Kabupaten Paniai	LKPD Tahun 2023		
526.	Kabupaten Puncak Jaya	LKPD Tahun 2023		
527.	Kabupaten Puncak	LKPD Tahun 2023		
528.	Kabupaten Dogiyai	LKPD Tahun 2023		
529.	Kabupaten Intan Jaya	LKPD Tahun 2023		
530.	Kabupaten Deiyai	LKPD Tahun 2023		
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN				
531.	Provinsi Papua Pegunungan	LKPD Tahun 2023		
532.	Kabupaten Jayawijaya	LKPD Tahun 2023		
533.	Kabupaten Yahukimo	LKPD Tahun 2023		
534.	Kabupaten Pegunungan Bintang	LKPD Tahun 2023		
535.	Kabupaten Tolikara	LKPD Tahun 2023		
536.	Kabupaten Mamberamo Tengah	LKPD Tahun 2023		
537.	Kabupaten Yalimo	LKPD Tahun 2023		
538.	Kabupaten Lanny Jaya	LKPD Tahun 2023		
539.	Kabupaten Nduga	LKPD Tahun 2023		
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA				
540.	Provinsi Papua Barat Daya	LKPD Tahun 2023		
541.	Kabupaten Sorong	LKPD Tahun 2023		
542.	Kota Sorong	LKPD Tahun 2023		
543.	Kabupaten Raja Ampat	LKPD Tahun 2023		
544.	Kabupaten Sorong Selatan	LKPD Tahun 2023		
545.	Kabupaten Maybat	LKPD Tahun 2023		
546.	Kabupaten Tambora	LKPD Tahun 2023		

Tabel 1. Data Pemerintah Daerah dalam Penyusunan LKPD Tahun 2023

Proses konsolidasi dilakukan sebagai berikut:

Berdasarkan data yang dihimpun, LKPD telah disajikan dalam format sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 dan Nomor 050-5889 Tahun 2021. Proses konsolidasi dilakukan dengan menjumlahkan LKPD dari Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia. Sebelum dilakukan konsolidasi dengan LKPP, diidentifikasi akun timbal-balik antar Pemerintah Daerah pada LKPD Konsolidasian, misalnya akun Utang Transfer Pemerintah Daerah lainnya dan akun Utang Pemerintah Daerah Lainnya. Selanjutnya, dilakukan eliminasi terhadap akun-akun timbal-balik tersebut.

Proses konsolidasi tingkat nasional dilakukan dengan menjumlahkan transaksi-transaksi yang dianggap sama dan melakukan eliminasi untuk transaksi yang dianggap bersifat resiprokal antar Pemerintah Daerah. Eliminasi dilakukan dengan menggunakan angka yang dianggap lebih valid dalam pencatatannya, sebagai contoh untuk transaksi utang piutang antar Pemerintah Daerah dilakukan dengan menggunakan angka Pemerintah Daerah pemberi utang. Setelah tersusun LKPD Konsolidasian yang telah dapat teridentifikasi transaksi resiprokal antar Pemerintah Daerah, langkah berikutnya adalah menyusun LKPD Konsolidasian dengan menggunakan angka Pemerintah Pusat sebagai penyesuaian angka konsolidasian pos-pos transaksi yang memiliki sifat resiprokal antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Sebagai contoh, angka penerimaan dana perimbangan pada LKPD Konsolidasian disesuaikan dengan menggunakan angka penyaluran dana perimbangan dari Pemerintah Pusat.

A. 2.3. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) melalui Konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian (LKPD-K)

“LKPK Tahun 2023 terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian, Neraca Konsolidasian, Laporan Operasional Konsolidasian, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)”

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) dilakukan dengan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian (LKPD-K), yang merupakan inisiasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Hal ini merupakan salah satu tugas Kementerian Keuangan sebagai penanggung jawab fiskal nasional yang terkait dengan transparansi fiskal.

Kebutuhan untuk melakukan konsolidasi LKPP dan LKPD-K dilakukan dalam rangka penerapan Statistik Keuangan Pemerintah (*Government Finance Statistics/GFS*) untuk memenuhi kebutuhan analisis kebijakan fiskal, analisis kegiatan pemerintahan dan perbandingan antara negara (*cross country studies*) sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara butir 1.5

(Penatausahaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran). Kebutuhan untuk meningkatkan kualitas informasi keuangan pemerintah dalam rangka penyajian laporan statistik keuangan pemerintah dalam jangka panjang juga ditegaskan dalam penjelasan Undang Undang No. 23 Tahun 2009 tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2007 dan Undang Undang No.24 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2013. Dalam rangka mewujudkan konsolidasi fiskal dan statistik keuangan pemerintah secara nasional tersebut, Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mengatur mengenai perlu diterbitkannya Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan sebagai acuan bagi sistem akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah.

Laporan hasil reviu BPK atas pelaksanaan transparansi fiskal tahun 2010 mengungkapkan adanya kebutuhan untuk melakukan konsolidasi LKPP dengan LKPD dalam rangka kejelasan peran dan tanggung jawab pemerintah dan ketersediaan informasi bagi publik. Menurut hasil reviu tersebut, peran dan fungsi lembaga pemerintahan, dan antar lembaga pemerintah, sektor publik dan swasta telah diatur. Secara umum, pemerintah telah melakukan upaya untuk berkomitmen dalam menyediakan informasi fiskal kepada publik. Namun demikian, pemerintah belum sepenuhnya dapat menyajikan informasi fiskal mengenai integrasi posisi fiskal nasional (integrasi LKPP dengan LKPD) sehingga fungsi pemerintah secara keseluruhan belum terlihat.

Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian merupakan laporan keuangan yang dihasilkan dari entitas-entitas pelaporan yang independen satu terhadap yang lainnya. Kondisi independen tersebut berlaku dalam hubungan antara LKPP dan LKPD, walaupun dalam hubungan keuangan melalui mekanisme desentralisasi fiskal, peran Pemerintah Pusat masih sangat dominan atas pendapatan daerah dalam bentuk transfer. Kondisi independen dalam pertanggungjawaban tersebut telah sesuai dengan UU 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pasal 6 Undang-Undang No. 17 tahun 2003 menyatakan "Presiden selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara menyerahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah".

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian tidak dimaksudkan untuk tujuan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, tetapi lebih pada tujuan transparansi fiskal. Tanggung jawab atas nilai dari masing-masing unsur laporan keuangan yang dikonsolidasikan tetap berada pada masing-masing entitas pelaporan. Sesuai dengan PSAP nomor 11, konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya dengan atau tanpa mengeliminasi akun timbal balik (*reciprocal accounts*).

Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tahun 2023 mencakup:

b. Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Konsolidasian

“LRA LKPK terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan”

Tujuan utama dalam penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian adalah dalam rangka memenuhi kewajiban transparansi fiskal oleh Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal nasional. Sesuai lingkup yang disebutkan di atas, maka melalui Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian ini dapat dilihat peran Pemerintah Pusat dan daerah terhadap perekonomian wilayah yang bersangkutan. Pendapatan, belanja dan pembiayaan, baik pada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, merupakan komponen utama yang mencerminkan kondisi fiskal nasional dari sektor pemerintahan.

Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian ini menggunakan istilah Pendapatan untuk setiap jenis Pendapatan dan Hibah dalam lembar muka laporan keuangan (Pendapatan Perpajakan, Pendapatan Negara Bukan Pajak, Pendapatan Hibah) dalam rangka konsistensi penggunaan istilah dan sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Hal ini berbeda dengan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang menggunakan istilah Penerimaan untuk setiap jenis Pendapatan dan Hibah dalam lembar muka laporan keuangan sebagaimana diatur dalam UU APBN (Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Penerimaan Hibah). Namun demikian, hal tersebut hanya merupakan perbedaan istilah dan tidak mempengaruhi pengakuan dan pengukuran dari Pendapatan yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian ini maupun Penerimaan yang digunakan dalam LKPP.

Angka yang dikonsolidasikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Konsolidasian adalah angka realisasi anggaran baik untuk LRA Pemerintah Pusat maupun untuk LRA Pemerintah Daerah. LRA Pemerintah Konsolidasian ini mencakup konsolidasi terhadap angka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam rangka penyusunan laporan keuangan pemerintah konsolidasian ini, realisasi per jenis Belanja Pemerintah Pusat disajikan berdasarkan data BUN sehingga tidak disajikan angka Suspen Belanja.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam menyusun LRA Pemerintah Konsolidasian adalah sebagai berikut:

- Melakukan identifikasi transaksi dan akun yang sejenis untuk dijumlahkan
Pendapatan dan Belanja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan transaksi yang sejenis sehingga akun pendapatan Pemerintah Pusat dapat dijumlahkan dengan akun

pendapatan Pemerintah Daerah, dan akun Belanja Pemerintah Pusat dapat dijumlahkan dengan akun Belanja Pemerintah Daerah. Walaupun masih terdapat perbedaan dalam klasifikasi antara pendapatan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, namun perbedaan tersebut dapat diatasi melalui konversi dan mapping antara akun di Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pembiayaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga merupakan transaksi yang sejenis, sehingga akun pembiayaan Pemerintah Pusat dapat dijumlahkan dengan akun pembiayaan Pemerintah Daerah. Namun demikian di dalam akun pendapatan, belanja, dan pembiayaan tersebut terdapat akun-akun resiprokal antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang perlu dieliminasi. Mapping akun Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Konsolidasian dan perlakuan terhadap akun-akun tersebut dapat dilihat pada tabel mapping konsolidasi.

- Melakukan identifikasi akun timbal balik untuk dieliminasi
Eliminasi dilakukan terhadap akun timbal balik pada Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Konsolidasian, yang merupakan akun yang terjadi akibat transaksi antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Akun timbal balik pada Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Tahun 2023 yaitu:
 - » Pendapatan Transfer pada Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Konsolidasian dengan Belanja Transfer (Dana Perimbangan, serta Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian) pada Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Pusat.
 - » Akun pembiayaan berupa Penerusan Pinjaman (neto) pada Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Pusat dengan Pinjaman Dalam Negeri/Daerah pada Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Konsolidasian.
 - » Akun pembiayaan berupa Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman pada Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Pusat dengan Pembayaran Pokok Utang pada Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Konsolidasian.
 - » Akun penerimaan hibah pada Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah dengan Belanja hibah pada Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Pusat.

b. Neraca Pemerintah Konsolidasian

Proses konsolidasi dilakukan terhadap Aset, Kewajiban dan Ekuitas pada Neraca Pemerintah Pusat dan 546 Neraca Pemerintah Daerah per 31 Desember 2023. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penyusunan Neraca Pemerintah Konsolidasian adalah sebagai

“Neraca LKPK terdiri dari pos aset, kewajiban, dan ekuitas”

berikut:

- Melakukan identifikasi transaksi dan akun yang sejenis untuk dijumlahkan
Secara umum, Aset dan kewajiban Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan transaksi yang sejenis sehingga akun Aset Pemerintah Pusat dapat dijumlahkan dengan akun Aset Pemerintah Daerah, dan akun kewajiban Pemerintah Pusat dapat dijumlahkan dengan akun kewajiban Pemerintah Daerah kecuali untuk akun Aset dan kewajiban yang terjadi karena transaksi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang harus dieliminasi. *Mapping* akun Neraca serta perlakuan terhadap akun-akun tersebut dapat dilihat pada tabel *mapping* Neraca Pemerintah konsolidasian.
- Melakukan identifikasi akun timbal balik untuk dieliminasi
Eliminasi dilakukan terhadap akun timbal balik pada Neraca Pemerintah Konsolidasian, yang berupa akun Aset dan kewajiban yang terjadi karena transaksi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yaitu akun utang-piutang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berupa:
- Eliminasi Akun Utang Transfer pada Neraca Pemerintah Pusat dengan Akun Piutang Lain-lain (Piutang Kekurangan Transfer dan Dana Bagi hasil) pada Neraca Pemerintah Daerah Konsolidasian serta Piutang Bukan Pajak dan Piutang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer ke Daerah pada Neraca Pemerintah Pusat.
- Eliminasi Akun Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman pada Neraca Pemerintah Pusat dengan Akun Utang Dalam Negeri-Pemerintah Pusat dan Pemda Lainnya dan Akun Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya serta Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya pada Neraca Pemerintah Daerah.
- Eliminasi Akun Bagian Lancar Penerusan Pinjaman serta Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat dan BUMN/D pada Neraca Pemerintah Pusat dengan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya pada Neraca Pemerintah Daerah Konsolidasian.
- Eliminasi Piutang Pajak Pusat dari Pemerintah Daerah berupa Akun Utang Perhitungan Pihak Ketiga pada Neraca Pemerintah Daerah Konsolidasian dengan Piutang Bukan Pajak pada Neraca Pemerintah Pusat.
- Eliminasi Piutang Bunga-Penerusan Pinjaman berupa Akun Bagian Lancar Penerusan Pinjaman serta Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat dan BUMN/D pada Neraca Pemerintah Pusat dengan Utang Biaya Pinjaman pada Neraca Pemerintah Daerah Konsolidasian.

- Eliminasi Piutang Denda-Penerusan Pinjaman berupa Akun Bagian Lancar Penerusan Pinjaman serta Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat dan BUMN/D pada Neraca Pemerintah Pusat dengan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya pada Neraca Pemerintah Daerah Konsolidasian.

c. Laporan Operasional Pemerintah Konsolidasian

Laporan Operasional disusun berdasarkan data Pendapatan-LO, Beban, Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional dan Surplus/Defisit Pos Luar Biasa Tahun Berjalan yang dikompilasi dari seluruh LK K/L dan LK BUN. Seluruh data tersebut diperhitungkan untuk menghasilkan Surplus/Defisit-LO yang menjadi nilai yang akan disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas. Proses konsolidasi Laporan Operasional antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dilakukan terhadap Pendapatan dan Beban Operasional, Pendapatan dan Beban Non Operasional, Pendapatan dan Beban Luar Biasa, serta Surplus/Defisit Laporan Operasional pada Pemerintah Pusat serta 546 Pemerintah Daerah.

d. Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian

Analisis dalam Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian dilakukan dengan pendekatan:

- Analisis belanja per fungsi yang dilakukan dengan:
 - » Merinci Belanja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah per fungsi. Data belanja per fungsi Pemerintah Pusat diambil dari LKPP Tahun 2023.
 - » Realisasi belanja per fungsi untuk Pemerintah Daerah dihitung berdasarkan proporsi belanja per fungsi pada APBD terhadap total realisasi belanja. Kebijakan ini diambil karena data konsolidasi realisasi belanja per fungsi Pemerintah Daerah tidak tersedia pada saat LKPK ini disusun.
 - » Analisis dilakukan terhadap komposisi belanja per fungsi.
- Analisis per jenis pendapatan, jenis Belanja, dan jenis pembiayaan per tahun dan antar tahun yang dilakukan dengan menganalisis data per jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan (komposisi) pada Tahun 2023, serta membandingkannya dengan tahun 2022.
- Analisis dalam Catatan atas Neraca Konsolidasi dilakukan dengan pendekatan analisis per jenis akun aset, kewajiban dan ekuitas per tahun dan antar tahun.

Pemerintah Pusat	Pemerintah Daerah	Konsolidasi
A. Pendapatan Negara dan Hibah	A. Pendapatan Asli Daerah	Dijumlahkan
I. Pendapatan Perpajakan		
1. Pajak Dalam Negeri	1. Pendapatan Pajak Daerah	
2. Pajak Perdagangan Internasional		
II. Pendapatan Negara Bukan Pajak		
1. Pendapatan Sumber Daya Alam		
2. Bagian Pemerintah atas Laba BUMN	2. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	
3. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	3. Pendapatan Retribusi Daerah	Dieliminasi dan dijumlahkan
	4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	
III. Pendapatan Hibah	B. Lain-Lain Pendapatan yang Sah	
	1. Pendapatan Hibah	
	C. Pendapatan Transfer	Dieliminasi
	1. Dana Perimbangan	
	a. Dana Bagi Hasil	
	b. Dana Alokasi Umum	
	c. Dana Alokasi Khusus	
	2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian	
	a. Dana Otonomi Khusus	
	b. Dana Insentif Daerah	
	c. Dana Keistimewaan DIY	
	3. Dana Desa	
B. Belanja Negara		Dijumlahkan
I. Belanja Pemerintah Pusat	Belanja Pemerintah Daerah	
1. Belanja Pegawai	1. Belanja Pegawai	
2. Belanja Barang	2. Belanja Barang	
3. Belanja Modal	3. Belanja Modal	
4. Pembayaran Bunga Utang	4. Pembayaran Bunga Utang	Dieliminasi dan dijumlahkan
5. Subsidi	5. Subsidi	Dijumlahkan
6. Bantuan Sosial	6. Bantuan Sosial	
7. Belanja Lain-lain	7. Belanja Tak Terduga	
8. Hibah	8. Hibah	Dieliminasi dan dijumlahkan

II. Transfer ke Daerah		
1. Dana Perimbangan		
a. Dana Bagi Hasil		
b. Dana Alokasi Umum		
c. Dana Alokasi Khusus		
2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian		
a. Dana Otonomi Khusus		
b. Dana Insentif Daerah		
c. Dana Keistimewaan DIY		
3. Dana Desa		
Pembiayaan Dalam Negeri		Dijumlahkan
1. Rekening Pemerintah	1. SILPA TA sebelumnya	
2. Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman	2. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	Dieliminasi dan dijumlahkan
3. Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi	3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Dijumlahkan
4. Surat Berharga Negara (Neto)		
5. Pinjaman Dalam Negeri	4. Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	Dieliminasi dan dijumlahkan
6. Penyertaan Modal Negara dan Daerah/Dana Investasi Pemerintah	5. Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Dijumlahkan
7. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional	6. Dana Cadangan	
	7. Pembayaran Pokok Utang	Dieliminasi dan dijumlahkan
	8. Pemberian Pinjaman	Dijumlahkan
Pembiayaan Luar Negeri (Neto)		
1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto)		
a. Penarikan Pinjaman Program		
b. Penarikan Pinjaman Proyek		
2. Penerusan Pinjaman		Dieliminasi dan dijumlahkan
3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri		Dijumlahkan

Tabel 2. Mapping Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Konsolidasian Tahun 2023

A. 3. KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN ELIMINASI AKUN TIMBAL BALIK

Laporan Realisasi APBN dan APBD disusun dengan menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Negara/Daerah (KUN/D) atau dikeluarkan dari KUN/D. Sedangkan penyajian aset, kewajiban, dan Ekuitas dalam Neraca diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari KUN/D.

Penyusunan dan penyajian LKPP telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyusunan dan penyajian LKPD Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan demikian, dalam penyusunan LKPP dan LKPD telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LKPP dan LKPD adalah:

1. Pendapatan LRA

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara/Daerah. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

2. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Umum Negara/Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pada Pemerintah Pusat, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

3. Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada KUN/D serta pada saat terjadinya pengeluaran kas dari KUN/D atau terjadinya pengesahan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan oleh BUN. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).

4. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat. Aset diukur dalam satuan uang (rupiah), termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian Aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

5. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Kewajiban Pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

6. Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah.

7. Bagan Akun Standar

Pos-pos yang disajikan pada LKPP Tahun 2023 adalah berdasarkan Bagan Akun Standar (BAS) yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 dan peraturan perubahannya. Pos-pos yang disajikan pada LKPD Tahun 2023 adalah berdasarkan bagan akun standar (kode akun) yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 dan Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Kebijakan eliminasi akun timbal balik yang diterapkan dalam laporan keuangan konsolidasian ini adalah:

1. Eliminasi akun timbal balik

Akun timbal balik adalah akun yang terjadi akibat transaksi antar entitas pelaporan, dalam hal ini antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Eliminasi akun timbal balik dilakukan dengan jumlah yang sama pada Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Konsolidasian, Neraca Pemerintah Konsolidasian, dan Laporan Operasional Konsolidasian.

2. Eliminasi akun timbal balik yang tidak sama jumlahnya

Eliminasi yang dilakukan terhadap akun timbal balik dengan jumlah yang sama merupakan eliminasi yang ideal. Namun pada kenyataannya, terdapat akun timbal balik dengan jumlah yang tidak sama. Hal ini dapat disebabkan oleh banyak hal seperti perbedaan waktu pencatatan dan kesalahan pencatatan. Oleh karena itu, perlu dibuat kebijakan eliminasi terhadap akun timbal balik yang tidak sama jumlahnya. Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-34/PB/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan LKPK-TW dan LSKP-TW pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, eliminasi akun timbal balik yang tidak sama jumlahnya dilakukan dengan menyesuaikan nilai pada transaksi-transaksi resiprokal dengan menggunakan angka yang terdapat pada Pemerintah Pusat. Penggunaan angka Pemerintah Pusat sebagai angka eliminasi dengan pertimbangan asumsi bahwa pencatatan pada LKPP lebih valid dibandingkan dengan angka yang diperoleh dari LKPD yang dihimpun. Contoh eliminasi akun timbal balik yang tidak sama jumlahnya adalah akun Pendapatan Transfer Dana Bagi Hasil pada Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Konsolidasian dengan Belanja Transfer Dana Bagi Hasil pada Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Pusat.

A. 4. EKONOMI MAKRO

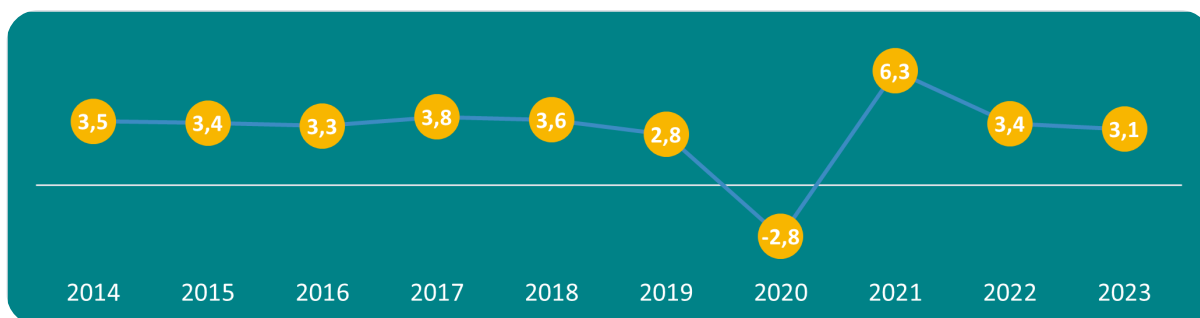
Sepanjang tahun 2023, perekonomian global dihadapkan pada beragam tantangan dan risiko yang membayangi keberlanjutan pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19. Tantangan global tidak terlepas dari perubahan yang terjadi di negara-negara maju. Tingginya inflasi global direspon oleh Bank Sentral di berbagai negara dengan pengetatan kebijakan moneter dan kenaikan suku bunga, sehingga menyebabkan pelemahan pertumbuhan ekonomi. Tingkat suku bunga global yang tinggi juga meningkatkan risiko *debt distress* di banyak negara dengan tingkat utang yang tinggi. Faktor geopolitik, yang ditandai dengan eskalasi konflik dan perang, juga turut menambah ketidakpastian global. Di saat perang di Ukraina masih berlanjut, dunia dikejutkan dengan konflik yang berujung pada krisis kemanusiaan di Gaza, Palestina. Eskalasi konflik geopolitik tersebut kemudian berdampak negatif pada kelancaran rantai pasok global serta meningkatkan risiko gejolak harga pangan dan energi. Kecenderungan meningkatnya kebijakan perdagangan dan industri yang bersifat proteksionis serta meningkatnya risiko utang di banyak negara akibat tingkat bunga yang tinggi, juga menciptakan kondisi terbatasnya ruang kebijakan di banyak negara. Konflik geopolitik yang masih berlanjut menunjukkan potensi risiko belum berhenti. Di tengah ketidakpastian global, kinerja manufaktur internasional mengalami pelemahan yang menyebabkan penurunan aktivitas perdagangan global.

Aktivitas manufaktur global juga masih melemah. Indikator *Purchasing Managers Index* (PMI) Manufaktur global yang terus berada dalam zona kontraksi, dan ditutup di angka 49,0 pada akhir tahun. Zona Eropa mengalami kontraksi aktivitas manufaktur paling parah di sepanjang tahun 2023, PMI Manufaktur bulan Desember tercatat hanya mencapai 44,4. Pada bulan Desember 2023, aktivitas manufaktur di lebih dari 65 persen negara G20 dan ASEAN-6 masih berada dalam zona kontraksi. Aktivitas manufaktur di negara-negara dengan perekonomian besar, seperti Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, Jerman, serta beberapa negara di ASEAN seperti Malaysia dan Vietnam, hampir selalu berada di zona kontraksi sepanjang tahun 2023. Di sisi lain, Indonesia dan India adalah dua dari sedikit negara yang sepanjang tahun 2023 aktivitas manufakturnya terus berada di zona ekspansi.

Harga komoditas global juga mengalami moderasi sepanjang tahun 2023, meskipun masih dibayangi oleh ketidakpastian yang tinggi karena faktor geopolitik dan cuaca ekstrem. Harga komoditas energi berada dalam tren menurun sepanjang tahun 2023, dengan penurunan masing-masing sebesar 38,8 persen (*ytd*) untuk gas alam, 63,8 persen (*ytd*) untuk batu bara, serta 10,3 persen (*ytd*) untuk minyak (*brent*) dibandingkan dengan harga penutupan tahun 2022. Dari sisi komoditas pangan, harga beras masih berada di level tinggi yang disebabkan oleh dampak fenomena El Nino yang mengakibatkan kekeringan panjang sehingga menurunkan

hasil panen. Sementara itu, harga kelapa sawit yang merupakan salah satu komoditas unggulan ekspor Indonesia juga berada dalam tren menurun, tumbuh minus 12,3 persen (ytd) dibandingkan dengan harga penutupan tahun 2022. Harga komoditas pangan lain seperti kedelai, gandum, dan jagung relatif stabil dengan kecenderungan menurun.

Berbagai eskalasi tantangan dan risiko global tersebut, serta masih buruknya kinerja manufaktur global, berakibat pada turunnya prospek perekonomian dunia. *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) dalam publikasinya pada September 2023 memperkirakan pertumbuhan ekonomi global di angka 3,0 persen (yoy) pada 2023 dan turun ke 2,7 persen (yoy) pada tahun 2024. Dalam periode yang sama, International Monetary Fund (IMF) dalam World Economic Outlook (WEO) Oktober 2023 memproyeksikan ekonomi global akan tumbuh 3,0 persen (yoy) dan 2,9 persen (yoy) pada tahun 2023 dan 2024. Bank Dunia pada bulan Januari 2024 memperkirakan pertumbuhan ekonomi global hanya akan mencapai 2,6 persen (yoy) pada tahun 2023 dan akan menurun ke 2,4 persen (yoy) pada tahun 2024. Dengan kondisi perekonomian yang masih dihadapkan pada tekanan ketidakpastian, IMF dalam WEO Januari 2024 menyatakan pertumbuhan ekonomi global tahun 2023 pada kisaran 3,1 persen (yoy) seperti yang terlihat pada Grafik 2, lebih tinggi 0,1 persen dibandingkan dengan proyeksinya pada WEO Oktober 2023. Sebelumnya, IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global pada WEO Januari 2023 sebesar 2,9 persen (yoy), WEO April 2023 sebesar 2,8 persen (yoy), WEO Juli 2023 sebesar 3,0 persen (yoy), dan WEO Oktober 2023 sebesar 3,0 persen (yoy).



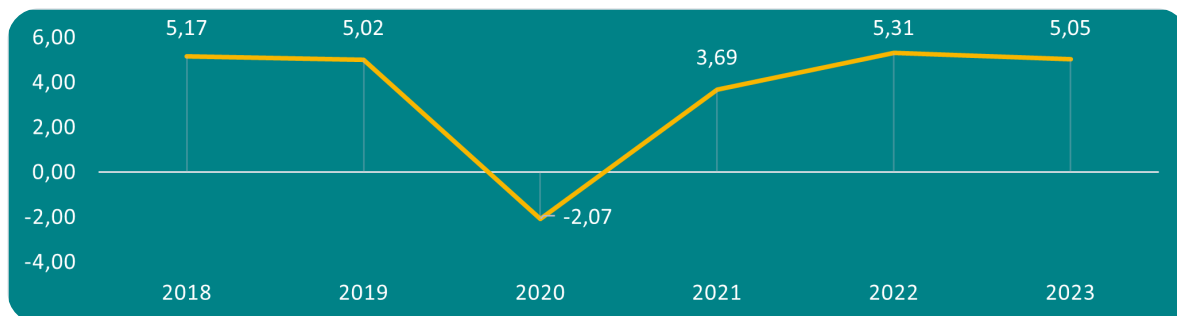
Grafik 3. Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Global Tahun 2014-2023

Sumber: LKPP Audited Tahun 2022, IMF-WEO Januari 2024

A. 4.1 Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Indonesia berhasil mencatatkan pertumbuhan yang kuat pada tahun 2023 yaitu sebesar 5,05 persen (yoy), meskipun dari basis yang tinggi (*high base*) pada tahun 2022. Konsistensi tren pertumbuhan yang sangat baik ditopang oleh aktivitas permintaan domestik yang masih kuat, khususnya aktivitas konsumsi dan investasi. Ekonomi Indonesia Triwulan IV 2023 terhadap Triwulan IV 2022 mengalami pertumbuhan 5,04 persen (yoy) yang menunjukkan keberlanjutan

kinerja positif dari triwulan-triwulan sebelumnya yang pada Triwulan I 2023 tumbuh sebesar 5,04 persen (yoy), pada Triwulan II 2023 tumbuh sebesar 5,17 persen (yoy), dan pada Triwulan III 2023 tumbuh sebesar 4,94 persen (yoy). Secara tahunan, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023 lebih rendah dibandingkan asumsi di dalam APBN, yaitu 5,30 persen (yoy). Meskipun pertumbuhan ekonomi tahun 2023 melambat dibandingkan tahun 2022 yang tercatat sebesar 5,31 persen (yoy), Indonesia masih mampu mempertahankan performa ekonomi yang relatif kuat.



Grafik 3. Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (dalam persen, yoy)

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

A. 4.2 Inflasi

Stabilitas Ekonomi menjadi salah satu prasyarat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan terutama di tengah situasi tantangan global yang terus berubah. Pemerintah terus berkomitmen untuk memperkuat kebijakan pengendalian inflasi guna menjaga stabilitas harga. Tingkat inflasi nasional tahun 2023 tercatat 2,61 persen (yoy), lebih rendah dari 5,51 persen (yoy) pada tahun 2022. Penurunan laju inflasi didukung oleh terjaganya inflasi komponen harga yang diatur pemerintah (*administered price*) dan inflasi inti (*core inflation*). Sementara itu, inflasi pangan bergejolak (*volatile food*) dalam tren peningkatan, yang salah satunya disebabkan oleh gangguan cuaca dan fenomena *El Nino*. Tren perkembangan inflasi selama tahun 2023 dapat dilihat pada Grafik 8.



Grafik 3. Perkembangan Tingkat Inflasi (dalam persen, yoy)

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

A. 4.3 Nilai Tukar Rupiah

Sepanjang tahun 2023, nilai tukar rupiah secara umum mengalami depresiasi khususnya pada paruh kedua 2023. Di tengah ketidakpastian pasar keuangan global, nilai tukar rupiah yang mengacu pada kurs JISDOR mencapai Rp15.439 per dolar AS pada Desember 2023, menguat 0,85 persen dibandingkan dengan awal 2023. Meskipun pada rentang bulan Oktober-November nilai rupiah terhadap dolar AS melemah dengan level paling rendah terjadi pada tanggal 1 November 2023, yaitu Rp15.946 rupiah per dolar AS, nilai tukar rupiah kembali menguat menjelang akhir tahun 2023. Rata-rata nilai tukar rupiah selama Januari-Desember 2023 tercatat sebesar Rp15.255 per dolar AS.



Grafik 3. Tren Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Tahun 2023 dan 2022 (Rupiah per Dollar AS)

Sumber: Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, 2024

Nilai tukar rupiah yang cenderung stabil pada tahun 2023 tidak lepas dari kebijakan moneter yang secara konsisten diterapkan Bank Indonesia. Pengetatan kebijakan moneter di berbagai negara masih terus berlanjut dalam rangka mengatasi tekanan inflasi, meskipun tidak seagresif tahun 2022. Dampaknya, terjadi apresiasi dolar AS terhadap berbagai mata uang lain yang terlihat dari pergerakan Indeks Dolar AS pada level di atas 100, terutama pada Semester II 2023. Di Indonesia, pelemahan nilai tukar rupiah dapat tercermin pada tren pergerakan cadangan devisa yang turun pada Triwulan II hingga awal Triwulan IV 2023. Penurunan ini kemudian relatif tertahan oleh surplus neraca perdagangan yang diuntungkan dari kenaikan harga komoditas.

A. 4.4 Neraca Pembayaran

Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada tahun 2023 mencatat surplus sebesar 6,3 miliar dolar AS, lebih besar dibandingkan surplus pada tahun 2022 sebesar 4,0 miliar dolar AS. Perbaikan NPI terutama ditopang oleh perbaikan signifikan pada kinerja Neraca Transaksi Modal dan Finansial (NTMF) seiring dengan defisit pada Neraca Transaksi Berjalan (NTB).

Neraca transaksi berjalan tahun 2023 kembali mencatatkan defisit, setelah mengalami surplus tahun 2022. Pada tahun 2023 neraca transaksi berjalan mencatatkan defisit sebesar 1,6 miliar dolar AS (0,1

persen dari PDB), setelah mencatatkan surplus sebesar 13,2 miliar dolar AS (1,0 persen dari PDB) pada tahun sebelumnya. Penurunan kinerja neraca transaksi berjalan ini terutama didorong oleh surplus neraca perdagangan yang menurun akibat melemahnya kinerja ekspor, terutama dari sektor nonmigas. Selain itu, faktor lain yang turut mendorong penurunan kinerja neraca transaksi berjalan yaitu (1) penurunan surplus neraca pendapatan sekunder akibat menurunnya penerimaan hibah; (2) penurunan defisit neraca jasa seiring dengan peningkatan kunjungan wisman menyusul pemulihan global tourism dan penyelenggaraan event internasional; serta (3) peningkatan defisit neraca pendapatan primer akibat peningkatan remitansi Tenaga Kerja Asing (TKA).

Kinerja NTMF membaik di tengah masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global. Pada tahun 2023, kinerja NTMF membaik secara signifikan dengan surplus 8,8 miliar dolar AS, setelah mencatat defisit 8,7 miliar dolar AS pada tahun sebelumnya. Perbaikan ini ditopang oleh konsistensi surplus investasi langsung karena iklim investasi dan kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia yang masih terjaga dan peningkatan arus masuk investasi portofolio, terutama pada pasar SBN domestik.

Uraian	2023	2022
Transaksi Berjalan (<i>Current Account</i>)	-1,57	13,22
Transaksi Modal dan Finansial (<i>Capital & Financial Account</i>)	8,75	-8,68
Selisih Perhitungan Bersih (<i>Net Errors & Omission</i>)	-0,88	-0,54
Neraca Keseluruhan (<i>Overall Balance</i>)	6,30	3,99

Tabel 3. Ringkasan Neraca Pembayaran Indonesia Tahun 2023 dan 2022 (dalam miliar Dollar AS)

Sumber: Bank Indonesia, 2024

A. 5. REVISI DATA NERACA PEMERINTAH KONSOLIDASIAN TAHUN 2013-2017

Dalam rangka peningkatan kualitas LKPK, Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan telah melaksanakan konfirmasi dan perbaikan data LKPK secara periodik. Selain itu, sebagai upaya Pemerintah dalam meningkatkan ketersediaan data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan telah memasukkan kriteria pengiriman data LKPD oleh Pemerintah Daerah kepada Kementerian Keuangan sebagai salah satu syarat dalam pengalokasian Dana Transfer Daerah. Kebijakan ini diharapkan dapat sebagai *enforcement* bagi setiap Pemerintah Daerah untuk tertib dalam menyampaikan laporan keuangannya.

Terdapat perbaikan data LRA dan Neraca Pemerintah Konsolidasian Tahun 2013-2017 sebagai hasil konfirmasi data LRA dan Neraca LKPD oleh Ditjen Perbendaharaan kepada Ditjen Perimbangan Keuangan, dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Jumlah Pemda sebelum update				Jumlah Pemda setelah update				Jumlah Pemda Tahun Bersangkutan
	Neraca LKPD-K	Audited	LRA LKPD-K	Audited	Neraca LKPD-K	Audited	LRA LKPD-K	Audited	
2013	312	180	530	514	530	530	530	530	530
2014	511	426	542	510	542	542	542	542	542
2015	542	504	542	512	542	542	542	542	542
2016	542	482	542	454	542	542	542	542	542
2017	542	482	542	538	542	542	542	542	542

Tabel 3. Perubahan Data LRA dan Neraca Pemerintah Daerah Konsolidasian Tahun 2013-2017

Halaman ini sengaja dikosongkan

B. CATATAN ATAS LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN TAHUN 2023

B. 1. Pendapatan dan Hibah Konsolidasian

“Pendapatan dan Hibah Konsolidasian Tahun 2023 didominasi oleh Pendapatan Perpajakan Konsolidasian sebesar 78,29 persen.”

Pada Tahun 2023, Pendapatan dan Hibah Konsolidasian mencapai Rp3.132,87 triliun, merupakan konsolidasi Pendapatan dan Hibah Pemerintah Pusat sebesar Rp2.783,93 triliun dan konsolidasi Pendapatan dan Hibah Pemerintah Daerah sebesar Rp1.251,96 triliun sebelum eliminasi akun resipokal. Pendapatan dan Hibah Konsolidasian tersebut terdiri dari Pendapatan Perpajakan konsolidasian sebesar Rp2.452,86 triliun atau sebesar 78,29 persen, Pendapatan Bukan Pajak konsolidasian sebesar Rp675,49 triliun atau sebesar 21,56 persen, dan Pendapatan Hibah konsolidasian sebesar Rp4,52 triliun atau sebesar 0,14 persen dari total Pendapatan dan Hibah Konsolidasian.



Grafik 6. Komposisi Pendapatan dan Hibah Konsolidasian Tahun 2023

Pendapatan Perpajakan Konsolidasian Tahun 2023 sebesar Rp2.452,86 triliun terdiri dari Pajak Dalam Negeri konsolidasian sebesar Rp2.388,37 triliun atau sebesar 97,37 persen dan Pajak Perdagangan Internasional konsolidasian sebesar Rp64,49 triliun atau sebesar 2,63 persen.

Pendapatan Bukan Pajak meliputi Pendapatan Sumber Daya Alam Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN/D, dan Pendapatan Bukan Pajak Lainnya. Pendapatan Sumber Daya Alam meliputi pendapatan dari minyak bumi, gas alam, pertambangan umum, kehutanan, perikanan dan pertambangan panas bumi. Pendapatan Bukan Pajak Lainnya pada Pemerintah Pusat antara lain meliputi pendapatan dari penjualan dan sewa, jasa, bunga, pendapatan kejaksaan dan peradilan, pendidikan, gratifikasi dan uang sitaan hasil korupsi, iuran dan denda, serta pendapatan lain-lain. Pendapatan bukan pajak lainnya pada Pemerintah Daerah meliputi Pendapatan Retribusi dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD).



Grafik 7-8. Komposisi Pendapatan Perpajakan Konsolidasian dan Pendapatan Bukan Pajak Konsolidasian Tahun 2023

Pendapatan Bukan Pajak Konsolidasian terdiri dari Pendapatan Sumber Daya Alam sebesar Rp254,20 triliun, Pendapatan dari Bagian Pemerintah atas Laba BUMN/D sebesar Rp95,16 triliun, Pendapatan Bukan Pajak Lainnya sebesar Rp164,68 triliun dan Pendapatan BLU sebesar Rp161,45 triliun.

Jumlah realisasi Pendapatan Perpajakan mengalami peningkatan sebesar Rp179,47 triliun atau 7,89 persen dibandingkan dengan Pendapatan Perpajakan Konsolidasian Tahun 2022. Pajak Dalam Negeri meningkat sebesar Rp205,88 triliun atau sebesar 9,43 persen, sedangkan Pajak Perdagangan Internasional menurun sebesar Rp26,41 triliun atau sebesar 29,05 persen dibandingkan dengan periode Tahun 2022. Menurunnya Pajak Perdagangan Internasional utamanya disebabkan menurunnya pos Pendapatan Bea Masuk pada Pemerintah Pusat, di mana nilai impor menurun sebesar 6,6 persen dan penurunan bea masuk dari komoditas utama seperti gas alam, suku cadang kendaraan, barang dari logam untuk bangunan, besi baja dasar dan bahan baku plastik. Selain itu, Bea Keluar produk sawit juga menurun sebesar 81,2 persen yang dipengaruhi penurunan harga meskipun volume tumbuh, dan bauksit yang menurun sebesar 89,1 persen karena berhentinya ekspor sejak Maret 2023.

Pendapatan Bukan Pajak mengalami peningkatan sebesar Rp26,36 triliun atau sebesar 4,06 persen dibandingkan dengan Tahun 2022, dengan komponen yang mengalami perubahan paling signifikan adalah Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) dengan jumlah peningkatan sebesar Rp43,64 triliun atau sebesar 84,70 persen, yang utamanya dipengaruhi oleh membaiknya kinerja Badan Usaha pada tahun buku 2023, perbaikan tersebut tercermin dari kenaikan setoran dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) perbankan dan nonperbankan. Namun, di sisi lain Pendapatan PNBP Lainnya mengalami penurunan sebesar Rp15,75 triliun atau sebesar 8,73 persen yang utamanya dipengaruhi menurunnya Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi pada pos Pendapatan PNBP Lainnya Pemerintah Pusat, serta Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada Pemerintah Daerah.



Grafik 9. Perbandingan Pendapatan dan Hibah Konsolidasian Tahun 2023 dan 2022

Pendapatan Hibah Konsolidasian Tahun 2023 sebesar Rp4,52 triliun atau 0,14 persen dari total Pendapatan dan Hibah Konsolidasian. Pendapatan Hibah Konsolidasian Tahun 2023 menurun sebesar Rp1,53 triliun atau 25,28 persen dibandingkan dengan Pendapatan Hibah Konsolidasian Tahun 2022.

Pendapatan Perpajakan Konsolidasian terdiri Pendapatan Perpajakan Pemerintah Pusat sebesar Rp2.154,21 triliun atau sebesar 87,82 persen dan Pajak Daerah sebesar Rp298,65 triliun atau sebesar 12,18 persen. Pada Pendapatan Bukan Pajak, berasal dari Pendapatan Bukan Pajak Pemerintah Pusat sebesar Rp612,54 triliun atau sebesar 85,33 persen, sedangkan pada Pemerintah Daerah sebesar Rp105,32 triliun atau 14,67 persen. Pada Pendapatan Hibah, 70,36 persen dari total Pendapatan Hibah adalah Pendapatan Hibah Pemerintah Pusat dengan nilai Rp17,18 triliun, sedangkan Pendapatan Hibah Pemerintah Daerah sebesar Rp7,24 triliun atau sebesar 29,64 persen.

URAIAN	Konsolidasi			
	2023 (Dalam Rupiah)	%	2022 (Dalam Rupiah)	%
A. Pendapatan dan Hibah				
I. Pendapatan Perpajakan	2.452.856.512.391.643	78,29%	2.273.382.941.187.980	77,63%
1. Pajak Dalam Negeri	2.388.366.577.927.230	76,24%	2.182.485.275.670.240	74,52%
2. Pajak Perdagangan Internasional	64.489.934.464.413	2,06%	90.897.665.517.741	3,10%
II. Pendapatan Bukan Pajak	675.494.892.669.374	21,56%	649.134.450.219.241	22,17%
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	254.203.031.073.614	8,11%	268.770.896.270.784	9,18%
2. Bagian Pemerintah atas Laba BUMN/D	95.159.123.295.559	3,04%	51.520.129.417.118	1,76%
3. Pendapatan Bukan Pajak Lainnya	164.683.671.087.337	5,26%	180.436.053.448.662	6,16%
4. Pendapatan BLU	161.449.067.212.864	5,15%	148.407.371.082.677	5,07%
III. Pendapatan Hibah	4.515.247.466.723	0,14%	6.043.160.721.895	0,21%
Jumlah Pendapatan dan Hibah	3.132.866.652.527.740	100,00%	2.928.560.552.129.120	100,00%

Tabel 4. Pendapatan Pemerintah Konsolidasian Tahun 2023 dan 2022



Grafik 10. Perbandingan Pendapatan dan Hibah Konsolidasian Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2023

B. 2. Belanja dan Transfer Konsolidasian

“Belanja dan Transfer Konsolidasian Tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp89,81 triliun dibandingkan dengan tahun sebelumnya.”

Belanja dan Transfer Konsolidasian Tahun 2023 sebesar Rp3.476,10 triliun, yang terdiri dari konsolidasi Belanja dan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp3.121,22 triliun dan Belanja dan Transfer Pemerintah Daerah sebesar Rp1.257,90 triliun setelah dikurangi dengan eliminasian sebesar Rp903,02 triliun.

Belanja dan Transfer Konsolidasian Tahun 2023 terdiri dari Belanja Pegawai Konsolidasian sebesar Rp818,58 triliun; Belanja Barang Konsolidasian Rp838,95 triliun; Belanja Modal Konsolidasian sebesar Rp526,61; Belanja Pembayaran Bunga Utang Konsolidasian Rp439,84 triliun; Belanja Subsidi Konsolidasian Rp281,24 triliun; Belanja Hibah Konsolidasian sebesar Rp52,56 triliun; Belanja Bantuan Sosial Konsolidasian Rp171,82 triliun; Belanja Lain-lain Konsolidasian sebesar Rp227,68 triliun; dan Transfer sebesar Rp118,81 triliun.



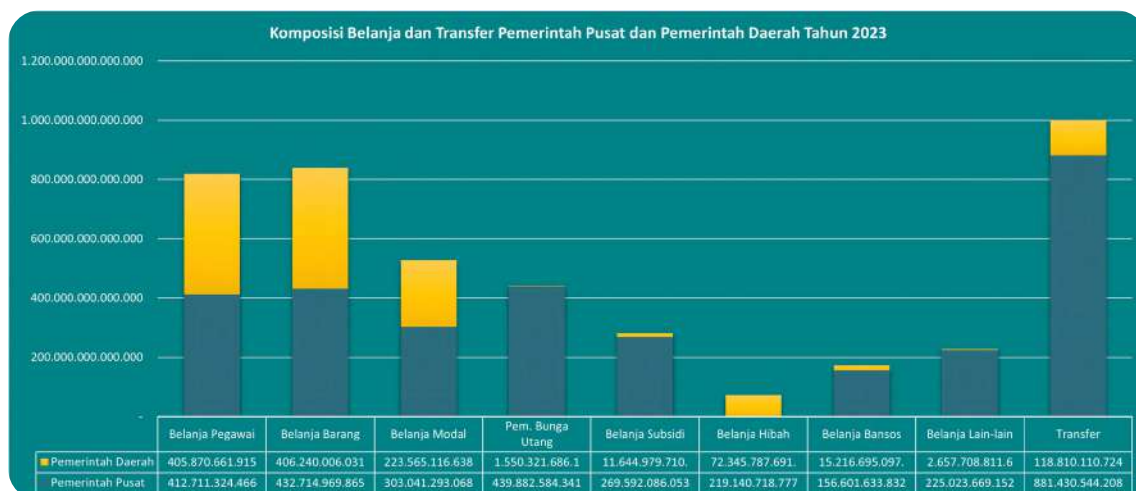
Grafik 11. Komposisi Belanja dan Transfer Konsolidasian Tahun 2023

Belanja dan Transfer Konsolidasian Tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp89,81 triliun dibandingkan dengan realisasi Belanja dan Transfer Konsolidasian tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp3.386,28 triliun. Terkecuali Bantuan Sosial dan Belanja Lain-lain, seluruh komponen pada Belanja dan Transfer Konsolidasian mengalami peningkatan dengan peningkatan paling signifikan adalah Belanja Modal Konsolidasian dan Belanja Bunga Utang.



Grafik 12. Perbandingan Belanja Konsolidasian Tahun 2023 dan 2022

Belanja Modal Konsolidasian meningkat sebesar Rp90,79 triliun, sedangkan Belanja Bunga Utang meningkat sebesar Rp52,43 triliun. Di sisi lain, Belanja Lain-lain Konsolidasian menurun sebesar Rp180,35 triliun



Grafik 13. Komposisi Belanja dan Transfer Konsolidasian Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2023

Belanja dan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp3.121,22 triliun berkontribusi 71,28 persen dari total Belanja dan Transfer Pemerintah Konsolidasian, sedangkan Belanja dan Transfer Pemerintah Daerah sebesar Rp1.257,90 triliun berkontribusi 28,72 persen. Komponen Belanja dan Transfer Pemerintah Pusat paling besar adalah Belanja

Transfer sebesar 28,24 persen yang diikuti Pembayaran Bunga Utang dengan kontribusi 14,09 persen. Sedangkan komponen Belanja dan Transfer Pemerintah Pusat paling kecil adalah Belanja Hibah sebesar 0,01 persen. Pada Pemerintah Daerah, komponen Belanja dan Transfer dengan persentase paling besar adalah Belanja Barang sebesar 32,30 persen diikuti Belanja Pegawai dengan persentase 32,27 persen.

Belanja Pemerintah	Konsolidasi			
	2023 (Dalam Rupiah)	%	2022 (Dalam Rupiah)	%
I. Belanja	3.357.285.697.973.890	96,58%	3.273.818.206.158.240	96,68%
1. Belanja Pegawai	818.581.986.381.907	23,55%	783.040.332.629.970	23,12%
2. Belanja Barang	838.954.975.896.851	24,13%	777.421.836.457.284	22,96%
3. Belanja Modal	526.606.409.707.162	15,15%	435.819.438.389.088	12,87%
4. Pembayaran Bunga Utang	439.844.004.881.574	12,65%	387.410.107.644.675	11,44%
5. Subsidi	281.237.065.764.156	8,09%	259.550.622.125.536	7,66%
6. Hibah	52.561.548.448.118	1,51%	48.866.740.913.195	1,44%
7. Bantuan Sosial	171.818.328.929.770	4,94%	173.676.459.522.319	5,13%
8. Belanja Lain-lain	227.681.377.964.353	6,55%	408.032.668.476.177	12,05%
II. Transfer	118.810.110.724.755	3,42%	112.465.483.709.173	3,32%
Total	3.476.095.808.698.650	100,00%	3.386.283.689.867.410	100,00%

Tabel 5. Belanja Pemerintah Konsolidasian Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2023 dan 2022

Dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Konsolidasian, Belanja Transfer Pemerintah Pusat yang berupa Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian dieliminasi dengan Pendapatan Transfer pada Pemerintah Daerah. Metode eliminasian yang digunakan mengacu kepada angka Belanja Transfer Pemerintah Pusat dikarenakan adanya perbedaan dengan angka Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah. Terhadap selisih yang muncul, maka dieliminasi kepada akun dalam skala resipokal.

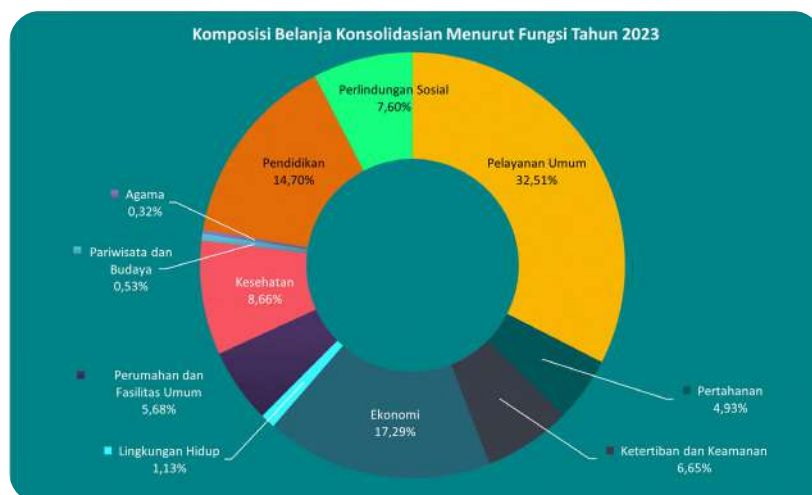
Sementara itu, Belanja Pemerintah dikelompokkan dalam 11 Fungsi yang menggambarkan aspek penyelenggaraan Pemerintah yakni (1) Fungsi Pelayanan Umum, (2) Fungsi Pertahanan, (3) Fungsi Ketertiban dan Keamanan, (4) Fungsi Ekonomi, (5) Fungsi Lingkungan Hidup, (6) Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum, (7) Fungsi Kesehatan, (8) Fungsi Pariwisata dan Budaya, (9) Fungsi Agama, (10) Fungsi Pendidikan, dan (11) Fungsi Kependudukan dan Perlindungan Sosial.

No	Fungsi	Pemerintah Pusat	Pemerintah Daerah	Konsolidasi	%
1	Pelayanan Umum	1.691.132.069.682.860	420.028.741.795.433	1.130.073.190.559.100	32,51%
2	Pertahanan	171.480.945.653.915	-	171.480.945.653.915	4,93%
3	Ketertiban dan Keamanan	193.328.711.800.125	37.897.594.714.367	231.226.306.514.492	6,65%
4	Ekonomi	485.426.343.115.602	115.447.486.786.880	600.873.829.902.481	17,29%
5	Lingkungan Hidup	13.512.930.632.428	25.607.595.101.627	39.120.525.734.055	1,13%
6	Perumahan dan Fasilitas Umum	38.073.614.458.681	159.438.505.175.364	197.512.119.634.045	5,68%
7	Kesehatan	98.406.400.213.918	202.758.953.360.166	301.165.353.574.084	8,66%
8	Pariwisata dan Budaya	4.539.557.508.276	13.981.402.889.590	18.520.960.397.866	0,53%
9	Agama	11.012.860.755.847	-	11.012.860.755.847	0,32%
10	Pendidikan	171.954.969.294.300	338.958.407.036.974	510.913.376.331.274	14,70%
11	Kependudukan dan Perlindungan Sosial	242.348.842.591.663	21.847.497.050.302	264.196.339.641.965	7,60%
Total		3.121.217.245.707.620	1.335.966.183.910.700	3.476.095.808.699.130	100,00%

Tabel 6. Belanja Pemerintah Konsolidasian Menurut Fungsi Tahun 2023

*) Total Realisasi Belanja Pemerintah Daerah menurut fungsi dihitung berdasarkan realisasi belanja per fungsi pada LKPD Tahun 2023

Selama Tahun 2023, tiga klasifikasi belanja menurut fungsi yang mendominasi Belanja Pemerintah Konsolidasian terdiri dari fungsi Pelayanan Umum yang mencapai 32,51 persen, selanjutnya diikuti oleh fungsi Ekonomi sebesar 17,29 persen dan fungsi Pendidikan sebesar 14,70 persen.



Grafik 14. Komposisi Belanja Konsolidasian Menurut Fungsi Tahun 2023

B. 3. Surplus dan Pembiayaan Pemerintah Konsolidasian

Pada Tahun 2023, Pemerintah Konsolidasian mengalami Defisit Konsolidasian sebesar Rp343,23 triliun yang merupakan implikasi dari lebih tingginya Belanja dan Transfer Pemerintah Konsolidasian dibandingkan dengan Pendapatan dan Hibah Konsolidasian. Defisit Konsolidasian pada Tahun 2023 mengalami perbaikan sebesar Rp114,49

"Pembiayaan Konsolidasian Tahun 2023 adalah Rp233,86 triliun."

triliun atau sebesar 25,01 persen jika dibandingkan dengan Defisit Konsolidasian pada Tahun 2022, yaitu sebesar Rp457,72 triliun. Defisit tersebut terdiri dari Defisit Pemerintah Pusat sebesar Rp337,29 triliun dan Defisit Pemerintah Daerah Konsolidasian sebesar Rp5,94 triliun.



Grafik 15. Komposisi Pembiayaan Konsolidasian Tahun 2023

Pembiayaan Konsolidasian Tahun 2023 adalah Rp461,82 triliun yang terdiri dari Pembiayaan Dalam Negeri Konsolidasian sebesar Rp382,24 triliun atau 82,77 persen dan Pembiayaan Luar Negeri Konsolidasian sebesar Rp79,58 triliun atau 17,23 persen.

Ditinjau dari subjek yang merealisasikan Pembiayaan Dalam Negeri, 72,51 persen dari jumlah Pembiayaan Dalam Negeri merupakan Pembiayaan Dalam Negeri yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat atau sebesar Rp277,37 triliun dan 27,49 persen oleh Pemerintah Daerah atau sebesar Rp105,15 triliun. Untuk Pembiayaan Luar Negeri 100 persen dari jumlah yang direalisasikan merupakan pembiayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

Pembiayaan Dalam Negeri Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp302,07 triliun atau sebesar 44,14 persen jika dibandingkan dengan periode Tahun 2022. Sedangkan Pembiayaan Luar Negeri meningkat sebesar Rp52,36 triliun atau sebesar 192,39 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama Tahun 2022. Peningkatan tersebut utamanya disebabkan peningkatan Penarikan Pinjaman Luar Negeri yang meningkat sebesar Rp54,37 triliun atau sebesar 50,21 persen.



Grafik 16. Perbandingan Pembiayaan Konsolidasian Tahun 2023

SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih atau selisih kurang setelah pembiayaan atau selisih seluruh penerimaan anggaran dengan pengeluaran anggaran. Secara umum, SiLPA menimbulkan saldo lebih bagi Pemerintah yang dapat digunakan untuk pengeluaran pada periode anggaran berikutnya. Penambahan SiLPA tahun anggaran berjalan dengan saldo SiLPA tahun sebelumnya menghasilkan Sisa Anggaran Lebih (SAL) Pemerintah. SiKPA yakni selisih kurang menunjukkan ketidakmampuan Pemerintah dalam membiayai kekurangan anggaran.

Pada Tahun 2023, meskipun terjadi Surplus Anggaran, namun pembiayaan bernilai positif, sehingga menghasilkan SiLPA konsolidasian sebesar Rp118,59 triliun yang terdiri dari SiLPA realisasi APBN sebesar Rp19,38 triliun dan SiLPA realisasi APBD sebesar Rp99,21 triliun. SiLPA Konsolidasian Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp135,21 triliun atau sebesar 53,27 persen dibandingkan dengan SiLPA konsolidasian Tahun 2022 sebesar Rp253,80 triliun.

Halaman ini sengaja dikosongkan

C. CATATAN ATAS POS-POS NERACA PEMERINTAH KONSOLIDASIAN TAHUN 2023

Neraca Pemerintah Konsolidasian per 31 Desember 2023 meliputi Aset Konsolidasian sebesar Rp16.315,41 triliun, Kewajiban Konsolidasian sebesar Rp9.431,95 triliun, dan Ekuitas Konsolidasian sebesar Rp6.883,46 triliun. Pada 31 Desember 2023, Aset Konsolidasian mengalami peningkatan sebesar Rp840,95 triliun atau 5,43 persen dibandingkan dengan 31 Desember 2022. Selanjutnya, Kewajiban Konsolidasian per 31 Desember 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp554,61 triliun atau 6,25 persen dibandingkan tahun 2022, sehingga Ekuitas (kekayaan bersih) pemerintah konsolidasian per 31 Desember 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp286,34 triliun atau 4,34 persen terhadap tahun 2022.



Grafik 17. Neraca Pemerintah Konsolidasian Tahun 2023 dan 2022

C. 1. Aset Konsolidasian

"Aset Konsolidasian Tahun 2023 didominasi oleh Aset Tetap sebesar 59,93 persen dan Investasi Jangka Panjang sebesar 26,58 persen."

Aset Konsolidasian per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp16.315,41 triliun. Aset Konsolidasian terdiri dari Aset Lancar, Aset Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Aset Properti Investasi, Aset Piutang Jangka Panjang, dan Aset Lainnya. Komposisi Aset Konsolidasian didominasi oleh Aset Tetap Konsolidasian, yaitu sebesar Rp9.777,94 triliun atau 59,93 persen dari Total Aset Konsolidasian. Aset Konsolidasian terbesar selanjutnya adalah Investasi Jangka Panjang Konsolidasian sebesar Rp4.336,80 triliun, Aset Lainnya Konsolidasian sebesar Rp1.100,58 triliun, Aset Lancar Konsolidasian sebesar Rp992,10 triliun, Properti Investasi sebesar Rp104,37 triliun, dan Piutang Jangka Panjang sebesar Rp3,62 triliun.



Grafik 18. Komposisi Aset Konsolidasian Tahun 2023

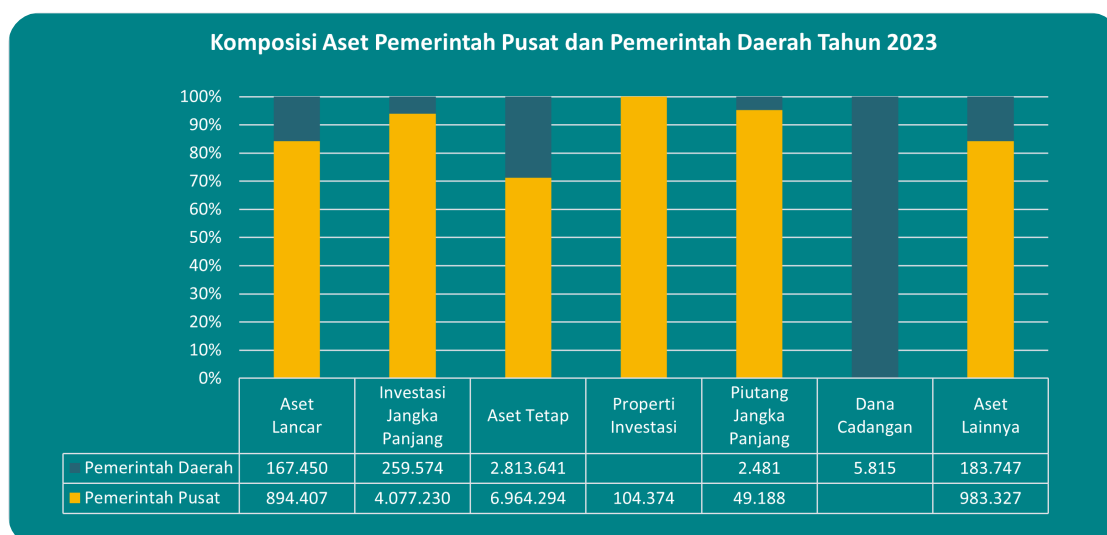
Jumlah Aset Konsolidasian mengalami peningkatan sebesar Rp840,95 triliun atau sebesar 5,43 persen jika dibandingkan dengan periode 31 Desember 2022. Komponen Aset Konsolidasian yang mengalami perubahan paling besar adalah Aset Tetap dengan peningkatan sebesar Rp371,02 triliun atau sebesar 3,94 persen, yang diikuti Investasi Jangka Panjang sebesar Rp341,77 triliun atau sebesar 8,55 persen. Lebih lanjut perbandingan perubahan struktur Aset Konsolidasian per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Grafik 19. Perbandingan Aset Konsolidasian Tahun 2023 dan 2022

Dilihat dari sisi neraca Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sebagian besar aset konsolidasian dimiliki oleh Pemerintah Pusat. Pada Tahun 2023, aset Pemerintah Pusat adalah sebesar Rp13.072,82 triliun atau 79,23 persen, sedangkan aset Pemerintah Daerah adalah sebesar Rp3.426,89 atau 20,77 persen.

Jumlah komponen aset paling besar pada Pemerintah Pusat dan Daerah adalah Aset Tetap, dengan persentase 53,27 persen dari Total Aset Pemerintah Pusat, sedangkan pada Pemerintah Daerah sebesar 82,10 persen dari total aset.



Grafik 20. Komposisi Aset Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2023

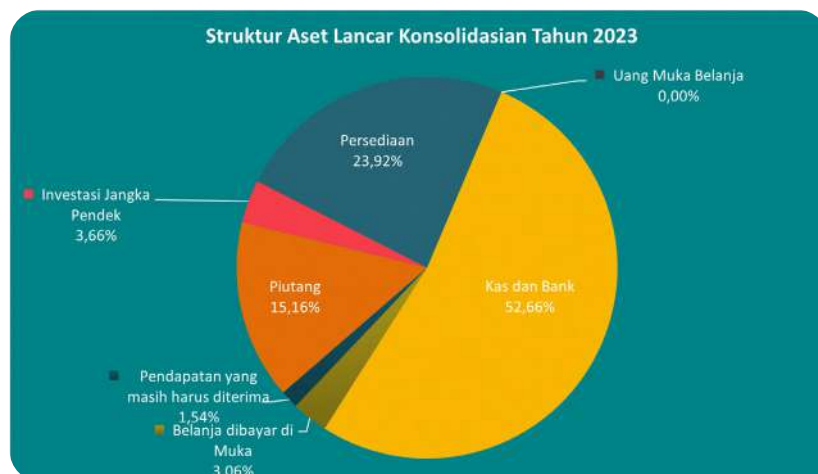
C. 1.1. Aset Lancar Konsolidasian

“Aset Lancar Konsolidasian Tahun 2023 didominasi oleh Kas dan Bank sebesar 52,66 persen dan Persediaan sebesar 23,92 persen.”

Aset lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar terdiri dari antara lain Kas di Kas Negara dan Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas Lainnya dan Setara Kas, Kas pada BLU, Uang Muka dari Rekening BUN, Piutang Pajak, Piutang Bukan Pajak, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi dan Tuntutan Perbendaharaan, Uang Muka Belanja, Piutang dari Kegiatan BLU, Piutang Lain-lain, Bagian Lancar Pemberian Pinjaman, Pendapatan Yang Masih Harus Diterima, Piutang Lancar Kredit Pemerintah & Piutang Jangka Pendek Lainnya, Penyisihan Piutang Tak Tertagih, Investasi Jangka Pendek, dan Persediaan.

Jumlah Aset Lancar Konsolidasian per 31 Desember 2023 sebesar Rp992,10 triliun, yang terdiri dari Kas dan Bank Konsolidasian sebesar Rp522,40 triliun, Belanja dibayar Di Muka dan Uang Muka Belanja sebesar Rp30,36 triliun, Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp15,27 triliun, Piutang Konsolidasian sebesar Rp150,40 triliun, Investasi Jangka Pendek Konsolidasian sebesar Rp36,35 triliun, dan Persediaan Konsolidasian sebesar Rp237,31 triliun.

Aset Lancar Konsolidasian per 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar Rp24,81 triliun atau 2,44 persen dibandingkan Aset Lancar Konsolidasian per 31 Desember 2022.

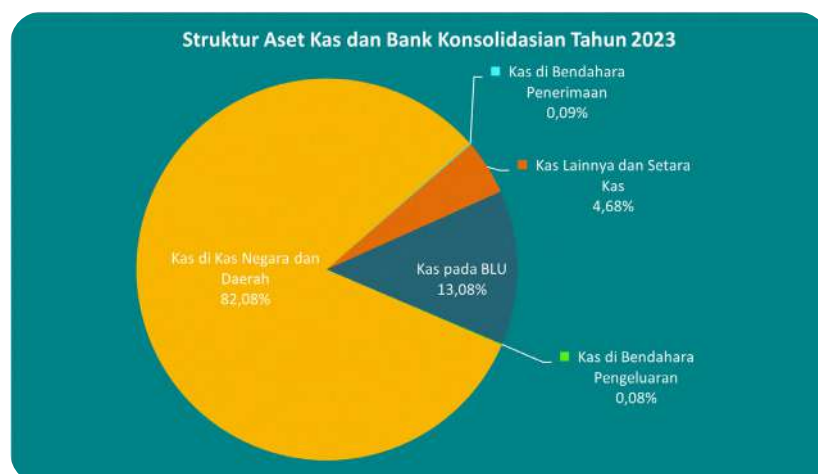


Grafik 21. Struktur Aset Lancar Konsolidasian Tahun 2023

Kas dan Bank Konsolidasian terdiri dari Kas di Kas Negara dan Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas Lainnya dan Setara Kas, dan Kas di Badan Layanan Umum (BLU). Jumlah Kas dan Bank Konsolidasian per 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar Rp61,66 triliun atau sebesar 10,56 persen dibandingkan dengan jumlah Kas dan Bank Konsolidasian per 31 Desember 2022. Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas Lainnya dan Setara Kas pada Kas dan Bank mengalami peningkatan sebesar Rp353,27 miliar dan Rp17,11 triliun, sedangkan Kas di Kas Negara dan Kas Daerah pada Kas dan Bank mengalami penurunan sebesar Rp78,30 triliun.

Jumlah Kas dan Bank didominasi oleh Kas di Kas Negara dan Kas Daerah sebesar 82,08 persen dari total seluruh jumlah Kas dan Bank, selanjutnya Kas pada BLU sebesar 13,08 persen, diikuti Kas Lainnya dan Setara Kas, Kas di Bendahara Pengeluaran, dan Kas di Bendahara Penerimaan.

Struktur Kas dan Bank Konsolidasian per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:



Grafik 22. Struktur Aset Kas dan Bank Konsolidasian Tahun 2023

Belanja dibayar di Muka dan Uang Muka Belanja Konsolidasian per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp30,36 triliun merupakan uang muka dan/atau pembayaran termin yang telah diterima oleh kontraktor atau pihak ketiga atas pekerjaannya dalam rangka penyediaan barang/jasa. Belanja dibayar di Muka dan Uang Muka Belanja Konsolidasian per 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar Rp21,62 triliun atau 41,59 persen dari Belanja dibayar di Muka dan Uang Muka Belanja Konsolidasian per 31 Desember 2022. Penurunan Belanja dibayar di Muka dan Uang Muka Belanja Konsolidasian tersebut berasal dari menurunnya Uang Muka Belanja pada Kementerian Negara / Lembaga (K/L). Pendapatan yang Masih Harus Diterima Konsolidasian per 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp15,27 triliun. Pendapatan yang masih harus diterima 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar Rp2,29 triliun atau 13,06 persen dibandingkan posisi 31 Desember 2022.

Piutang Konsolidasian per 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp150,40 triliun, mengalami peningkatan sebesar Rp35,10 triliun atau 30,44 persen dibandingkan dengan Piutang Konsolidasian per 31 Desember 2022.

Investasi Jangka Pendek Konsolidasian per 31 Desember 2023 sebesar Rp36,35 triliun, yang merupakan konsolidasi Investasi dalam Deposito Konsolidasian sebesar Rp765,12 miliar, Investasi Jangka Pendek BLU sebesar Rp35,58 triliun, dan Investasi Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp8,07. Investasi Jangka Pendek Konsolidasian per 31 Desember 2023 naik sebesar Rp9,78 triliun atau 36,82 persen dibandingkan dengan Investasi Jangka Pendek Konsolidasian per 31 Desember 2022.

Persediaan Konsolidasian per 31 Desember 2023 sebesar Rp237,31 triliun, merupakan konsolidasi Persediaan pada Neraca Pemerintah Pusat sebesar Rp204,18 triliun dan Persediaan pada Neraca Pemerintah Daerah Konsolidasian sebesar Rp33,13 triliun. Persediaan Konsolidasian per 31 Desember 2023 meningkat sebesar Rp15,89 triliun atau 7,18 persen jika dibandingkan dengan Persediaan Konsolidasian per 31 Desember 2022.

C. 1.2. Investasi Jangka Panjang Konsolidasian

Investasi jangka panjang adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat yang dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi Jangka Panjang terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen.

Investasi Jangka Panjang Konsolidasian per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.336,80 triliun yang terdiri dari Investasi Non Permanen Konsolidasian sebesar Rp298,96 triliun dan Investasi Permanen Konsolidasian sebesar Rp4.037,85 triliun.

"Investasi Jangka Panjang Konsolidasian Tahun 2023 meningkat sebesar 8,55 persen dibandingkan tahun sebelumnya."

Investasi Non Permanen Konsolidasian meningkat Rp44,87 triliun atau sebesar 17,66 persen dibandingkan 31 Desember 2022. Investasi Non Permanen Konsolidasian terdiri dari Dana Bergulir Konsolidasian sebesar Rp19,16 triliun, Pinjaman kepada BUMN/D dan Pemda Lainnya Konsolidasian sebesar Rp98,78 miliar, dan Investasi Non Permanen Lainnya Konsolidasian sebesar Rp279,69 triliun.

Investasi Permanen Konsolidasian per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.037,85 triliun terdiri dari Investasi Permanen PMN/D Konsolidasian sebesar Rp3.350,82 triliun, Investasi Permanen BLU Konsolidasian sebesar Rp8,05 miliar, dan Investasi Permanen Lainnya Konsolidasian sebesar Rp687,02 triliun.

C. 1.3. Aset Tetap Konsolidasian

Aset Tetap meliputi Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi dalam Pengerjaan serta Akumulasi Penyusutan.



Grafik 23. Struktur Aset Tetap Konsolidasian Tahun 2023

"Kontruksi Dalam Pengerjaan merupakan komponen Aset Tetap Konsolidasian yang mengalami peningkatan paling signifikan pada Tahun 2023, yakni sebesar 37,91persen."

Aset Tetap Konsolidasian per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp9.777,94 triliun. Nilai Aset Tetap Konsolidasian per 31 Desember 2023 naik sebesar Rp371,02 triliun atau 3,94 persen dibandingkan dengan nilai Aset Tetap Konsolidasian per 31 Desember 2022.

- Tanah Konsolidasian per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.739,41 triliun, merupakan konsolidasi Tanah pada Neraca Pemerintah Pusat sebesar Rp4.428,28, triliun dan Tanah pada Neraca Pemerintah Daerah Konsolidasian sebesar Rp1.311,13 triliun. Tanah Konsolidasian per 31 Desember 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp91,90 triliun atau 1,63 persen dibandingkan dengan Tanah Konsolidasian per 31 Desember 2022.
- Peralatan dan Mesin Konsolidasian per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.444,81 triliun merupakan konsolidasi Peralatan dan Mesin pada Neraca Pemerintah Pusat sebesar Rp933,68 triliun dan Peralatan

- dan Mesin pada Neraca Pemerintah Daerah Konsolidasian sebesar Rp511,13 triliun. Peralatan dan Mesin Konsolidasian per 31 Desember 2023 naik sebesar Rp115,61 triliun atau 8,70 persen dibandingkan dengan Peralatan dan Mesin Konsolidasian per 31 Desember 2022.
- c. Gedung dan Bangunan Konsolidasian per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.320,58 triliun, merupakan konsolidasi Gedung dan Bangunan pada Neraca Pemerintah Pusat sebesar Rp474,21 triliun dan Gedung dan Bangunan pada Neraca Pemerintah Daerah Konsolidasian sebesar Rp846,36 triliun. Gedung dan Bangunan Konsolidasian per 31 Desember 2023 naik sebesar Rp63,47 triliun atau 5,05 persen dibandingkan dengan Gedung dan Bangunan Konsolidasian per 31 Desember 2022.
 - d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan Konsolidasian per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.669,11 triliun, merupakan konsolidasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Neraca Pemerintah Pusat sebesar Rp1.138,24 triliun dan Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Neraca Pemerintah Daerah Konsolidasian sebesar Rp1.530,88 triliun. Jalan, Irigasi dan Jaringan Konsolidasian per 31 Desember 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp159,93 triliun atau 6,37 persen dibandingkan dengan Jalan, Irigasi dan Jaringan Konsolidasian per 31 Desember 2022.
 - e. Aset Tetap Lainnya Konsolidasian per 31 Desember 2023 sebesar Rp108,76 triliun, merupakan konsolidasi Aset Tetap Lainnya pada Neraca Pemerintah Pusat sebesar Rp54,93 triliun dan Aset Tetap Lainnya pada Neraca Pemerintah Daerah Konsolidasian sebesar Rp53,82 triliun. Aset Tetap Lainnya Konsolidasian per 31 Desember 2023 meningkat sebesar Rp75,31 miliar atau 0,07 persen dibandingkan dengan Aset Tetap Lainnya Konsolidasian per 31 Desember 2022.
 - f. Konstruksi Dalam Pengerjaan Konsolidasian per 31 Desember 2023 sebesar Rp308,43 triliun merupakan konsolidasi Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Neraca Pemerintah Pusat sebesar Rp246,57 triliun dan Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Neraca Pemerintah Daerah Konsolidasian sebesar Rp65,87 triliun. Konstruksi Dalam Pengerjaan Konsolidasian per 31 Desember 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp84,78 triliun atau 37,91 persen dibandingkan dengan Konstruksi Dalam Pengerjaan Konsolidasian per 31 Desember 2022.
 - g. Akumulasi Penyusutan Konsolidasian per 31 Desember 2023 sebesar minus Rp2.821,03 triliun, merupakan gabungan Akumulasi Penyusutan pada Neraca Konsolidasian Pemerintah Pusat sebesar minus Rp1.319,49 triliun dan Akumulasi Penyusutan pada Neraca Pemerintah Daerah sebesar minus Rp1.501,55 triliun. Akumulasi Penyusutan Konsolidasian per 31 Desember 2023 naik sebesar Rp258,85 triliun atau 10,10 persen dibandingkan dengan Akumulasi Penyusutan Konsolidasian per 31 Desember 2022.

- h. Konsesi Jasa Konsolidasian per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.088,21, merupakan aset Konsesi Jasa pada Pemerintah Pusat. Aset Konsesi Jasa pada Tahun 2023 meningkat sebesar Rp137,11 triliun atau sebesar 14,42 persen jika dibandingkan dengan Konsesi Jasa per 31 Desember 2022.
- i. Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa per 31 Desember 2023 sebesar minus Rp80,34 triliun, nilai ini meningkat sebesar Rp23,00 triliun atau 40,12 persen dibandingkan dengan periode 31 Desember 2022.

C. 1.4. Properti Investasi

Properti Investasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp104,37 triliun. Aset Properti Investasi terdiri dari Properti Investasi sebesar Rp160,51 triliun dan Akumulasi Penyusutan Properti Investasi sebesar minus Rp56,13 triliun. Nilai Properti Investasi pada Tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp65,17 triliun atau 166,27 persen dibandingkan dengan Properti Investasi Konsolidasian per 31 Desember 2022. Peningkatan yang cukup signifikan tersebut merupakan nilai Properti Investasi pada Otorita Ibukota Nusantara berupa Aset Dalam Penguasaan (ADP) yang sudah dilakukan penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).

C. 1.5. Piutang Jangka Panjang Konsolidasian

Piutang Jangka Panjang Konsolidasian per 31 Desember 2023 sebesar Rp3,62 triliun. Piutang Jangka Panjang Konsolidasian terdiri dari antara lain Tagihan Penjualan Angsuran Konsolidasian sebesar Rp806,84 miliar, Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Konsolidasian sebesar Rp2,06 triliun, Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman sebesar Rp596,25 miliar, Piutang Jangka Panjang Lainnya Konsolidasian sebesar Rp4,58 triliun, dan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Konsolidasian sebesar minus Rp4,42 triliun.

Piutang Jangka Panjang Konsolidasian Tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 17,66 persen atau sebesar Rp543,38 miliar dibandingkan dengan periode 31 Desember 2022. Sebagian besar komponen Piutang Jangka Panjang Konsolidasian mengalami penurunan dibanding dengan periode 31 Desember 2022, hanya komponen Tagihan Penjualan Angsuran yang mengalami peningkatan, yaitu sebesar Rp524,69 miliar atau sebesar 185,96 persen.

C. 1.6. Aset Lainnya Konsolidasian

Aset Lainnya Konsolidasian per 31 Desember 2023 adalah sebesar

Rp1.100,58 triliun. Aset Lainnya Konsolidasian terdiri dari antara lain Kemitraan dengan Pihak Ketiga Konsolidasian, Dana Jangka Panjang, Aset Tak Berwujud Konsolidasian, Dana yang Dibatasi Penggunaannya Konsolidasian, Dana Cadangan, Dana Kelolaan BLU Konsolidasian, Dana Penjaminan Konsolidasian, Aset Lain-lain Konsolidasian, Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya Konsolidasian dan Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Konsolidasian.

"Aset Lainnya Konsolidasian Tahun 2023 meningkat sebesar 8,61 persen dibandingkan Tahun 2022"

- a. Kemitraan dengan Pihak Ketiga Konsolidasian per 31 Desember 2023 sebesar Rp68,55 triliun, merupakan konsolidasi Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Neraca Pemerintah Pusat sebesar Rp49,88 triliun dan Kemitraan dengan Pihak ketiga pada Neraca Pemerintah Daerah Konsolidasian sebesar Rp18,68 triliun. Kemitraan dengan Pihak Ketiga Konsolidasian per 31 Desember 2023 turun sebesar Rp11,44 triliun atau 14,30 persen dibandingkan dengan Kemitraan dengan Pihak Ketiga Konsolidasian per 31 Desember 2022.
- b. Aset Tak Berwujud Konsolidasian per 31 Desember 2023 sebesar Rp81,65 triliun, yang merupakan konsolidasi Aset Tak Berwujud pada Neraca Pemerintah Pusat sebesar Rp72,41 triliun dan Aset Tak Berwujud pada Neraca Pemerintah Daerah Konsolidasian sebesar Rp9,24 triliun. Aset Tak Berwujud Konsolidasian per 31 Desember 2023 naik sebesar Rp10,83 triliun atau 15,30 persen dibandingkan dengan Aset Tak Berwujud Konsolidasian per 31 Desember 2022.
- c. Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Neraca Pemerintah Pusat. Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp384,69 triliun atau naik sebesar Rp59,75 triliun atau 18,39 persen dari saldo per 31 Desember 2022. Dana yang Dibatasi Penggunaannya dieliminasi nilai sebesar Dana di Rekening *Treasury Deposit Facility*-Transfer Keuangan Daerah.
- d. Dana Kelolaan BLU per 31 Desember 2023 sebesar Rp52,06 triliun hanya terdapat pada Neraca Pemerintah Pusat. Dana Kelolaan BLU per 31 Desember 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp467,71 triliun atau 403,50 persen dari Dana Kelolaan BLU per 31 Desember 2022. Dana Kelolaan BLU merupakan dana yang masih berupa kas yang belum disalurkan/diinvestasikan oleh BLU kepada pihak ketiga. Nilai Dana Kelolaan BLU pada Pemerintah Pusat merupakan gabungan dari Dana Kelolaan BLU dan Dana Jangka Panjang yang merupakan dana hasil akumulasi dari pembiayaan beserta hasil pengelolaannya untuk pendanaan pengadaan proyek strategis nasional yang dikelola oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN)
- e. Dana Penjaminan per 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp12,83 triliun merupakan dana penjaminan yang berada pada Neraca Pemerintah Pusat. Dana Penjaminan per 31 Desember 2023

mengalami peningkatan sebesar Rp379,98 miliar atau 3,05 persen dibandingkan Dana Penjaminan per 31 Desember 2022.

- f. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana Cadangan Konsolidasian per 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp5,82 triliun, yang merupakan Dana Cadangan pada Neraca Pemerintah Daerah Konsolidasian. Dana Cadangan Konsolidasian per 31 Desember 2023 naik sebesar Rp789,38 miliar atau 15,71 persen dibandingkan dengan Dana Cadangan Konsolidasian per 31 Desember 2022.
- g. Aset Lain-lain Konsolidasian per 31 Desember 2023 sebesar Rp853,03 triliun merupakan konsolidasi Aset Lain-lain pada Neraca Pemerintah Pusat sebesar Rp696,20 triliun termasuk di dalamnya aset KKKS dan aset eks BPPN yang pada tahun 2017 diklasifikasikan secara terpisah dan Aset Lain-lain pada Neraca Pemerintah Daerah Konsolidasian sebesar Rp156,83 triliun. Aset Lain-lain Konsolidasian per 31 Desember 2023 naik sebesar Rp45,19 triliun atau 5,59 persen dibandingkan dengan Aset Lain-lain Konsolidasian per 31 Desember 2022.
- h. Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya merupakan Ekuitas pada Unit Badan Lainnya per 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp29,85 triliun dan hanya berada pada Neraca Pemerintah Pusat. Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya meningkat sebesar 0,77 persen dibandingkan dengan Tahun 2022. Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya paling besar berasal dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), selanjutnya berasal dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Badan Wakaf Indonesia, Otorita Asahan, Yayasan Harapan Kita / Badan Pengelola dan Pengembangan Taman Mini Indonesia Indah (YHK/BPP TMII), dan Yayasan Gedung Veteran.
- i. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Konsolidasian per 31 Desember 2023 adalah sebesar minus Rp44,82 triliun. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Konsolidasian per 31 Desember 2023 tersebut terdiri dari Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud pada Neraca Pemerintah Pusat sebesar minus Rp38,01 triliun dan pada Neraca Pemerintah Daerah Konsolidasian sebesar minus Rp6,81 triliun. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Konsolidasian per 31 Desember 2023 naik sebesar Rp6,47 triliun atau 16,87 persen dibandingkan dengan Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Konsolidasian per 31 Desember 2022.
- j. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Konsolidasian per 31 Desember 2023 sebesar minus Rp343,08 triliun. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Konsolidasian per 31 Desember 2023 meningkat sebesar minus Rp24,95 triliun atau 7,84 persen dibandingkan dengan

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Konsolidasian per 31 Desember 2022.

C. 2. Kewajiban Konsolidasian

Kewajiban Konsolidasian per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp9.431,95 triliun dan Rp8.877,34 triliun. Kewajiban Konsolidasian per 31 Desember 2023 terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek Konsolidasian sebesar Rp1.003,17 triliun dan Kewajiban Jangka Panjang Konsolidasian sebesar Rp8.428,95 triliun.



Grafik 24. Struktur Kewajiban Konsolidasian Tahun 2023

Dilihat dari sisi kepemilikan, Kewajiban Konsolidasian sebagian besar dimiliki oleh Pemerintah Pusat dibandingkan dengan Pemerintah Daerah. Pada Tahun 2023, Kewajiban Pemerintah Pusat sebelum dieliminasi dengan akun resiprokal adalah sebesar Rp9.536,68 triliun atau 99,17 persen, sedangkan Kewajiban Pemerintah Daerah sebesar Rp79,58 triliun atau 0,83 persen. Persentase nilai kewajiban Pemerintah Pusat didominasi oleh pos Utang Jangka Panjang Dalam Negeri sebesar Rp6.969,12 triliun.

C. 2.1. Kewajiban Jangka Pendek Konsolidasian

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Pendek Konsolidasian terdiri dari Utang Perhitungan Pihak Ketiga Konsolidasian, Utang kepada Pihak Ketiga Konsolidasian, Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Konsolidasian, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya (terdiri dari Bagian Lancar Utang ke Perbankan Konsolidasian, Bagian Lancar Utang ke LKBB Konsolidasian dan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Konsolidasian), Utang Biaya Pinjaman Konsolidasian, Utang Subsidi Konsolidasian, Utang Surat Berharga Negara, Pendapatan Diterima Dimuka Konsolidasian, Pendapatan yang Ditangguhkan dan Utang Jangka Pendek Lainnya Konsolidasian. Kewajiban Jangka Pendek Konsolidasian per 31 Desember

"Kewajiban Jangka Pendek Konsolidasian Tahun 2023 terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Pusat sebesar 95,86 persen dan Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Daerah sebesar 4,14 persen."

2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp1.003,17 triliun dan Rp862,11 triliun terdiri dari:

- a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Konsolidasian per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp5,11 triliun, yang merupakan konsolidasi Utang PFK pada Neraca Pemerintah Pusat sebesar Rp4,54 triliun dan Utang PFK pada Neraca Pemerintah Daerah Konsolidasian sebesar Rp575,42 miliar. Utang PFK Konsolidasian per 31 Desember 2023 meningkat sebesar Rp725,76 miliar atau 16,55 persen dibandingkan dengan Utang PFK Konsolidasian per 31 Desember 2022.
- b. Utang kepada Pihak Ketiga Konsolidasian per 31 Desember 2023 sebesar Rp125,10 triliun, yang terdiri dari Utang kepada Pihak Ketiga Pemerintah Pusat sebesar Rp191,81 triliun dan dikurangi eliminasian resiprokal sebesar Rp66,71 miliar. Utang kepada Pihak Ketiga Konsolidasian per 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar Rp6,49 triliun atau 4,93 persen dibandingkan Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022.
- c. Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per 31 Desember 2023 sebesar Rp27,97 triliun merupakan kewajiban Pemerintah atas kelebihan pembayaran pendapatan yang diterima dari penyeter namun sampai dengan tahun anggaran berakhir belum dibayar oleh Pemerintah. Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per 31 Desember 2023 naik sebesar Rp17,63 triliun atau 170,66 persen dibandingkan Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per 31 Desember 2022. Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan hanya terdapat pada Neraca Pemerintah Pusat. Komponen Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dengan kenaikan paling signifikan adalah pengembalian kelebihan pembayaran pendapatan perpajakan pada Kementerian Keuangan.
- d. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya Konsolidasian per 31 Desember 2023 sebesar Rp632,09 triliun, merupakan konsolidasi Bagian Lancar Utang Jangka Panjang pada Neraca Pemerintah Pusat sebesar Rp639,02 triliun dengan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya pada Pemerintah Daerah sebesar Rp6,69 triliun pada Neraca Pemerintah Daerah Konsolidasian setelah dikurangi dengan akun resiprokal Bagian Lancar Piutang Penerusan Pinjaman sebesar Rp13,62 triliun. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang lainnya Konsolidasian per 31 Desember 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp114,44 triliun atau 22,11 persen dibandingkan dengan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Konsolidasian per 31 Desember 2022.
- e. Utang Biaya Pinjaman Konsolidasian per 31 Desember 2023 sebesar Rp109,331 triliun merupakan konsolidasi Utang Biaya Pinjaman pada Neraca Pemerintah Pusat sebesar Rp112,69 triliun dan Utang

Bunga pada Neraca Pemerintah Daerah Konsolidasian sebesar Rp354,25 miliar serta dikurangi dengan akun resiprokal Utang Bunga sebesar Rp3,74 triliun. Utang Biaya Pinjaman Konsolidasian per 31 Desember 2023 naik sebesar Rp15,16 triliun atau 16,10 persen dibandingkan dengan Utang Biaya Pinjaman Konsolidasian per 31 Desember 2022.

- f. Utang Subsidi Konsolidasian per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp25,21 triliun mengalami kenaikan sebesar Rp9,97 triliun atau 65,48 persen dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2022.
- g. Utang Belanja Konsolidasian per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp27,93 triliun. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp9,73 triliun atau 53,51 persen dibandingkan dengan periode 31 Desember 2022.
- h. Utang Surat Berharga Negara (SBN) Konsolidasian per 31 Desember 2023 sebesar Rp30,94 triliun, merupakan instrumen utang jangka pendek yang diterbitkan dengan diskonto yang akan jatuh tempo kurang dari satu tahun. Utang Surat Berharga Negara (SBN) Konsolidasian per 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar Rp17,54 triliun atau 36,17 persen dibandingkan pada Utang Subsidi Konsolidasian per 31 Desember 2022.
- i. Pendapatan Yang Ditangguhkan Konsolidasian per 31 Desember 2023 sebesar Rp403,62 miliar. Pendapatan Yang Ditangguhkan Konsolidasian per 31 Desember 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp399,56 miliar atau 9.850,73 persen dibandingkan saldo per 31 Desember 2022. Nilai Pendapatan yang Ditangguhkan terdiri dari Pendapatan Migas yang Ditangguhkan berupa saldo penerimaan yang masih tersedia di Rekening Migas per tanggal pelaporan, yang masih belum jelas peruntukannya dan memerlukan klarifikasi lebih lanjut.
- j. Pendapatan Diterima di Muka Konsolidasian per 31 Desember 2023 sebesar Rp9,60 triliun. Nilai tersebut menurun sebesar Rp2,39 triliun atau sebesar 19,94 persen jika dibandingkan periode tahun 2022.
- k. Utang Jangka Pendek Lainnya Konsolidasian per 31 Desember 2023 sebesar Rp9,51 triliun, merupakan konsolidasi Utang Jangka Pendek Lainnya pada Neraca Pemerintah Pusat sebesar Rp52,19 miliar dan Utang Jangka Pendek Lainnya pada Neraca Pemerintah Daerah Konsolidasian sebesar Rp9,50 triliun serta dikurangi akun resiprokal sebesar Rp52,19 triliun. Utang Jangka Pendek Lainnya Konsolidasian per 31 Desember 2023 turun sebesar Rp590,71 miliar atau 5,85 persen dibandingkan dengan Utang Jangka Pendek Lainnya Konsolidasian per 31 Desember 2022.

C. 2.2. Kewajiban Jangka Panjang Konsolidasian



Grafik 25. Struktur Kewajiban Jangka Panjang Konsolidasian Tahun 2023

Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Panjang Konsolidasian per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp8.428,78 triliun dan Rp8.015,23 triliun. Kewajiban Jangka Panjang Konsolidasian per 31 Desember 2023 naik sebesar Rp413,55 triliun atau 5,16 persen dibandingkan Kewajiban Jangka Panjang Konsolidasian per 31 Desember 2022.

Kewajiban Jangka Panjang Konsolidasian per 31 Desember 2023 terdiri dari Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Konsolidasian sebesar Rp6.953,48 triliun, Utang Jangka Panjang Luar Negeri Konsolidasian sebesar Rp886,30 triliun, dan Kewajiban Konsesi Jasa sebesar Rp589,00 triliun.

Kewajiban Jangka Panjang Dalam Negeri Konsolidasian per 31 Desember 2023 meningkat sebesar Rp265,18 triliun atau 3,96 persen dibandingkan Kewajiban Jangka Panjang Dalam Negeri Konsolidasian per 31 Desember 2022. Berdasarkan grafik di atas, terlihat bahwa 82,50 persen dari Kewajiban Jangka Panjang Konsolidasian merupakan Kewajiban Jangka Panjang Dalam Negeri.

Kewajiban Jangka Panjang Dalam Negeri Konsolidasian terdiri dari:

- a. Kewajiban Jangka Panjang Dalam Negeri Non Perbankan (SBN) yang terdiri dari Kewajiban Jangka Panjang Dalam Negeri Pemerintah Pusat sebesar Rp6.969,12 triliun dan Kewajiban Jangka Panjang Dalam Negeri Pemerintah Daerah Konsolidasian sebesar Rp30,13 triliun dengan eliminasi akun resiprokal berupa Kewajiban Jangka Panjang Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp48,05 triliun. Kewajiban Jangka Panjang Dalam Negeri Non Perbankan (SBN) per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp266,80 triliun atau 3,99 persen atas Kewajiban Jangka Panjang Dalam Negeri Non Perbankan (SBN) per 31 Desember 2022.

- b. Kewajiban Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya Konsolidasian per 31 Desember 2023 sebesar Rp2,28 triliun merupakan konsolidasi Kewajiban Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya pada Neraca Pemerintah Daerah Konsolidasian. Kewajiban Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya Konsolidasian per 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar Rp1,62 triliun atau 41,55 persen dibandingkan dengan Kewajiban Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya Konsolidasian per 31 Desember 2022.

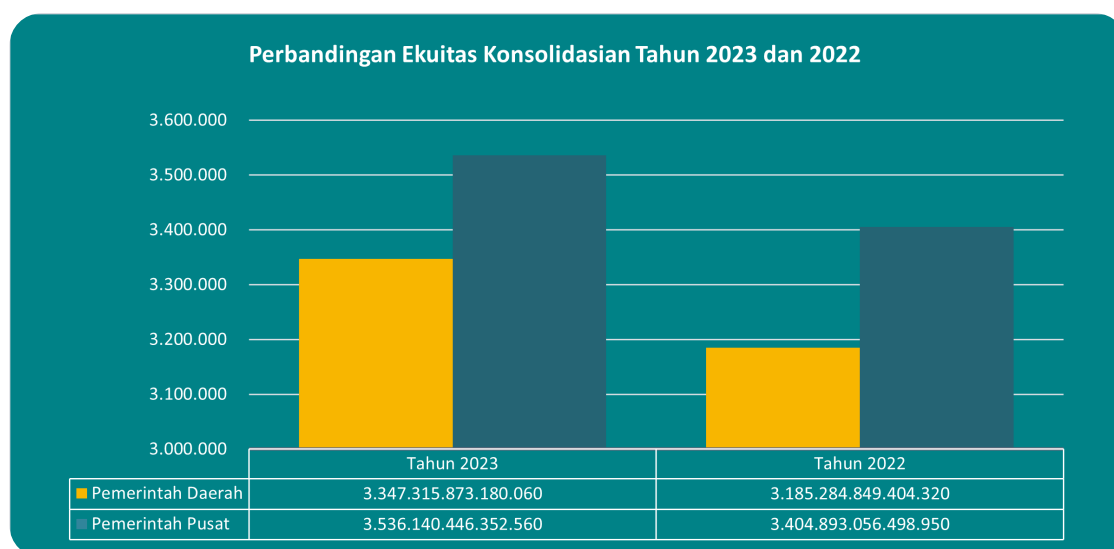
Kewajiban Jangka Panjang Luar Negeri Konsolidasian per 31 Desember 2023 sebesar Rp886,30 triliun terdiri dari Kewajiban Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan Konsolidasian sebesar Rp886,28 triliun dan Kewajiban Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya Konsolidasian sebesar Rp26,58 miliar. Kedua saldo ini hanya terdapat pada Neraca Pemerintah Pusat. Kewajiban Jangka Panjang Luar Negeri Konsolidasian per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp63,44 triliun atau 7,71 persen dibandingkan dengan Kewajiban Jangka Panjang Luar Negeri Konsolidasian per 31 Desember 2022.

- a. Kewajiban Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan Konsolidasian merupakan posisi Kewajiban luar negeri perbankan yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal Neraca. Kewajiban Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan Konsolidasian per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp63,44 triliun atau minus 7,71 persen atas Kewajiban Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan Konsolidasian per 31 Desember 2022.
- b. Kewajiban Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya Konsolidasian mengalami penurunan sebesar Rp66,91 juta atau 0,25 persen dibandingkan dengan periode 31 Desember 2022.

Kewajiban Konsesi Jasa Konsolidasian per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp589,00 triliun. Nilai Kewajiban Konsesi Jasa Konsolidasian mengalami penurunan sebesar Rp84,94 triliun atau 16,85 persen dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2022.

C. 3. Ekuitas Konsolidasian

Ekuitas Konsolidasian per 31 Desember 2023 sebesar Rp6.883,46 triliun. Pada Tahun 2023, Ekuitas Konsolidasian mengalami peningkatan sebesar Rp286,34 triliun atau 4,34 persen dibandingkan dengan Ekuitas Konsolidasian per 31 Desember 2022.



Grafik 26. Perbandingan Ekuitas Konsolidasian Tahun 2023 dan 2022

C. 4. Eliminasi Akun Resiprokal

Eliminasi dilakukan terhadap akun yang bersifat resiprokal pada Neraca Pemerintah Pusat dengan Neraca Pemerintah Daerah Konsolidasian. Eliminasi akun resiprokal pada Neraca LKPK Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Eliminasi Akun Utang Transfer pada Neraca Pemerintah Pusat sebesar Rp52,19 triliun dan Utang Kepada Pihak Ketiga sebesar Rp179,32 miliar dengan Akun Piutang Bukan Pajak sebesar Rp52,37 triliun.
2. Eliminasi Akun Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman pada Neraca Pemerintah Pusat sebesar Rp48,05 triliun dengan Akun Utang Jangka Panjang dalam Negeri-Pemerintah Pusat pada Neraca Pemerintah Daerah sebesar Rp48,05 triliun.
3. Eliminasi Akun Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya dan Utang Biaya Pinjaman/Bunga dan Akun Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman sebesar Rp17,36 triliun.
4. Eliminasi Akun Utang kepada Pihak Ketiga sebesar Rp66,50 triliun dengan Akun Dana yang dibatasi Penggunaannya sebesar Rp66,50 triliun, yang merupakan dana di Rekening *Treasury Deposit Facility*-Transfer Keuangan Daerah.

D. CATATAN ATAS LAPORAN OPERASIONAL PEMERINTAH KONSOLIDASIAN TAHUN 2023

D. 1. Pendapatan Operasional

"Pendapatan Operasional Konsolidasian Tahun 2023 meningkat sebesar 7,59 persen dibandingkan tahun 2022."

Pendapatan Operasional Konsolidasian per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp3.543,03 triliun. Pendapatan Operasional Konsolidasian tersebut berasal dari konsolidasi Pendapatan Perpajakan sebesar Rp2.397,20 triliun atau sebesar 67,66 persen, Pendapatan Negara Bukan Pajak Konsolidasian sebesar Rp1.094,27 triliun atau sebesar 30,89 persen, serta Pendapatan Hibah sebesar Rp51,56 triliun atau sebesar 1,46 persen. Komposisi Pendapatan Operasional Konsolidasian per 31 Desember 2023 dapat digambarkan dengan grafik sebagai berikut:



Grafik 27. Pendapatan Konsolidasian Tahun 2023

Per 31 Desember 2023, Pendapatan Perpajakan Konsolidasian mencapai Rp2.397,20 triliun yang merupakan konsolidasi dari Pendapatan Perpajakan Pemerintah Pusat dan Pendapatan Perpajakan Pemerintah Daerah. Pendapatan Perpajakan per 31 Desember 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp119,72 triliun atau 5,26 persen dibandingkan tahun 2022. Rincian Pendapatan Perpajakan Konsolidasian per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

URAIAN	Konsolidasi			
	Tahun 2023	%	Tahun 2022	%
PENDAPATAN PERPAJAKAN				
Pendapatan Pajak Penghasilan	1.056.264.876.071.450	44,06%	991.488.696.172.421	43,53%
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	749.872.917.946.326	31,28%	694.776.882.555.958	30,51%
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	64.598.772.845.704	2,69%	42.712.888.407.951	1,88%
Pendapatan Cukai	218.828.516.227.555	9,13%	226.661.405.402.388	9,95%
Pendapatan Pajak Lainnya	9.962.359.820.249	0,42%	6.779.467.430.496	0,30%
Pendapatan Bea Masuk	50.951.896.485.742	2,13%	51.215.480.999.153	2,25%
Pendapatan Bea Keluar	13.814.253.622.480	0,58%	39.784.089.995.800	1,75%
Pendapatan Pajak Lain-lain	232.908.882.447.061	9,72%	224.059.053.657.697	9,84%
Jumlah Pendapatan Perpajakan	2.397.202.475.466.570	100,00%	2.277.477.964.621.860	100,00%

Tabel 7. Rincian Pendapatan Perpajakan Konsolidasian Tahun 2023

Per 31 Desember 2023, Pendapatan Negara Bukan Pajak Konsolidasian mencapai Rp1.094,27 triliun yang merupakan konsolidasi Pendapatan Negara Bukan Pajak Pemerintah Pusat sebesar Rp921,58 triliun dan konsolidasi Pendapatan Negara Bukan Pajak Pemerintah Daerah sebesar Rp203,54 triliun. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp126,87 triliun atau 13,12 persen dibandingkan periode tahun 2022.

Pendapatan Negara Bukan Pajak Konsolidasian terdiri dari Pendapatan Sumber Daya Alam (SDA) sebesar Rp280,29 triliun; Pendapatan Bagian Pemerintah Atas Laba BUMN/Kekayaan Negara Dipisahkan sebesar Rp20,95 triliun; Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya sebesar Rp634,12 triliun; dan Pendapatan Badan Layanan Umum sebesar Rp158,18 triliun.



Grafik 28. Pendapatan Negara Bukan Pajak Konsolidasian Tahun 2023-2022

Pendapatan Sumber Daya Alam (SDA) per 31 Desember 2023 menurun sebesar Rp21,84 triliun atau 7,23 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2022. Pendapatan SDA merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak Pemerintah Pusat. Pendapatan Bagi Hasil BUMN/KND per 31 Desember 2023 menurun sebesar Rp1,77 triliun atau 7,78 persen dibandingkan tahun 2022. Bagian Pemerintah atas Laba BUMN/D Konsolidasian terdiri dari Bagian Pemerintah atas Laba BUMN sebesar Rp4,53 juta dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp20,95 triliun.

Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Konsolidasian terdiri dari Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya Pemerintah Pusat sebesar Rp543,92 triliun, dan Pendapatan Retribusi Pemerintah Daerah Konsolidasian dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebesar Rp121,78 triliun. Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Konsolidasian Tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp119,99 triliun atau 23,30 persen dibandingkan dengan Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Konsolidasian Tahun Anggaran 2022.

Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) Konsolidasian Tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp30,49 triliun atau 23,88 persen

dibandingkan dengan Pendapatan BLU Konsolidasian periode yang sama Tahun 2022.

Pendapatan Hibah Konsolidasian Tahun 2023 adalah sebesar Rp51,56 triliun, merupakan konsolidasi Pendapatan Hibah Pemerintah Pusat sejumlah Rp26,85 triliun dan Pendapatan Hibah Pemerintah Daerah sebesar Rp39,93 triliun, serta eliminasi sebesar Rp15,22 triliun. Pendapatan Hibah tersebut menurun sebesar Rp3,37 triliun atau 7,00 persen dibandingkan tahun 2022.

Per 31 Desember 2023, Pendapatan Transfer Konsolidasian adalah nihil yang berasal dari Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah sebesar Rp797,61 triliun yang habis dieliminasi.

D. 2. Beban Operasional

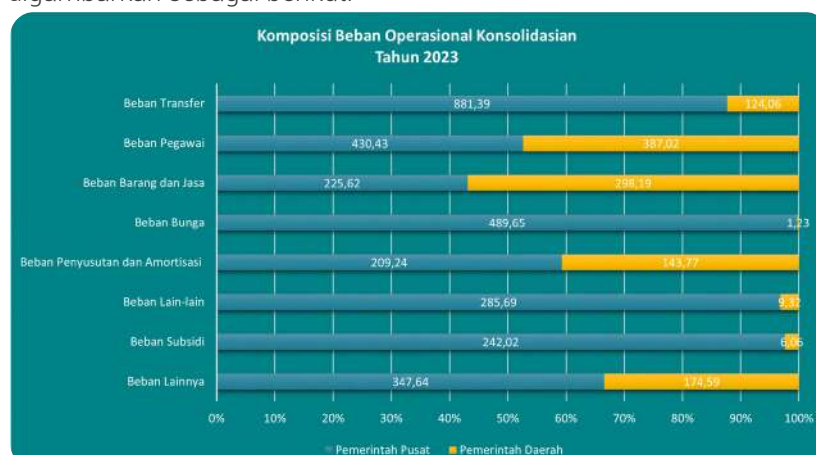
Beban Operasional Konsolidasian per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp3.412,23 triliun. Nilai tersebut naik sebesar Rp120,12 triliun atau 3,65 persen. Jumlah Beban Operasional Konsolidasian tersebut berasal dari konsolidasi Beban Operasional Pemerintah Pusat sebelum dieliminasi sebesar Rp3.111,67 triliun atau sebesar 73,11 persen dan Beban Operasional Pemerintah Daerah Konsolidasian sebesar Rp1.144,25 triliun atau sebesar 26,89 persen dari total Beban Operasional Konsolidasian.

Rincian Beban Operasional Konsolidasian adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

URAIAN	Konsolidasi			
	Tahun 2023	%	Tahun 2022	%
BEBAN OPERASIONAL				
Beban Pegawai	817.451.058.942.146	23,96%	815.824.195.436.946	24,78%
Beban Persediaan	58.854.465.930.968	1,72%	63.071.147.279.451	1,92%
Beban Barang dan Jasa	523.816.068.041.696	15,35%	490.841.051.849.067	14,91%
Beban Pemeliharaan	57.362.019.873.981	1,68%	55.831.223.001.473	1,70%
Beban Perjalanan Dinas	91.373.989.210.240	2,68%	73.896.979.345.131	2,24%
Beban Barang utk diserahkan kpd Masyarakat	68.231.757.433.738	2,00%	73.184.060.840.892	2,22%
Beban Bunga	490.875.753.084.126	14,39%	410.801.519.564.832	12,48%
Beban Subsidi	248.079.317.211.602	7,27%	250.949.846.878.617	7,62%
Beban Hibah	56.120.652.490.274	1,64%	49.959.880.402.761	1,52%
Beban Bantuan Sosial	167.214.490.221.817	4,90%	175.543.584.412.218	5,33%
Beban Transfer	176.982.042.102.102	5,19%	16.378.179.560.440	0,50%
Beban Lain-lain	295.008.459.290.593	8,65%	414.659.631.457.845	12,60%
Beban Penyusutan dan Amortisasi	353.014.357.212.803	10,35%	358.631.499.363.974	10,89%
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	7.850.363.170.050	0,23%	42.546.007.711.007	1,29%
Jumlah Beban Operasional	3.412.234.794.216.140	100,00%	3.292.118.807.104.650	100,00%

Tabel 8. Beban Operasional Pemerintah Konsolidasian Tahun 2023-2022

Komposisi Beban Operasional Konsolidasian Tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut:



Grafik 29. Komposisi Beban Operasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2023

D. 3. Pendapatan Kegiatan Non Operasional

Pendapatan Kegiatan Non Operasional Konsolidasian per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp117,26 triliun. Pendapatan Kegiatan Non Operasional Konsolidasian tersebut berasal dari konsolidasi Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp4,79 triliun atau sebesar 4,09 persen, Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp105,21 miliar atau 0,09 persen, dan Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp112,36 triliun atau sebesar 95,82 persen dari total Pendapatan Kegiatan Non Operasional Konsolidasian. Nilai Pendapatan Kegiatan Non Operasional Konsolidasian tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp14,30 triliun atau 13,89 persen dibandingkan periode tahun 2022.

D. 4. Beban Kegiatan Non Operasional

Beban Kegiatan Non Operasional Konsolidasian per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp58,96 triliun. Beban Kegiatan Non Operasional Konsolidasian tersebut berasal dari konsolidasi Beban Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp22,86 triliun atau sebesar 40,48 persen, Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp536,65 miliar atau 0,91 persen, dan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp34,55 triliun atau sebesar 58,61 persen dari total Beban Kegiatan Non Operasional Konsolidasian. Nilai Beban Kegiatan Non Operasional Konsolidasian mengalami penurunan sebesar Rp289,21 triliun atau 83,07 persen dibandingkan periode Tahun 2022.



Grafik 30. Perbandingan Pendapatan/Beban Non Operasional Konsolidasian Tahun 2023 dan 2022

D. 5. Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa Konsolidasian per 31 Desember 2023 adalah sebesar minus Rp1,62 triliun. Pos Luar Biasa Konsolidasian tersebut berasal dari Pendapatan Luar Biasa Pemerintah Daerah sebesar Rp28,24 miliar, dan Beban Luar Biasa Pemerintah Daerah sebesar Rp1,65 triliun.

D. 6. Surplus/Defisit LO

Surplus/(Defisit) LO merupakan selisih antara pendapatan operasional dan beban operasional selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Per 31 Desember 2023, terjadi surplus LO sebesar Rp187,69 triliun yang berarti total pendapatan selama Tahun 2023 lebih besar daripada total beban. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp433,74 triliun atau 176,13 persen dibandingkan Tahun 2022 yang mencatat Defisit-LO sebesar Rp246,27 triliun.

Halaman ini sengaja dikosongkan

LAMPIRAN



LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH AGREGASI**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023**

Uraian	Anggaran Agregasi	Realisasi Agregasi	Persentase Realisasi
PENDAPATAN DAN HIBAH			
Pendapatan Perpajakan	2.371.892.826.939.090	2.452.856.512.391.650	103,41%
Pajak Dalam Negeri	2.298.994.826.939.090	2.388.366.577.927.230	103,89%
Pajak Perdagangan Internasional	72.898.000.000.000	64.489.934.464.413	88,47%
Pendapatan Bukan Pajak	570.805.978.535.675	722.268.552.413.399	126,53%
Pendapatan Sumber Daya Alam	223.312.141.813.000	254.203.031.073.614	113,83%
Bagian Pemerintah atas Laba BUMN/D	95.489.151.244.253	95.159.123.295.559	99,65%
Pendapatan Bukan Pajak Lainnya	120.511.116.614.422	211.361.275.240.712	175,39%
Pendapatan BLU	131.493.568.864.000	161.545.122.803.514	122,85%
Pendapatan Hibah	9.720.803.697.842	24.685.793.152.030	253,95%
Pendapatan Transfer	847.999.244.362.629	840.752.517.692.868	99,15%
Jumlah Pendapatan dan Hibah	3.800.418.853.535.230	4.113.954.273.446.940	108,25%
BELANJA			
Belanja Pemerintah	3.390.140.529.249.020	3.380.093.976.163.920	99,70%
Belanja Pegawai	869.923.909.080.571	818.581.986.381.907	94,10%
Belanja Barang	742.953.795.976.471	838.954.975.896.851	112,92%
Belanja Modal	419.950.375.781.759	526.606.409.707.162	125,40%
Pembayaran Bunga Utang	442.984.313.671.760	441.432.906.027.409	99,65%
Subsidi	305.051.653.125.539	281.237.065.764.156	92,19%
Hibah	54.651.755.865.036	73.780.925.492.315	135,00%
Belanja Bantuan Sosial	159.084.826.296.103	171.818.328.929.770	108,00%
Belanja Lain-lain	395.539.899.451.781	227.681.377.964.353	57,56%
Transfer ke Daerah dan Dana Desa	1.001.336.689.989.570	1.077.089.453.453.920	107,57%
Jumlah Belanja Negara	4.391.477.219.238.590	4.457.183.429.617.840	101,50%
SURPLUS/DEFISIT ANGGARAN	(591.058.365.703.359)	(343.229.156.170.902)	58,07%
PEMBIAYAAN			
Pembiayaan Dalam Negeri Pemerintah	554.610.462.674.763	382.522.067.307.514	68,97%
Rekening Pemerintah/Penggunaan SAL dan SILPA TA sebelumnya	304.834.689.827.458	167.826.408.680.540	55,05%
Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman	6.467.035.122.589	6.506.820.296.854	100,62%
Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	612.739.083.200	1.099.037.350.531	179,36%
Surat Berharga Negara (Neto)	437.834.050.997.000	308.193.788.405.962	70,39%
Pinjaman Dalam Negeri, Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	9.389.719.332.763	20.174.219.803.612	214,85%
Pengeluaran Pembiayaan - Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri	(12.088.632.693.257)	(13.557.881.157.517)	112,15%
Penyertaan Modal Negara dan Daerah/Dana Investasi Pemerintah	(167.629.173.420.913)	(87.193.786.310.721)	52,02%
Dana Cadangan	(24.195.936.388.102)	(20.195.382.987.845)	83,47%
Pembentukan Dana Cadangan termasuk Dana Pengembangan Pendidikan Nasional	(24.613.147.207.864)	(24.236.663.229.761)	98,47%
Pencairan dana cadangan	417.210.819.762	4.041.280.241.916	968,64%

Uraian	Anggaran Agregasi	Realisasi Agregasi	Persentase Realisasi
Pemberian Pinjaman Daerah	(281.205.089.575)	(149.160.120.387)	53,04%
Kewajiban Penjaminan	(330.511.505.000)	(330.511.505.000)	100,00%
Pembiayaan Lain-lain	(2.312.591.400)	148.514.851.485	(6.422,01%)
Pembiayaan Luar Negeri (Neto)	(18.435.249.833.000)	79.294.046.895.068	(430,12%)
Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto)	62.056.062.121.000	162.650.352.798.218	262,10%
Penarikan Pinjaman Program	29.500.000.000.000	82.990.780.840.684	281,32%
Penarikan Pinjaman Proyek	32.556.062.121.000	79.659.571.957.534	244,68%
Penerusan Pinjaman	(1.065.247.517.000)	(1.905.999.112.657)	178,93%
Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	(79.426.064.437.000)	(81.450.306.790.493)	102,55%
Jumlah Pembiayaan (D.I + D.II)	536.175.212.841.763	461.816.114.202.582	86,13%
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN	(54.883.152.861.596)	118.586.958.031.679	(216,07%)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KONSOLIDASIAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023

Uraian	Konsolidasian Pemerintah Daerah
PENDAPATAN DAN HIBAH	
Pendapatan Perpajakan	298.648.292.923.823
Pajak Dalam Negeri	298.648.292.923.823
Pajak Perdagangan Internasional	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak	105.320.577.338.802
Penerimaan Sumber Daya Alam	-
Bagian Pemerintah atas Laba BUMN	13.100.379.921.689
Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	26.535.466.772.562
Pendapatan BLU	65.684.730.644.551
Penerimaan Hibah	7.238.412.958.792
Pendapatan Transfer	840.752.517.692.868
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	840.752.517.692.868
Dana Perimbangan	568.085.653.961.133
Dana Bagi Hasil	171.384.405.926.551
Dana Alokasi Umum	396.701.248.034.582
Dana Transfer Khusus	174.400.700.096.381
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	27.567.739.935.612
Dana Insentif Daerah	8.117.074.421.298
Dana Keistimewaan DIY	2.467.453.202.224
Dana Otonomi Khusus	16.983.212.312.090
Dana Penyesuaian dan Dana Desa	70.698.423.699.743
Pendapatan Transfer Antar Daerah	-
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah	1.251.959.800.914.290
BELANJA	
Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah	1.139.091.277.583.010
Belanja Pegawai	405.870.661.915.343
Belanja Barang	406.240.006.031.724
Belanja Modal	223.565.116.638.411
Pembayaran Bunga Utang	1.550.321.686.150
Subsidi	11.644.979.710.409
Hibah	72.345.787.691.785
Bantuan Sosial	15.216.695.097.556
Belanja Lain-lain	2.657.708.811.628
Transfer ke Daerah dan Dana Desa	118.810.110.724.755
Transfer ke Daerah	-
Dana Perimbangan	-
Dana Transfer Umum	-
Dana Bagi Hasil	-
Dana Alokasi Khusus	-
Dana Transfer Khusus	-
Dana Alokasi Khusus Fisik	-
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-
Hibah ke Daerah	-

Uraian	Konsolidasian Pemerintah Daerah
Dana Insentif Daerah	-
Dana Keistimewaan DIY	-
Dana Otonomi Khusus	-
Dana Desa	118.810.110.724.755
Jumlah Belanja Negara	1.257.901.388.307.760
SURPLUS (DEFISIT) ANGGARAN	(5.941.587.393.475)
PEMBIAYAAN	
Pembiayaan Dalam Negeri Pemerintah	105.152.366.488.061
Rekening Pemerintah/Penggunaan SAL dan SiLPA TA sebelumnya	130.601.208.680.540
Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman	108.381.459.166
Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.299.744.365
Surat Berharga Negara (Neto)	
Pinjaman Dalam Negeri, Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	2.666.261.086.943
Pengeluaran Pembiayaan - Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri	(10.584.250.504.654)
Penyertaan Modal Negara dan Daerah/Dana Investasi Pemerintah	(17.305.193.870.067)
Dana Cadangan	(195.382.987.845)
Pemberian Pinjaman Daerah	(139.957.120.387)
Kewajiban Penjaminan	-
Pembiayaan Lain-lain	-
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	-
Pembiayaan Luar Negeri	-
Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto)	-
Penerusan Pinjaman	-
Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	-
Jumlah Pembiayaan	105.152.366.488.061
SISA LEBIH (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	99.210.779.094.586

NERACA PEMERINTAH DAERAH KONSOLIDASIAN

TAHUN 2023

Uraian	Konsolidasian Pemerintah Daerah
ASET	
Aset Lancar	
Kas dan Setara Kas	91.684.426.962.446
Kas di Kas Daerah	77.310.862.031.988
Kas di Bendahara Penerimaan	138.689.827.285
Kas di Bendahara Pengeluaran	225.220.787.701
Kas di BLUD	11.181.766.531.836
Kas Lainnya	1.926.130.347.446
Setara Kas	901.757.436.190
Piutang Pendapatan	75.733.716.552.304
Piutang Pajak Daerah	55.631.889.822.456
Piutang Retribusi	1.671.105.496.881
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (Piutang dari Kegiatan BLU)	1.138.262.002.606
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	13.323.279.459.114
Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	2.053.360.155.135
Piutang Transfer Pemerintah Lainnya	1.660.707.081.494
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-
Piutang Pendapatan Lainnya	255.112.534.618
Piutang Lainnya	2.790.322.950.604
Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang	994.870.289.963
Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	663.832.015.358
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	96.892.698.480
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	543.764.454.954
Uang Muka	490.963.491.848
Penyisihan Piutang	(38.145.218.625.264)
Penyisihan Piutang Pendapatan	(35.371.227.047.179)
Penyisihan Piutang Lainnya	(2.773.991.578.084)
Beban Dibayar Dimuka	1.133.416.883.366
Beban Pegawai Dibayar Dimuka	43.229.917.314
Beban Barang Dibayar Dimuka	438.721.989.171
Beban Jasa Dibayar Dimuka	551.665.661.129
Beban Pemeliharaan Dibayar Dimuka	14.581.520.740
Beban Lainnya	85.217.795.012
Investasi Jangka Pendek	1.123.205.473.000
Investasi dalam Saham	-
Investasi dalam Deposito	765.119.105.000
Investasi dalam SUN	-
Investasi dalam SBI	-
Investasi dalam SPN	-
Investasi Jangka Pendek BLUD	350.011.520.000
Investasi Jangka Pendek Lainnya	8.074.848.000
Persediaan	33.130.543.600.902
Persediaan Bahan Pakai Habis	29.170.017.251.804
Persediaan Bahan/Material	697.775.799.123

Uraian	Konsolidasian Pemerintah Daerah
Persediaan Barang Lainnya	3.262.750.549.976
Jumlah Aset Lancar	167.450.413.797.358
Investasi Jangka Panjang	
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	1.498.870.396.272
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	224.061.881.061
Investasi dalam Obligasi	-
Investasi dalam Proyek Pembangunan	3.787.191.354
Dana Bergulir	2.347.642.242.757
Cadangan Piutang Dana Bergulir	(1.175.530.541.447)
Deposito Jangka Panjang	130.944.837
Investasi Non Permanen Lainnya	98.778.677.710
Investasi Jangka Panjang Permanen	258.075.141.789.260
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	257.596.005.954.474
Investasi Permanen Lainnya	479.135.834.786
Jumlah Investasi Jangka Panjang	259.574.012.185.532
Aset Tetap	
Tanah	1.311.127.511.661.230
Tanah Perkampungan	121.087.368.416.270
Tanah Pertanian	6.289.555.116.877
Tanah Perkebunan	2.825.709.636.716
Kebun Campuran	454.327.334.448
Hutan	797.263.712.697
Kolam Ikan	7.627.837.728
Danau/Rawa	1.739.983.685.330
Tanah Tandus/Rusak	8.086.095.576.624
Alang-alang dan Padang Rumput	6.433.865.949.288
Tanah Pengguna Lain	591.833.955.308.602
Tanah Untuk Bangunan Gedung	499.386.731.336.266
Tanah Pertambangan	346.824.230.056
Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	71.838.203.520.327
Peralatan dan Mesin	511.133.990.353.739
Alat-Alat Besar Darat	85.959.678.179.320
Alat-Alat Besar Apung	3.008.882.543.441
Alat-alat Bantu	4.749.518.762.556
Alat Angkutan Darat Bermotor	79.913.120.594.070
Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	681.728.339.113
Alat Angkut Apung Bermotor	5.056.836.877.366
Alat Angkut Apung Tak Bermotor	164.380.765.497
Alat Angkut Bermotor Udara	26.206.562.338
Alat Bengkel Bermesin	5.914.796.510.161
Alat Bengkel Tak Bermesin	979.052.770.829
Alat Ukur	1.766.258.179.731
Alat Pengolahan	3.520.003.034.680
Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	1.678.685.905.036

Uraian	Konsolidasian Pemerintah Daerah
Alat Kantor	58.375.237.991.472
Alat Rumah Tangga	33.166.208.246.402
Komputer	61.509.562.848.502
Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	3.394.669.028.715
Alat Studio	11.279.204.064.584
Alat Komunikasi	3.544.576.262.390
Peralatan Pemancar	842.904.802.504
Alat Kedokteran	99.080.475.356.132
Alat Kesehatan	6.731.534.456.579
Unit-Unit Laboratorium	26.582.999.222.803
Alat Peraga/Praktek Sekolah	7.534.808.554.971
Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	309.014.847.802
Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	308.732.642.213
Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	264.808.686.984
Radiation Application and Non-Destructive Testing Laboratory (BATAM)	135.017.841.686
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	577.150.221.191
Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	261.521.261.344
Senjata Api	402.788.038.787
Persenjataan Non Senjata Api	246.967.303.939
Amunisi	40.052.316.847
Senjata Sinar	68.002.870.221
Alat Keamanan dan Perlindungan	3.058.604.463.535
Gedung dan Bangunan	846.364.375.270.414
Bangunan Gedung Tempat Kerja	780.678.571.881.823
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	32.020.371.225.737
Bangunan Menara	1.122.648.486.363
Bangunan Bersejarah	4.977.310.042.987
Tugu Peringatan	3.747.660.685.017
Candi	803.169.372.754
Monumen/Bangunan Bersejarah	5.366.459.791.019
Tugu Titik Kontrol/Pasti	9.960.882.039.226
Rambu-Rambu	7.656.288.556.112
Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	31.013.189.377
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.530.875.063.298.630
Jalan	1.135.229.593.212.990
Jembatan	86.280.163.844.519
Bangunan Air Irigasi	114.261.586.689.293
Bangunan Air Pasang Surut	2.927.727.965.681
Bangunan Air Rawa	2.866.971.958.536
Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	49.837.874.332.481
Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	5.103.270.165.559
Bangunan Air Bersih/Baku	12.599.278.081.405
Bangunan Air Kotor	9.764.279.105.598
Bangunan Air	20.420.143.204.652
Instalasi Air Minum Bersih	24.204.464.756.514
Instalasi Air Kotor	4.203.459.347.400

Uraian	Konsolidasian Pemerintah Daerah
Instalasi Pengolahan Sampah Organik dan Non Organik	1.750.318.948.552
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	81.192.732.820
Instalasi Pembangkit Listrik	2.485.402.891.578
Instalasi Gardu Listrik	4.819.913.052.168
Instalasi Pertahanan	503.091.936.999
Instalasi Gas	200.187.000.754
Instalasi Pengaman	541.826.190.901
Jaringan Air Minum	27.070.270.736.184
Jaringan Listrik	23.422.125.966.789
Jaringan Telepon	1.176.589.170.190
Jaringan Gas	1.125.332.007.070
Aset Tetap Lainnya	53.824.445.068.647
Buku	19.480.506.759.797
Terbitan	108.877.518.113
Barang-Barang Perpustakaan	17.408.305.337.605
Barang Bercorak Kebudayaan	2.815.459.642.310
Alat Olah Raga Lainnya	693.475.638.282
Hewan	336.233.304.366
Tanaman	1.080.121.170.959
Aset Tetap Renovasi	11.901.465.697.215
Konstruksi Dalam Pengerjaan	61.860.959.852.496
Akumulasi Penyusutan-Peralatan dan Mesin	(389.899.498.777.277)
Akumulasi Penyusutan-Gedung dan Bangunan	(244.545.843.058.075)
Akumulasi Penyusutan-Jalan, Irigasi dan Jaringan	(856.738.612.140.629)
Akumulasi Penyusutan-Aset Tetap Lainnya	(10.361.188.163.389)
Jumlah Aset Tetap	2.813.641.203.365.790
Dana Cadangan	
Dana Cadangan	5.815.434.423.939
Jumlah Dana Cadangan	5.815.434.423.939
Aset Lainnya	
Tagihan Jangka Panjang	2.480.758.601.745
Tagihan Penjualan Angsuran	728.002.809.492
Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	1.752.755.792.253
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	18.676.061.830.060
Sewa	3.358.630.106.021
Kerjasama Pemanfaatan	11.496.030.950.459
Bangun guna serah	3.771.119.233.083
Bangun serah guna	50.281.540.498
Aset Tidak Berwujud	2.425.562.215.100
Goodwill	1.104.159.503.301
Lisensi dan frenchise	1.120.813.876.266
Hak Cipta	242.980.847.272
Paten	153.948.283.306

Uraian	Konsolidasian Pemerintah Daerah
Aset Tidak Berwujud Lainnya	6.616.278.111.511
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(6.812.618.406.556)
Aset Lain-lain	156.830.318.606.798
Jumlah Aset Lainnya	180.412.701.253.703
JUMLAH ASET	3.426.893.765.026.320
KEWAJIBAN	
Kewajiban Jangka Pendek	
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	575.423.139.960
Utang Taspen	12.022.688.707
Utang Iuran Jaminan Kesehatan	72.323.645.792
Utang PPh Pusat	74.654.207.555
Utang PPN Pusat	140.746.960.032
Utang Taperum	4.463.478.093
Utang Iuran Wajib Pegawai	17.696.839.825
Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya	197.858.727.501
Utang Jaminan	55.656.592.457
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	6.685.609.245.699
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan	896.166.854.750
Bagian Lancar Utang dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	3.233.911.114.140
Bagian Lancar Utang Pemerintah Pusat	2.555.531.276.809
Bagian Lancar Utang Pemerintah Provinsi Lainnya	-
Bagian Lancar Utang Pemerintah Kabupaten/Kota	-
Utang Bunga	354.246.912.389
Utang Bunga kepada Pemerintah	28.379.122.898
Utang Bunga kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-
Utang Bunga Kepada BUMN/BUMD	20.748.417.852
Utang Bunga kepada Bank/Lembaga Keuangan Bukan Bank	289.904.897.017
Utang Bunga Dalam Negeri Lainnya	15.214.474.622
Utang Bunga Luar Negeri	-
Pendapatan Diterima Dimuka	2.127.942.440.144
Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III	370.862.816.772
Uang Muka Penjualan Produk Pemda Dari Pihak III	79.358.633.690
Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah	-
Pendapatan Diterima Dimuka lainnya	1.677.720.989.682
Utang Belanja	27.928.613.604.246
Utang Belanja Pegawai	4.170.457.556.487
Utang Belanja Barang dan Jasa	13.303.224.668.294
Utang Belanja Modal	5.927.422.103.954
Utang Belanja Subsidi	23.655.492.269
Utang Belanja Lain-lain	4.503.853.783.242
Utang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	9.501.470.074.912
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	47.173.305.417.349
Kewajiban Jangka Panjang	
Utang Dalam Negeri	30.130.698.022.941

Uraian	Konsolidasian Pemerintah Daerah
Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan	2.225.674.384.923
Utang Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	9.960.912.162.585
Utang Dalam Negeri-Obligasi	471.888.929
Utang Pemerintah Pusat	17.844.274.342.780
Utang Pemerintah Daerah Lainnya	-
Utang Dalam Negeri Lainnya	99.365.243.725
Utang Jangka Panjang Lainnya	2.273.888.405.970
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	32.404.586.428.912
JUMLAH KEWAJIBAN	79.577.891.846.261
EKUITAS	
Ekuitas	3.347.315.873.180.060
Jumlah Ekuitas	3.347.315.873.180.060
JUMLAH EKUITAS DAN KEWAJIBAN	3.426.893.765.026.320

LAPORAN OPERASIONAL PEMERINTAH DAERAH KONSOLIDASIAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 MARET 2024

Uraian	Konsolidasian Pemerintah Daerah
SURPLUS/DEFISIT OPERASIONAL	
PENDAPATAN	
Pendapatan Asli Daerah	
Pendapatan Pajak Daerah-LO	262.395.687.072.277
Pendapatan Retribusi Daerah-LO	9.764.277.795.485
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	20.946.677.968.096
Lain-lain PAD yang sah-LO	102.089.384.325.116
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	395.196.027.160.974
Pendapatan Transfer	
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	760.837.807.024.880
Bagi Hasil Pajak	101.103.200.524.776
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	92.799.347.205.076
Dana Alokasi Umum (DAU)	398.752.612.921.540
Dana Alokasi Khusus (DAK)	168.182.646.373.488
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO	36.774.005.645.868
Dana Otonomi Khusus	18.004.540.525.787
Dana Keistimewaan	1.471.363.173.061
Dana Penyesuaian	6.046.473.727.741
Dana Insentif Daerah	10.252.554.422.106
Dana Bantuan Operasional Sekolah	106.813.249.401
Dana Desa	892.260.547.772
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO	-
Bantuan Keuangan Daerah-LO	-
Jumlah Pendapatan Transfer	797.611.812.670.748
Lain-Lain Pendapatan yang Sah	
Pendapatan Hibah	39.931.440.015.128
Pendapatan Hibah dari Pemerintah	25.991.761.307.552
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	-
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri	12.224.117.961.754
Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan	1.715.560.745.822
Dana Darurat	-
Pendapatan Lainnya	70.740.033.533.920
Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang Sah	110.671.473.549.048
JUMLAH PENDAPATAN	1.303.479.313.380.770
BEBAN	
Beban Operasi	
Beban Pegawai-LO	387.024.737.853.102
Beban Barang dan Jasa	384.871.002.278.458
Beban Bunga	1.227.699.882.076
Beban Subsidi	6.058.109.648.034
Beban Hibah	71.122.901.955.135
Beban Bantuan Sosial	10.873.398.690.835
Beban Penyusutan dan Amortisasi	143.770.036.567.389

Uraian	Konsolidasian Pemerintah Daerah
Beban Penyisihan Piutang	5.921.392.960.509
Beban Lain-lain	9.323.069.320.805
Jumlah Beban Operasi	1.020.192.349.156.340
Beban Transfer	
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	67.957.704.086.769
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	2.297.456.099.383
Beban Transfer Bantuan Keuangan Daerah ke Pemerintah Daerah Lainnya	-
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	50.228.313.758.596
Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	1.373.966.062.116
Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	2.197.914.236.488
Jumlah Beban Transfer	124.055.354.243.353
JUMLAH BEBAN	1.144.247.703.399.700
SURPLUS/DEFISIT OPERASIONAL	159.231.609.981.074
SURPLUS/DEFISIT NON OPERASIONAL	
Surplus Non Operasional	
Surplus penjualan aset non lancar	1.007.207.825.082
Surplus penyelesaian kewajiban jangka panjang	338.851.111
Surplus dari kegiatan non operasional lainnya	3.233.957.011.316
Jumlah Surplus dari Kegiatan Non Operasional	4.241.503.687.509
Defisit Non Operasional	
Defisit penjualan aset non lancar	3.238.188.423.007
Defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang	41.618.193.784
Defisit Investasi Permanen	1.076.982.371
Defisit dari kegiatan non operasional lainnya	2.724.227.098.178
Jumlah Defisit dari Kegiatan Non Operasional	6.005.110.697.340
SURPLUS/DEFISIT NON OPERASIONAL	(1.763.607.009.830)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	157.468.002.971.243
POS LUAR BIASA	
Pendapatan Luar Biasa	
Pendapatan Luar Biasa	28.244.220.109
Jumlah Pendapatan Luar Biasa	28.244.220.109
Beban Luar Biasa	
Beban Luar Biasa	1.649.822.142.583
Jumlah Beban Luar Biasa	1.649.822.142.583
SURPLUS/DEFISIT POS LUAR BIASA	(1.621.577.922.474)
SURPLUS/DEFISIT LO	155.846.425.048.769

REALISASI APBN BERDASARKAN PROGRAM

TAHUN 2023

No	Kode Program	Uraian	Pagu	Realisasi	(%)
1	00101WA	Program Dukungan Manajemen	265.163.870.000	239.600.963.827	90,36%
2	00102CF	Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan	652.213.418.000	624.329.548.689	95,72%
3	00201WA	Program Dukungan Manajemen	1.675.966.633.000	1.664.710.710.815	99,33%
4	00202CF	Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan	3.274.430.694.000	3.227.687.800.383	98,57%
5	00202WA	Program Dukungan Manajemen	1.147.815.228.000	1.126.991.281.200	98,19%
6	00401CI	Program Pemeriksaan Keuangan Negara	3.969.656.875.000	3.962.351.107.026	99,82%
7	00401WA	Program Dukungan Manajemen	644.377.658.000	643.495.316.024	99,86%
8	00501WA	Program Dukungan Manajemen	11.181.082.571.000	10.874.333.683.822	97,26%
9	00502BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	12.069.990.000	11.834.767.055	98,05%
10	00502WA	Program Dukungan Manajemen	197.330.191.000	192.579.558.898	97,59%
11	00503BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	79.716.709.000	78.105.025.078	97,98%
12	00503WA	Program Dukungan Manajemen	56.404.580.000	56.244.599.375	99,72%
13	00504BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	64.275.495.000	63.650.970.278	99,03%
14	00504WA	Program Dukungan Manajemen	51.802.917.000	51.471.860.441	99,36%
15	00505BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	8.619.321.000	8.475.798.604	98,33%
16	00505WA	Program Dukungan Manajemen	20.418.773.000	20.384.324.096	99,83%
17	00506WA	Program Dukungan Manajemen	162.404.647.000	160.884.877.082	99,06%
18	00507WA	Program Dukungan Manajemen	77.395.003.000	76.262.002.871	98,54%
19	00601BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	654.394.128.000	595.254.696.237	90,96%
20	00601WA	Program Dukungan Manajemen	15.583.131.220.000	15.356.929.899.962	98,55%
21	00701CA	Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden	2.564.834.627.000	2.489.062.348.729	97,05%
22	00701WA	Program Dukungan Manajemen	1.325.144.185.000	1.279.432.687.105	96,55%
23	00706CA	Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden	568.371.121.000	568.287.550.395	99,99%
24	00706WA	Program Dukungan Manajemen	3.489.861.000	3.474.649.929	99,56%
25	00707CA	Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden	3.528.373.000	3.381.087.468	95,83%

No	Kode Program	Uraian	Pagu	Realisasi	(%)
26	00707WA	Program Dukungan Manajemen	28.620.117.000	27.813.461.761	97,18%
27	00710CA	Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden	10.081.346.000	9.891.433.467	98,12%
28	00710WA	Program Dukungan Manajemen	110.622.666.000	109.103.844.776	98,63%
29	01001WA	Program Dukungan Manajemen	1.150.817.224.000	1.140.597.262.222	99,11%
30	01002WA	Program Dukungan Manajemen	76.271.846.000	76.243.522.904	99,96%
31	01003CR	Program Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum	196.983.648.000	196.921.080.536	99,97%
32	01003WA	Program Dukungan Manajemen	65.486.429.000	65.445.313.305	99,94%
33	01004CM	Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	153.231.659.000	151.666.531.887	98,98%
34	01004WA	Program Dukungan Manajemen	64.255.909.000	64.074.768.998	99,72%
35	01005CM	Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	987.433.516.000	884.640.478.881	89,59%
36	01005WA	Program Dukungan Manajemen	109.374.440.000	108.701.847.409	99,39%
37	01006CM	Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	197.259.523.000	196.848.849.440	99,79%
38	01006WA	Program Dukungan Manajemen	81.542.224.000	81.153.159.757	99,52%
39	01007CM	Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	37.571.173.000	37.406.191.855	99,56%
40	01007WA	Program Dukungan Manajemen	59.938.392.000	59.765.345.329	99,71%
41	01008CP	Program Tata Kelola Kependudukan	752.847.470.000	751.367.667.443	99,80%
42	01008WA	Program Dukungan Manajemen	99.553.534.000	98.506.488.040	98,95%
43	01009CM	Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	24.341.730.000	24.071.950.722	98,89%
44	01009WA	Program Dukungan Manajemen	56.933.622.000	56.715.862.189	99,62%
45	01011CM	Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	8.219.379.000	8.187.786.389	99,62%
46	01011WA	Program Dukungan Manajemen	43.930.339.000	43.670.630.153	99,41%
47	01012CM	Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	66.241.805.000	65.590.924.737	99,02%
48	01012WA	Program Dukungan Manajemen	153.735.264.000	153.577.390.228	99,90%
49	01101AA	Program Diplomasi dan Kerja sama Internasional	316.647.657.000	305.744.933.990	96,56%
50	01101AL	Program Pelindungan WNI di Luar Negeri serta Pelayanan Publik	165.299.266.000	156.632.322.798	94,76%
51	01101WA	Program Dukungan Manajemen	7.154.736.194.000	7.019.495.593.682	98,11%
52	01102AA	Program Diplomasi dan Kerja sama Internasional	21.304.488.000	21.102.453.241	99,05%

No	Kode Program	Uraian	Pagu	Realisasi	(%)
53	01102WA	Program Dukungan Manajemen	4.829.481.000	4.828.469.728	99,98%
54	01103AA	Program Diplomasi dan Kerja sama Internasional	17.352.186.000	17.352.182.534	100,00%
55	01103WA	Program Dukungan Manajemen	4.987.342.000	4.987.340.325	100,00%
56	01104AK	Program Peran dan Kepemimpinan Indonesia di bidang Kerja sama Multilateral	106.478.332.000	106.477.189.327	100,00%
57	01104WA	Program Dukungan Manajemen	5.547.699.000	5.546.981.630	99,99%
58	01105AK	Program Peran dan Kepemimpinan Indonesia di bidang Kerja sama Multilateral	881.464.457.000	880.248.784.488	99,86%
59	01105WA	Program Dukungan Manajemen	6.482.629.000	6.422.604.646	99,07%
60	01106AA	Program Diplomasi dan Kerja sama Internasional	22.285.974.000	22.274.159.350	99,95%
61	01106WA	Program Dukungan Manajemen	7.194.479.000	7.188.473.042	99,92%
62	01107AM	Program Penegakan Kedaulatan serta Hukum dan Perjanjian Internasional	9.255.566.000	9.255.295.229	100,00%
63	01107WA	Program Dukungan Manajemen	9.610.518.000	9.609.992.131	99,99%
64	01108AL	Program Pelindungan WNI di Luar Negeri serta Pelayanan Publik	71.346.149.000	70.969.539.963	99,47%
65	01108WA	Program Dukungan Manajemen	8.328.418.000	8.323.030.197	99,94%
66	01109WA	Program Dukungan Manajemen	13.007.664.000	13.007.568.485	100,00%
67	01111AA	Program Diplomasi dan Kerja sama Internasional	9.076.332.000	9.073.318.917	99,97%
68	01111WA	Program Dukungan Manajemen	3.123.494.000	3.123.172.873	99,99%
69	01201AD	Program Kebijakan dan Regulasi Pertahanan	59.225.376.000	59.149.042.131	99,87%
70	01201AF	Program Modernisasi Alutsista, Non Alutsista, dan Sarpras Pertahanan	65.201.906.069.000	59.151.008.734.044	90,72%
71	01201AJ	Program Pembinaan Sumber Daya Pertahanan	136.877.371.000	136.721.210.398	99,89%
72	01201KA	Program Riset, Industri, dan Pendidikan Tinggi Pertahanan	528.987.431.000	528.081.607.505	99,83%
73	01201WA	Program Dukungan Manajemen	2.267.472.263.000	2.251.977.191.963	99,32%
74	01221AB	Program Pelaksanaan Tugas TNI	3.617.762.031.000	3.611.017.837.294	99,81%
75	01221AC	Program Profesionalisme dan Kesejahteraan Prajurit	1.085.192.633.000	1.082.899.984.612	99,79%
76	01221AF	Program Modernisasi Alutsista, Non Alutsista, dan Sarpras Pertahanan	1.809.308.008.000	1.807.818.658.871	99,92%
77	01221WA	Program Dukungan Manajemen	5.724.323.490.000	5.492.887.042.247	95,96%
78	01222AB	Program Pelaksanaan Tugas TNI	183.412.774.000	183.411.200.745	100,00%
79	01222AC	Program Profesionalisme dan Kesejahteraan Prajurit	6.985.293.305.000	6.629.582.743.683	94,91%

No	Kode Program	Uraian	Pagu	Realisasi	(%)
80	01222AF	Program Modernisasi Alutsista, Non Alutsista, dan Sarpras Pertahanan	2.804.123.757.000	2.801.214.311.990	99,90%
81	01222AJ	Program Pembinaan Sumber Daya Pertahanan	184.875.037.000	184.826.097.000	99,97%
82	01222KA	Program Riset, Industri, dan Pendidikan Tinggi Pertahanan	34.237.450.000	34.235.180.400	99,99%
83	01222WA	Program Dukungan Manajemen	44.200.021.985.000	43.855.373.263.399	99,22%
84	01223AB	Program Pelaksanaan Tugas TNI	511.683.508.000	510.399.267.258	99,75%
85	01223AC	Program Profesionalisme dan Kesejahteraan Prajurit	3.010.891.738.000	2.969.837.342.093	98,64%
86	01223AF	Program Modernisasi Alutsista, Non Alutsista, dan Sarpras Pertahanan	7.095.827.107.000	7.094.455.910.648	99,98%
87	01223AJ	Program Pembinaan Sumber Daya Pertahanan	51.869.730.000	51.868.756.886	100,00%
88	01223KA	Program Riset, Industri, dan Pendidikan Tinggi Pertahanan	21.907.576.000	21.907.565.035	100,00%
89	01223WA	Program Dukungan Manajemen	13.484.576.782.000	13.358.933.460.370	99,07%
90	01224AB	Program Pelaksanaan Tugas TNI	27.983.707.000	27.956.009.700	99,90%
91	01224AC	Program Profesionalisme dan Kesejahteraan Prajurit	2.683.547.066.000	2.642.117.440.125	98,46%
92	01224AF	Program Modernisasi Alutsista, Non Alutsista, dan Sarpras Pertahanan	8.023.079.310.000	8.017.798.445.046	99,93%
93	01224AJ	Program Pembinaan Sumber Daya Pertahanan	32.089.861.000	32.089.547.500	100,00%
94	01224KA	Program Riset, Industri, dan Pendidikan Tinggi Pertahanan	19.203.484.000	19.200.723.000	99,99%
95	01224WA	Program Dukungan Manajemen	9.031.572.901.000	8.992.001.189.418	99,56%
96	01301WA	Program Dukungan Manajemen	4.756.936.194.000	4.528.012.209.955	95,19%
97	01302WA	Program Dukungan Manajemen	69.026.935.000	66.295.613.281	96,04%
98	01303BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	414.889.422.000	373.293.226.032	89,97%
99	01303WA	Program Dukungan Manajemen	368.325.091.000	325.181.105.556	88,29%
100	01305BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	2.535.645.757.000	2.516.699.841.247	99,25%
101	01305WA	Program Dukungan Manajemen	5.680.004.551.000	5.612.033.073.814	98,80%
102	01306BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	2.202.154.655.000	2.158.678.769.987	98,03%
103	01306WA	Program Dukungan Manajemen	1.684.705.789.000	1.653.626.224.538	98,16%
104	01307BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	211.069.780.000	194.118.061.787	91,97%
105	01307WA	Program Dukungan Manajemen	402.797.069.000	372.534.451.812	92,49%
106	01308BB	Program Pembentukan Regulasi	28.064.523.000	26.716.207.389	95,20%

No	Kode Program	Uraian	Pagu	Realisasi	(%)
107	01308WA	Program Dukungan Manajemen	35.885.192.000	34.883.704.028	97,21%
108	01309BG	Program Pemajuan dan Penegakan HAM	17.550.216.000	17.222.749.131	98,13%
109	01309WA	Program Dukungan Manajemen	52.285.806.000	51.138.925.291	97,81%
110	01310BB	Program Pembentukan Regulasi	9.074.297.000	8.944.207.310	98,57%
111	01310BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	72.433.730.000	71.852.715.800	99,20%
112	01310WA	Program Dukungan Manajemen	40.078.459.000	39.592.022.758	98,79%
113	01311WA	Program Dukungan Manajemen	46.734.706.000	46.187.676.207	98,83%
114	01312WA	Program Dukungan Manajemen	305.611.935.000	298.183.938.444	97,57%
115	01501WA	Program Dukungan Manajemen	33.483.342.883.000	32.834.725.691.633	98,06%
116	01502CD	Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	702.059.000	693.614.184	98,80%
117	01502WA	Program Dukungan Manajemen	48.732.838.000	46.784.896.273	96,00%
118	01503CB	Program Pengelolaan Belanja Negara	29.201.417.000	23.669.124.719	81,05%
119	01503CC	Program Pengelolaan Penerimaan Negara	4.791.247.000	4.594.901.594	95,90%
120	01503CE	Program Kebijakan Fiskal	1.460.832.000	1.455.244.611	99,62%
121	01503WA	Program Dukungan Manajemen	61.178.609.000	60.493.547.669	98,88%
122	01504CC	Program Pengelolaan Penerimaan Negara	1.172.194.042.000	1.110.724.952.940	94,76%
123	01504CE	Program Kebijakan Fiskal	321.225.000	320.852.000	99,88%
124	01504WA	Program Dukungan Manajemen	5.909.795.385.000	5.222.374.704.021	88,37%
125	01505CC	Program Pengelolaan Penerimaan Negara	832.324.343.000	807.551.854.542	97,02%
126	01505CE	Program Kebijakan Fiskal	8.406.024.000	8.144.122.500	96,88%
127	01505WA	Program Dukungan Manajemen	2.299.388.410.000	2.233.767.741.974	97,15%
128	01506CB	Program Pengelolaan Belanja Negara	14.773.680.000	14.249.232.491	96,45%
129	01506CE	Program Kebijakan Fiskal	3.247.868.000	3.137.711.930	96,61%
130	01506WA	Program Dukungan Manajemen	56.625.128.000	55.474.354.117	97,97%
131	01507CD	Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	18.619.327.000	18.533.714.767	99,54%
132	01507CE	Program Kebijakan Fiskal	959.720.000	944.181.695	98,38%
133	01507WA	Program Dukungan Manajemen	83.014.649.000	82.438.290.540	99,31%

No	Kode Program	Uraian	Pagu	Realisasi	(%)
134	01508CD	Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	80.954.629.000	77.039.788.059	95,16%
135	01508WA	Program Dukungan Manajemen	22.512.059.441.000	22.403.445.612.776	99,52%
136	01509CD	Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	174.613.499.000	146.200.076.225	83,73%
137	01509WA	Program Dukungan Manajemen	445.525.011.000	411.005.106.652	92,25%
138	01511WA	Program Dukungan Manajemen	436.749.612.000	421.089.197.491	96,41%
139	01512CE	Program Kebijakan Fiskal	143.122.294.000	122.551.085.645	85,63%
140	01512WA	Program Dukungan Manajemen	49.746.111.000	45.864.186.100	92,20%
141	01513CC	Program Pengelolaan Penerimaan Negara	4.204.851.000	3.777.927.633	89,85%
142	01513WA	Program Dukungan Manajemen	71.843.640.000	69.865.012.637	97,25%
143	01801WA	Program Dukungan Manajemen	1.339.017.899.000	1.325.807.623.103	99,01%
144	01802WA	Program Dukungan Manajemen	131.030.528.000	127.765.411.183	97,51%
145	01803EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	724.151.899.000	711.318.512.084	98,23%
146	01803HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	2.522.810.586.000	2.354.057.980.988	93,31%
147	01803WA	Program Dukungan Manajemen	162.280.470.000	159.012.516.073	97,99%
148	01804EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	128.526.059.000	122.856.648.129	95,59%
149	01804HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	658.446.822.000	641.393.858.854	97,41%
150	01804WA	Program Dukungan Manajemen	120.185.074.000	118.205.013.327	98,35%
151	01805EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	843.994.361.000	748.559.012.054	88,69%
152	01805WA	Program Dukungan Manajemen	186.877.689.000	181.580.559.622	97,17%
153	01806EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	27.657.764.000	27.195.488.759	98,33%
154	01806HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	1.916.571.581.000	1.862.662.340.315	97,19%
155	01806WA	Program Dukungan Manajemen	314.121.164.000	309.354.536.238	98,48%
156	01808HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	2.514.395.317.000	2.468.859.737.154	98,19%
157	01808WA	Program Dukungan Manajemen	177.018.981.000	171.506.593.808	96,89%
158	01809EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	101.110.345.000	80.159.204.654	79,28%
159	01809HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	49.059.788.000	48.660.126.255	99,19%
160	01809KB	Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	-	-	#DIV/0!

No	Kode Program	Uraian	Pagu	Realisasi	(%)
161	01809WA	Program Dukungan Manajemen	722.687.671.000	708.817.630.854	98,08%
162	01810DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	844.790.019.000	832.879.179.833	98,59%
163	01810WA	Program Dukungan Manajemen	270.103.503.000	268.417.128.441	99,38%
164	01812HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	287.770.342.000	285.243.235.412	99,12%
165	01812WA	Program Dukungan Manajemen	766.265.860.000	761.144.573.903	99,33%
166	01901EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	137.360.301.000	137.199.065.156	99,88%
167	01901WA	Program Dukungan Manajemen	187.869.025.000	186.118.453.424	99,07%
168	01902EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	27.109.904.000	27.074.021.730	99,87%
169	01902WA	Program Dukungan Manajemen	38.360.283.000	37.888.194.924	98,77%
170	01903EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	41.496.048.000	41.348.029.461	99,64%
171	01903WA	Program Dukungan Manajemen	37.896.066.000	37.585.598.305	99,18%
172	01904EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	1.435.919.266.000	116.312.358.715	8,10%
173	01904WA	Program Dukungan Manajemen	49.289.625.000	48.390.080.014	98,17%
174	01905EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	605.435.783.000	594.545.556.013	98,20%
175	01905WA	Program Dukungan Manajemen	71.449.567.000	69.736.352.371	97,60%
176	01906WA	Program Dukungan Manajemen	39.111.629.000	38.727.145.205	99,02%
177	01907EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	218.595.641.000	211.601.921.026	96,80%
178	01907WA	Program Dukungan Manajemen	465.816.840.000	461.276.494.407	99,03%
179	01909EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	160.259.635.000	158.993.236.310	99,21%
180	01909WA	Program Dukungan Manajemen	46.684.234.000	46.431.823.470	99,46%
181	01910DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	481.060.124.000	472.974.395.805	98,32%
182	01910WA	Program Dukungan Manajemen	486.689.778.000	482.744.415.297	99,19%
183	02001WA	Program Dukungan Manajemen	447.614.039.000	440.743.697.744	98,47%
184	02002WA	Program Dukungan Manajemen	106.912.135.000	106.344.622.515	99,47%
185	02004JA	Program Energi dan Ketenagalistrikan	1.267.264.449.000	1.254.251.382.331	98,97%
186	02004WA	Program Dukungan Manajemen	238.086.305.000	203.260.592.913	85,37%
187	02005JA	Program Energi dan Ketenagalistrikan	708.206.669.000	547.832.826.578	77,35%

No	Kode Program	Uraian	Pagu	Realisasi	(%)
188	02005WA	Program Dukungan Manajemen	112.294.263.000	109.949.549.523	97,91%
189	02006JB	Program Pertambangan Mineral dan Batubara	244.285.692.000	227.091.796.287	92,96%
190	02006WA	Program Dukungan Manajemen	510.190.897.000	450.745.878.936	88,35%
191	02007WA	Program Dukungan Manajemen	56.255.949.000	55.807.512.368	99,20%
192	02012DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	356.608.520.000	355.489.512.213	99,69%
193	02012WA	Program Dukungan Manajemen	260.550.593.000	259.714.825.357	99,68%
194	02013FE	Program Mitigasi dan Pelayanan Geologi	468.555.287.000	448.886.239.812	95,80%
195	02013WA	Program Dukungan Manajemen	376.634.246.000	368.056.200.763	97,72%
196	02014JA	Program Energi dan Ketenagalistrikan	64.167.411.000	63.647.189.730	99,19%
197	02014WA	Program Dukungan Manajemen	166.756.891.000	165.890.041.445	99,48%
198	02015JA	Program Energi dan Ketenagalistrikan	1.271.599.522.000	918.670.801.815	72,25%
199	02015WA	Program Dukungan Manajemen	133.295.815.000	130.963.832.307	98,25%
200	02016JA	Program Energi dan Ketenagalistrikan	5.185.379.000	5.141.682.844	99,16%
201	02016WA	Program Dukungan Manajemen	75.650.944.000	74.395.312.346	98,34%
202	02201WA	Program Dukungan Manajemen	565.881.458.000	563.162.602.568	99,52%
203	02202WA	Program Dukungan Manajemen	101.814.783.000	101.794.194.080	99,98%
204	02203GA	Program Infrastruktur Konektivitas	4.716.653.159.000	4.629.777.754.792	98,16%
205	02203WA	Program Dukungan Manajemen	1.094.721.861.000	1.092.681.578.026	99,81%
206	02204GA	Program Infrastruktur Konektivitas	7.582.960.239.000	7.392.836.439.708	97,49%
207	02204WA	Program Dukungan Manajemen	3.043.994.060.000	3.022.142.522.420	99,28%
208	02205GA	Program Infrastruktur Konektivitas	5.102.837.092.000	5.026.962.807.846	98,51%
209	02205WA	Program Dukungan Manajemen	2.363.377.548.000	2.334.818.568.987	98,79%
210	02208GA	Program Infrastruktur Konektivitas	7.251.355.405.000	6.030.969.274.249	83,17%
211	02208WA	Program Dukungan Manajemen	522.549.524.000	515.133.518.579	98,58%
212	02211GA	Program Infrastruktur Konektivitas	83.475.263.000	83.368.781.687	99,87%
213	02211WA	Program Dukungan Manajemen	77.655.550.000	77.611.025.950	99,94%
214	02212DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	2.591.224.357.000	2.581.704.437.505	99,63%

No	Kode Program	Uraian	Pagu	Realisasi	(%)
215	02212WA	Program Dukungan Manajemen	1.328.373.401.000	1.325.236.046.495	99,76%
216	02213GA	Program Infrastruktur Konektivitas	182.001.037.000	181.829.303.015	99,91%
217	02213WA	Program Dukungan Manajemen	77.711.916.000	77.448.503.937	99,66%
218	02301DF	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	9.941.627.852.000	9.935.156.714.200	99,93%
219	02301DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	8.699.218.244.000	8.562.612.090.917	98,43%
220	02301DK	Program Pendidikan Tinggi	14.300.736.767.000	14.132.760.617.325	98,83%
221	02301WA	Program Dukungan Manajemen	2.276.643.480.000	2.124.922.810.074	93,34%
222	02302WA	Program Dukungan Manajemen	198.398.369.000	191.093.049.266	96,32%
223	02303DF	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	173.447.066.000	169.446.861.524	97,69%
224	02303DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	1.262.344.254.000	1.231.601.872.503	97,56%
225	02303WA	Program Dukungan Manajemen	915.741.867.000	900.995.954.533	98,39%
226	02311DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	884.278.937.000	861.915.421.651	97,47%
227	02311WA	Program Dukungan Manajemen	130.663.301.000	127.583.310.108	97,64%
228	02313DH	Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan	223.696.838.000	219.559.342.928	98,15%
229	02313WA	Program Dukungan Manajemen	324.777.810.000	319.393.963.616	98,34%
230	02315DH	Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan	1.473.777.141.000	1.365.097.893.211	92,63%
231	02315WA	Program Dukungan Manajemen	713.240.419.000	691.499.455.350	96,95%
232	02316DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	2.425.353.809.000	2.408.364.217.388	99,30%
233	02316WA	Program Dukungan Manajemen	831.613.259.000	828.229.231.296	99,59%
234	02317DK	Program Pendidikan Tinggi	21.125.928.436.000	18.658.816.352.990	88,32%
235	02317WA	Program Dukungan Manajemen	11.291.046.404.000	10.958.741.213.145	97,06%
236	02318DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	4.719.402.666.000	4.478.577.223.300	94,90%
237	02318WA	Program Dukungan Manajemen	2.615.698.192.000	2.548.046.875.613	97,41%
238	02401DD	Program Kesehatan Masyarakat	150.786.517.000	125.880.842.449	83,48%
239	02401DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	49.069.370.085.000	49.029.771.975.955	99,92%
240	02401DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	62.177.680.000	50.146.926.041	80,65%
241	02401DO	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	428.516.313.000	413.257.431.734	96,44%

No	Kode Program	Uraian	Pagu	Realisasi	(%)
242	02401WA	Program Dukungan Manajemen	2.635.198.505.000	2.484.832.895.065	94,29%
243	02402WA	Program Dukungan Manajemen	36.627.204.000	36.554.611.660	99,80%
244	02403DD	Program Kesehatan Masyarakat	1.622.665.954.000	1.589.813.904.818	97,98%
245	02403DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	38.714.267.000	32.421.961.492	83,75%
246	02403WA	Program Dukungan Manajemen	81.961.430.000	75.390.058.123	91,98%
247	02404DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	24.758.008.951.000	22.863.796.808.597	92,35%
248	02404WA	Program Dukungan Manajemen	3.132.533.564.000	2.989.558.523.089	95,44%
249	02405DO	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	3.321.216.677.000	3.221.065.100.062	96,98%
250	02405WA	Program Dukungan Manajemen	1.004.822.862.000	979.981.498.389	97,53%
251	02407DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	4.073.567.069.000	3.876.323.385.161	95,16%
252	02407WA	Program Dukungan Manajemen	65.391.135.000	58.636.358.792	89,67%
253	02411DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	16.683.552.000	15.755.666.392	94,44%
254	02411DS	Program Kebijakan Pembangunan Kesehatan	632.989.089.000	605.512.560.165	95,66%
255	02411WA	Program Dukungan Manajemen	188.137.441.000	182.117.280.701	96,80%
256	02412DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	183.222.265.000	168.670.143.658	92,06%
257	02412DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	3.787.495.640.000	3.655.453.492.450	96,51%
258	02412WA	Program Dukungan Manajemen	2.152.961.790.000	2.106.206.835.897	97,83%
259	02501DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	83.808.624.000	81.676.184.367	97,46%
260	02501DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	8.915.825.000	8.885.604.325	99,66%
261	02501WA	Program Dukungan Manajemen	31.294.021.932.000	30.888.076.840.763	98,70%
262	02502WA	Program Dukungan Manajemen	168.453.626.000	168.004.422.339	99,73%
263	02503DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	1.743.533.596.000	1.539.857.568.727	88,32%
264	02503WA	Program Dukungan Manajemen	469.741.870.000	465.245.080.221	99,04%
265	02504DF	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	14.561.698.160.000	14.541.662.194.355	99,86%
266	02504DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	8.309.211.480.000	8.223.585.207.630	98,97%
267	02504DK	Program Pendidikan Tinggi	8.094.515.806.000	7.455.880.721.746	92,11%
268	02504WA	Program Dukungan Manajemen	5.476.953.553.000	5.388.543.046.866	98,39%

No	Kode Program	Uraian	Pagu	Realisasi	(%)
269	02505DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	181.420.186.000	178.034.580.237	98,13%
270	02505DF	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	55.858.759.000	55.117.537.192	98,67%
271	02505DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	58.177.757.000	57.128.847.620	98,20%
272	02505DK	Program Pendidikan Tinggi	250.423.657.000	241.286.385.694	96,35%
273	02505WA	Program Dukungan Manajemen	239.973.125.000	231.541.107.460	96,49%
274	02506DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	86.268.317.000	83.254.357.224	96,51%
275	02506DF	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	28.250.274.000	26.018.523.142	92,10%
276	02506DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	69.900.700.000	66.951.290.406	95,78%
277	02506DK	Program Pendidikan Tinggi	59.970.585.000	56.710.226.346	94,56%
278	02506WA	Program Dukungan Manajemen	69.601.796.000	64.972.228.175	93,35%
279	02507DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	84.459.129.000	83.724.155.120	99,13%
280	02507DF	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	34.149.623.000	34.119.491.173	99,91%
281	02507DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	36.292.013.000	35.328.563.954	97,35%
282	02507DK	Program Pendidikan Tinggi	123.687.975.000	122.815.280.815	99,29%
283	02507WA	Program Dukungan Manajemen	177.661.506.000	174.376.783.870	98,15%
284	02508DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	48.369.391.000	48.313.505.000	99,88%
285	02508DF	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	28.810.709.000	28.806.277.982	99,98%
286	02508DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	33.009.714.000	32.943.072.730	99,80%
287	02508DK	Program Pendidikan Tinggi	23.780.838.000	23.641.825.748	99,42%
288	02508WA	Program Dukungan Manajemen	60.130.807.000	59.883.128.595	99,59%
289	02509DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	929.481.549.000	919.349.247.637	98,91%
290	02509WA	Program Dukungan Manajemen	443.224.686.000	433.514.431.617	97,81%
291	02511WA	Program Dukungan Manajemen	630.434.054.000	626.118.996.972	99,32%
292	02512DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	279.801.332.000	276.575.700.884	98,85%
293	02512WA	Program Dukungan Manajemen	60.807.079.000	59.987.408.184	98,65%
294	02601DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	18.322.514.000	17.372.501.275	94,82%
295	02601DN	Program Pembinaan Ketenagakerjaan	40.167.126.000	39.993.296.686	99,57%

No	Kode Program	Uraian	Pagu	Realisasi	(%)
296	02601WA	Program Dukungan Manajemen	368.534.948.000	363.055.367.277	98,51%
297	02602WA	Program Dukungan Manajemen	68.755.817.000	65.630.729.827	95,45%
298	02604DN	Program Pembinaan Ketenagakerjaan	688.793.618.000	635.171.902.849	92,22%
299	02604WA	Program Dukungan Manajemen	164.085.829.000	146.898.727.601	89,53%
300	02605DN	Program Pembinaan Ketenagakerjaan	1.239.462.899.000	1.231.881.833.984	99,39%
301	02605WA	Program Dukungan Manajemen	80.962.064.000	77.824.652.301	96,12%
302	02608DN	Program Pembinaan Ketenagakerjaan	235.775.793.000	226.108.331.375	95,90%
303	02608WA	Program Dukungan Manajemen	106.699.671.000	102.431.353.091	96,00%
304	02611DN	Program Pembinaan Ketenagakerjaan	189.356.599.000	175.385.164.040	92,62%
305	02611WA	Program Dukungan Manajemen	46.448.497.000	43.469.918.330	93,59%
306	02613DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	2.270.594.006.000	2.205.647.234.959	97,14%
307	02613WA	Program Dukungan Manajemen	469.851.517.000	457.536.939.945	97,38%
308	02701DQ	Program Perlindungan Sosial	160.830.107.000	156.826.782.773	97,51%
309	02701WA	Program Dukungan Manajemen	576.027.224.000	571.129.757.936	99,15%
310	02702WA	Program Dukungan Manajemen	41.594.464.000	41.027.254.745	98,64%
311	02703DQ	Program Perlindungan Sosial	53.230.768.995.000	52.260.054.061.947	98,18%
312	02703WA	Program Dukungan Manajemen	45.603.306.000	39.857.643.062	87,40%
313	02704DQ	Program Perlindungan Sosial	1.979.204.237.000	1.929.258.084.806	97,48%
314	02704WA	Program Dukungan Manajemen	461.764.415.000	458.332.866.854	99,26%
315	02705DQ	Program Perlindungan Sosial	30.729.468.366.000	30.024.566.837.579	97,71%
316	02705WA	Program Dukungan Manajemen	50.113.026.000	48.957.398.283	97,69%
317	02901WA	Program Dukungan Manajemen	438.920.133.000	434.788.172.796	99,06%
318	02902WA	Program Dukungan Manajemen	84.567.871.000	83.962.168.713	99,28%
319	02903FF	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	100.382.619.000	100.125.670.969	99,74%
320	02903WA	Program Dukungan Manajemen	149.274.541.000	147.744.770.498	98,98%
321	02904FD	Program Kualitas Lingkungan Hidup	9.856.842.000	9.671.597.407	98,12%
322	02904FF	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	1.008.295.435.000	982.414.068.747	97,43%

No	Kode Program	Uraian	Pagu	Realisasi	(%)
323	02904WA	Program Dukungan Manajemen	310.321.704.000	304.000.590.475	97,96%
324	02905FD	Program Kualitas Lingkungan Hidup	9.583.389.000	9.456.381.106	98,67%
325	02905FF	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	571.570.941.000	559.558.313.361	97,90%
326	02905WA	Program Dukungan Manajemen	1.089.594.445.000	1.074.392.475.694	98,60%
327	02906FD	Program Kualitas Lingkungan Hidup	91.627.554.000	91.340.186.776	99,69%
328	02906FF	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	466.489.392.000	465.910.903.925	99,88%
329	02906WA	Program Dukungan Manajemen	327.821.688.000	326.581.336.177	99,62%
330	02907FB	Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	5.111.698.000	5.087.123.999	99,52%
331	02907FD	Program Kualitas Lingkungan Hidup	13.481.199.000	13.403.551.427	99,42%
332	02907FF	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	30.283.846.000	30.109.961.892	99,43%
333	02907WA	Program Dukungan Manajemen	192.764.789.000	188.698.498.076	97,89%
334	02908DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	128.075.527.000	125.715.779.565	98,16%
335	02908FF	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	3.973.107.000	3.971.927.485	99,97%
336	02908WA	Program Dukungan Manajemen	173.174.691.000	171.743.861.001	99,17%
337	02909FF	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	226.303.448.000	222.149.150.858	98,16%
338	02909WA	Program Dukungan Manajemen	92.114.255.000	90.687.317.260	98,45%
339	02910FD	Program Kualitas Lingkungan Hidup	159.595.155.000	156.934.628.096	98,33%
340	02910FF	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	77.435.803.000	76.766.589.893	99,14%
341	02910WA	Program Dukungan Manajemen	258.724.289.000	255.041.491.581	98,58%
342	02911FB	Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	203.541.584.000	200.605.030.968	98,56%
343	02911WA	Program Dukungan Manajemen	109.673.454.000	106.821.970.753	97,40%
344	02912FD	Program Kualitas Lingkungan Hidup	115.566.024.000	114.763.683.693	99,31%
345	02912WA	Program Dukungan Manajemen	72.360.579.000	70.977.036.418	98,09%
346	02913FD	Program Kualitas Lingkungan Hidup	334.674.569.000	319.283.610.521	95,40%
347	02913WA	Program Dukungan Manajemen	61.879.453.000	60.439.306.312	97,67%
348	02914FD	Program Kualitas Lingkungan Hidup	234.309.222.000	232.202.136.521	99,10%
349	02914FF	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	78.001.066.000	75.771.748.059	97,14%

No	Kode Program	Uraian	Pagu	Realisasi	(%)
350	02914WA	Program Dukungan Manajemen	56.607.949.000	55.083.774.012	97,31%
351	03201WA	Program Dukungan Manajemen	656.780.605.000	631.793.931.033	96,20%
352	03202WA	Program Dukungan Manajemen	75.666.386.000	75.393.908.501	99,64%
353	03203HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	433.826.014.000	410.018.854.882	94,51%
354	03203WA	Program Dukungan Manajemen	436.989.012.000	432.661.006.563	99,01%
355	03204HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	766.459.263.000	758.096.254.132	98,91%
356	03204WA	Program Dukungan Manajemen	333.778.042.000	329.040.652.145	98,58%
357	03205HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	815.168.673.000	812.982.864.861	99,73%
358	03205WA	Program Dukungan Manajemen	308.524.858.000	306.233.878.614	99,26%
359	03206EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	132.215.052.000	131.626.408.096	99,55%
360	03206HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	85.901.615.000	85.574.890.309	99,62%
361	03206WA	Program Dukungan Manajemen	125.163.946.000	122.403.239.001	97,79%
362	03207FD	Program Kualitas Lingkungan Hidup	81.911.638.000	78.351.883.537	95,65%
363	03207HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	147.286.358.000	139.900.461.370	94,99%
364	03207WA	Program Dukungan Manajemen	184.415.000.000	181.045.480.044	98,17%
365	03212DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	311.322.212.000	302.547.800.733	97,18%
366	03212WA	Program Dukungan Manajemen	1.053.957.303.000	1.040.297.468.029	98,70%
367	03213EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	31.842.793.000	30.983.687.606	97,30%
368	03213HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	61.100.311.000	59.348.246.762	97,13%
369	03213WA	Program Dukungan Manajemen	412.971.064.000	407.295.009.099	98,63%
370	03301WA	Program Dukungan Manajemen	595.881.124.000	572.029.514.679	96,00%
371	03302WA	Program Dukungan Manajemen	90.265.143.000	82.448.613.110	91,34%
372	03304GA	Program Infrastruktur Konektivitas	86.556.571.740.000	84.557.413.015.579	97,69%
373	03304WA	Program Dukungan Manajemen	2.434.648.649.000	2.343.394.127.580	96,25%
374	03305IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	28.605.195.514.000	27.427.459.846.052	95,88%
375	03305WA	Program Dukungan Manajemen	943.899.013.000	912.280.194.210	96,65%
376	03306FC	Program Ketahanan Sumber Daya Air	47.591.563.747.000	43.755.707.191.238	91,94%

No	Kode Program	Uraian	Pagu	Realisasi	(%)
377	03306WA	Program Dukungan Manajemen	2.342.751.814.000	2.263.182.964.892	96,60%
378	03307IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	11.120.392.291.000	10.709.596.079.621	96,31%
379	03307WA	Program Dukungan Manajemen	341.625.879.000	336.461.798.205	98,49%
380	03313DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	54.340.000.000	53.227.540.473	97,95%
381	03313WA	Program Dukungan Manajemen	534.377.233.000	526.069.264.155	98,45%
382	03314WA	Program Dukungan Manajemen	172.325.983.000	166.125.109.978	96,40%
383	03315DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	89.406.531.000	85.964.364.502	96,15%
384	03315WA	Program Dukungan Manajemen	304.332.054.000	298.391.903.992	98,05%
385	03316IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	85.204.033.000	78.534.647.696	92,17%
386	03316WA	Program Dukungan Manajemen	157.988.004.000	156.170.624.935	98,85%
387	03401CL	Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	153.312.123.000	152.825.676.954	99,68%
388	03401WA	Program Dukungan Manajemen	176.111.453.000	174.971.327.436	99,35%
389	03501CL	Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	251.163.619.000	248.749.909.054	99,04%
390	03501WA	Program Dukungan Manajemen	273.227.068.000	270.480.179.274	98,99%
391	03601CL	Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	77.582.251.000	76.637.724.984	98,78%
392	03601WA	Program Dukungan Manajemen	167.898.249.000	166.361.179.331	99,08%
393	04001DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	1.023.557.761.000	1.005.078.942.957	98,19%
394	04001EA	Program Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.328.846.399.000	1.319.427.976.822	99,29%
395	04001WA	Program Dukungan Manajemen	1.039.227.053.000	1.012.271.678.886	97,41%
396	04101EI	Program Pengembangan dan Pengawasan BUMN	70.217.084.000	69.709.226.931	99,28%
397	04101WA	Program Dukungan Manajemen	171.308.084.000	168.364.953.714	98,28%
398	04401EB	Program Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah, dan Koperasi	1.013.456.730.000	991.873.939.373	97,87%
399	04401WA	Program Dukungan Manajemen	380.200.144.000	371.096.668.768	97,61%
400	04701DE	Program Kesenjangan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak	125.409.325.000	124.110.714.877	98,96%
401	04701WA	Program Dukungan Manajemen	165.917.617.000	160.868.391.295	96,96%
402	04801CO	Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN	145.764.959.000	141.460.569.053	97,05%
403	04801WA	Program Dukungan Manajemen	228.371.534.000	226.384.249.600	99,13%

No	Kode Program	Uraian	Pagu	Realisasi	(%)
404	05001BK	Program Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalangan Keamanan Negara	14.156.508.664.000	14.106.646.812.352	99,65%
405	05001WA	Program Dukungan Manajemen	1.667.347.387.000	1.661.736.419.515	99,66%
406	05101BO	Program Keamanan dan Ketahanan Siber dan Sandi Negara	223.861.894.000	221.124.321.594	98,78%
407	05101WA	Program Dukungan Manajemen	379.089.335.000	378.115.835.733	99,74%
408	05201AE	Program Kebijakan dan Strategi Ketahanan Nasional	9.997.732.000	9.884.692.012	98,87%
409	05201WA	Program Dukungan Manajemen	41.022.314.000	40.484.606.506	98,69%
410	05401GG	Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	4.546.509.594.000	4.391.030.286.679	96,58%
411	05401WA	Program Dukungan Manajemen	3.190.541.238.000	3.113.574.869.223	97,59%
412	05501CK	Program Perencanaan Pembangunan Nasional	930.772.178.000	898.648.993.512	96,55%
413	05501WA	Program Dukungan Manajemen	763.287.663.000	761.201.183.307	99,73%
414	05601CS	Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan	2.459.156.173.000	2.365.394.749.205	96,19%
415	05601IC	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	25.846.786.000	24.405.851.219	94,43%
416	05601WA	Program Dukungan Manajemen	4.905.139.947.000	4.828.266.436.357	98,43%
417	05602WA	Program Dukungan Manajemen	28.395.733.000	28.256.214.875	99,51%
418	05603IC	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	250.441.392.000	234.807.680.256	93,76%
419	05603WA	Program Dukungan Manajemen	61.627.235.000	60.065.168.881	97,47%
420	05604CS	Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan	84.344.689.000	82.806.095.006	98,18%
421	05604WA	Program Dukungan Manajemen	39.741.812.000	39.242.665.993	98,74%
422	05605CS	Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan	31.141.525.000	29.473.272.551	94,64%
423	05605WA	Program Dukungan Manajemen	10.101.066.000	10.050.234.524	99,50%
424	05606CS	Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan	21.882.529.000	21.763.694.129	99,46%
425	05606WA	Program Dukungan Manajemen	5.740.465.000	5.739.001.842	99,97%
426	05607CS	Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan	20.555.141.000	20.528.147.353	99,87%
427	05607WA	Program Dukungan Manajemen	15.598.137.000	15.337.004.700	98,33%
428	05608CS	Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan	19.363.876.000	18.159.145.089	93,78%
429	05608IC	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	37.517.450.000	36.067.561.394	96,14%
430	05608WA	Program Dukungan Manajemen	27.765.900.000	27.089.184.589	97,56%

No	Kode Program	Uraian	Pagu	Realisasi	(%)
431	05609CS	Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan	13.328.695.000	13.219.863.017	99,18%
432	05609WA	Program Dukungan Manajemen	14.474.834.000	14.290.829.056	98,73%
433	05701DM	Program Perpustakaan dan Literasi	465.087.936.000	461.120.321.339	99,15%
434	05701WA	Program Dukungan Manajemen	249.185.431.000	247.150.780.533	99,18%
435	05901GH	Program Komunikasi Publik	77.624.581.000	72.984.490.260	94,02%
436	05901WA	Program Dukungan Manajemen	434.596.053.000	427.487.999.984	98,36%
437	05902WA	Program Dukungan Manajemen	69.360.586.000	69.156.804.145	99,71%
438	05903GE	Program Pengelolaan Spektrum Frekuensi, Standar Perangkat dan Layanan Publik	1.020.892.146.000	1.010.956.136.991	99,03%
439	05903WA	Program Dukungan Manajemen	696.740.304.000	680.077.652.666	97,61%
440	05904GB	Program Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	2.127.189.747.000	1.828.028.386.005	85,94%
441	05904GE	Program Pengelolaan Spektrum Frekuensi, Standar Perangkat dan Layanan Publik	17.330.000.000	16.242.260.345	93,72%
442	05904WA	Program Dukungan Manajemen	97.558.802.000	93.746.144.695	96,09%
443	05905GB	Program Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	8.055.533.000	7.991.643.294	99,21%
444	05905GE	Program Pengelolaan Spektrum Frekuensi, Standar Perangkat dan Layanan Publik	55.591.103.000	55.392.039.853	99,64%
445	05905GF	Program Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	1.306.474.019.000	387.519.612.267	29,66%
446	05905WA	Program Dukungan Manajemen	186.636.997.000	185.372.170.248	99,32%
447	05906GB	Program Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	376.179.152.000	358.132.326.107	95,20%
448	05906WA	Program Dukungan Manajemen	200.104.193.000	196.591.073.165	98,24%
449	05907GH	Program Komunikasi Publik	372.583.925.000	367.817.122.008	98,72%
450	05907WA	Program Dukungan Manajemen	92.624.443.000	87.040.541.913	93,97%
451	05908GF	Program Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	9.647.340.876.000	8.412.453.301.117	87,20%
452	05908WA	Program Dukungan Manajemen	2.214.001.000	1.699.813.517	76,78%
453	600109	0	-	1.699.813.517	#DIV/0!
454	06001BD	Program Profesionalisme SDM Polri	2.914.075.170.000	2.876.131.551.584	98,70%
455	06001BI	Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	5.210.070.077.000	5.182.005.890.007	99,46%
456	06001BP	Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri	46.069.658.276.000	44.833.798.100.607	97,32%
457	06001BQ	Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	19.210.721.943.000	19.005.473.378.347	98,93%

No	Kode Program	Uraian	Pagu	Realisasi	(%)
458	06001WA	Program Dukungan Manajemen	48.422.052.936.000	47.932.713.819.208	98,99%
459	06301DR	Program Pengawasan Obat dan Makanan	998.519.006.000	994.603.724.273	99,61%
460	06301WA	Program Dukungan Manajemen	1.200.574.747.000	1.196.454.688.302	99,66%
461	06401AI	Program Pembinaan Ketahanan Nasional	49.156.875.000	48.920.765.113	99,52%
462	06401WA	Program Dukungan Manajemen	135.510.521.000	134.934.245.867	99,57%
463	06501ED	Program Penanaman Modal	732.461.117.000	724.018.085.736	98,85%
464	06501WA	Program Dukungan Manajemen	396.144.568.000	370.933.568.525	93,64%
465	06601BL	Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	365.628.768.000	359.261.947.805	98,26%
466	06601WA	Program Dukungan Manajemen	1.452.382.816.000	1.425.783.926.671	98,17%
467	06702WA	Program Dukungan Manajemen	44.238.001.000	43.588.434.309	98,53%
468	06703CT	Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	161.610.734.000	159.328.961.325	98,59%
469	06703WA	Program Dukungan Manajemen	63.436.779.000	62.762.142.751	98,94%
470	06704CT	Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	267.176.866.000	253.354.632.998	94,83%
471	06704WA	Program Dukungan Manajemen	51.527.087.000	50.941.901.621	98,86%
472	06706CT	Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	31.212.941.000	31.131.878.478	99,74%
473	06706WA	Program Dukungan Manajemen	48.775.557.000	48.428.431.006	99,29%
474	06707CT	Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	170.647.745.000	168.656.779.907	98,83%
475	06707WA	Program Dukungan Manajemen	77.743.408.000	77.376.959.062	99,53%
476	06709CT	Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	1.738.766.735.000	1.707.538.736.096	98,20%
477	06709WA	Program Dukungan Manajemen	125.405.659.000	123.168.915.994	98,22%
478	06710CT	Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	18.941.230.000	18.799.952.436	99,25%
479	06710WA	Program Dukungan Manajemen	212.522.216.000	209.989.685.080	98,81%
480	06711CT	Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	89.616.348.000	88.821.253.727	99,11%
481	06711WA	Program Dukungan Manajemen	72.915.953.000	71.381.325.381	97,90%
482	06801DJ	Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana	1.702.066.835.000	1.683.951.218.454	98,94%
483	06801WA	Program Dukungan Manajemen	2.387.807.314.000	2.362.099.977.529	98,92%

No	Kode Program	Uraian	Pagu	Realisasi	(%)
484	07401BG	Program Pemajuan dan Penegakan HAM	34.603.735.000	34.031.958.300	98,35%
485	07401WA	Program Dukungan Manajemen	85.228.210.000	84.182.849.414	98,77%
486	07501GJ	Program Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	1.729.034.315.000	1.592.335.118.190	92,09%
487	07501WA	Program Dukungan Manajemen	1.478.471.876.000	1.467.077.067.983	99,23%
488	07601CQ	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	18.314.270.406.000	17.709.984.985.985	96,70%
489	07601WA	Program Dukungan Manajemen	2.024.325.930.000	1.994.286.776.595	98,52%
490	07701BJ	Program Penanganan Perkara Konstitusi	161.715.770.000	160.564.417.340	99,29%
491	07701WA	Program Dukungan Manajemen	245.475.335.000	243.911.843.900	99,36%
492	07801BE	Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme	93.258.804.000	93.209.436.204	99,95%
493	07801WA	Program Dukungan Manajemen	201.847.615.000	202.115.004.351	100,13%
494	08301GI	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	299.847.463.000	285.111.578.921	95,09%
495	08301WA	Program Dukungan Manajemen	144.775.652.000	137.368.882.337	94,88%
496	08401EJ	Program Standardisasi Nasional	80.617.641.000	80.404.535.897	99,74%
497	08401WA	Program Dukungan Manajemen	138.902.896.000	138.071.395.125	99,40%
498	08501KB	Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	31.387.657.000	30.387.018.618	96,81%
499	08501WA	Program Dukungan Manajemen	92.858.544.000	90.788.285.786	97,77%
500	08601CO	Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN	72.257.322.000	71.597.855.459	99,09%
501	08601WA	Program Dukungan Manajemen	256.842.139.000	254.940.810.165	99,26%
502	08701CN	Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional	59.726.825.000	57.743.171.927	96,68%
503	08701WA	Program Dukungan Manajemen	207.943.342.000	206.786.622.219	99,44%
504	08801CO	Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN	532.000.236.000	492.942.943.635	92,66%
505	08801WA	Program Dukungan Manajemen	547.226.934.000	535.734.364.974	97,90%
506	08901CH	Program Pengawasan Pembangunan	598.592.610.000	573.134.731.654	95,75%
507	08901WA	Program Dukungan Manajemen	1.365.172.718.000	1.353.420.384.908	99,14%
508	09001EE	Program Perdagangan Luar Negeri	146.573.759.000	144.229.624.856	98,40%
509	09001EF	Program Perdagangan Dalam Negeri	8.226.951.000	7.867.719.741	95,63%

No	Kode Program	Uraian	Pagu	Realisasi	(%)
510	09001WA	Program Dukungan Manajemen	812.830.526.000	799.950.291.994	98,42%
511	09002EF	Program Perdagangan Dalam Negeri	521.613.113.000	503.754.404.752	96,58%
512	09002WA	Program Dukungan Manajemen	89.296.663.000	85.530.951.068	95,78%
513	09003EE	Program Perdagangan Luar Negeri	43.704.189.000	37.555.610.785	85,93%
514	09003WA	Program Dukungan Manajemen	71.184.132.000	70.723.171.710	99,35%
515	09004EE	Program Perdagangan Luar Negeri	118.115.842.000	115.430.987.344	97,73%
516	09004WA	Program Dukungan Manajemen	53.173.562.000	51.855.554.383	97,52%
517	09005WA	Program Dukungan Manajemen	39.736.115.000	39.038.095.717	98,24%
518	09006EE	Program Perdagangan Luar Negeri	60.743.119.000	57.618.487.302	94,86%
519	09006WA	Program Dukungan Manajemen	46.935.493.000	45.371.414.232	96,67%
520	09007EF	Program Perdagangan Dalam Negeri	15.275.155.000	15.169.504.979	99,31%
521	09007WA	Program Dukungan Manajemen	39.171.468.000	38.397.696.304	98,02%
522	09008WA	Program Dukungan Manajemen	42.937.004.000	42.165.842.695	98,20%
523	09009EF	Program Perdagangan Dalam Negeri	96.161.728.000	94.611.679.980	98,39%
524	09009WA	Program Dukungan Manajemen	184.256.305.000	181.895.237.295	98,72%
525	09201DA	Program Keolahragaan	2.859.691.618.000	2.773.049.433.926	96,97%
526	09201DB	Program Kepemudaan	161.238.000.000	158.345.842.604	98,21%
527	09201WA	Program Dukungan Manajemen	355.537.160.000	350.050.130.757	98,46%
528	09301BC	Program Pencegahan dan Penindakan Perkara Korupsi	357.058.448.000	350.876.032.241	98,27%
529	09301WA	Program Dukungan Manajemen	959.798.265.000	955.810.280.539	99,58%
530	09501WA	Program Dukungan Manajemen	316.352.559.000	308.924.717.124	97,65%
531	09502CF	Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan	645.800.904.000	636.362.569.735	98,54%
532	09502WA	Program Dukungan Manajemen	239.029.586.000	237.427.927.725	99,33%
533	10001BH	Program Penegakan Integritas Hakim	34.005.542.000	32.703.736.233	96,17%
534	10001WA	Program Dukungan Manajemen	143.200.811.000	141.577.564.048	98,87%
535	10301FA	Program Ketahanan Bencana	5.181.702.243.000	5.140.810.285.274	99,21%
536	10301WA	Program Dukungan Manajemen	299.441.660.000	294.358.138.159	98,30%

No	Kode Program	Uraian	Pagu	Realisasi	(%)
537	10401DP	Program Penempatan dan Pelindungan PMI	181.201.401.000	167.407.943.920	92,39%
538	10401WA	Program Dukungan Manajemen	201.622.420.000	200.131.749.540	99,26%
539	10601CJ	Program Pengadaan Barang/Jasa Nasional	66.968.387.000	64.314.535.479	96,04%
540	10601WA	Program Dukungan Manajemen	120.176.063.000	116.258.600.702	96,74%
541	10701BM	Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana	963.366.439.000	854.698.514.390	88,72%
542	10701WA	Program Dukungan Manajemen	820.485.580.000	795.114.672.792	96,91%
543	10801EG	Program Pengawasan Persaingan Usaha	28.324.790.000	28.060.870.110	99,07%
544	10801WA	Program Dukungan Manajemen	94.210.015.000	92.539.140.712	98,23%
545	11001CG	Program Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	40.006.208.000	37.669.722.755	94,16%
546	11001WA	Program Dukungan Manajemen	199.567.441.000	189.355.058.107	94,88%
547	11101AG	Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan	42.242.331.000	42.048.018.816	99,54%
548	11101WA	Program Dukungan Manajemen	205.423.793.000	204.157.243.090	99,38%
549	11201EH	Program Pengembangan Kawasan Strategis	1.793.296.224.000	1.385.022.621.405	77,23%
550	11201WA	Program Dukungan Manajemen	921.596.106.000	767.616.149.269	83,29%
551	11301BA	Program Penanggulangan Terorisme	247.880.116.000	245.212.281.757	98,92%
552	11301WA	Program Dukungan Manajemen	182.196.016.000	181.747.809.407	99,75%
553	11401CA	Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden	35.330.454.000	33.010.774.914	93,43%
554	11401WA	Program Dukungan Manajemen	321.274.958.000	317.575.258.266	98,85%
555	11501CQ	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	8.435.084.419.000	7.232.812.347.201	85,75%
556	11501WA	Program Dukungan Manajemen	1.507.934.710.000	1.352.898.869.366	89,72%
557	11601GC	Program Penyiaran Publik	153.703.863.000	134.820.622.550	87,71%
558	11601WA	Program Dukungan Manajemen	846.678.612.000	832.577.238.863	98,33%
559	11701GC	Program Penyiaran Publik	696.736.073.000	602.796.281.933	86,52%
560	11701WA	Program Dukungan Manajemen	928.227.841.000	903.111.701.271	97,29%
561	11801EH	Program Pengembangan Kawasan Strategis	26.173.966.000	24.145.769.367	92,25%
562	11801WA	Program Dukungan Manajemen	35.815.640.000	33.531.764.172	93,62%

No	Kode Program	Uraian	Pagu	Realisasi	(%)
563	11901BN	Program Keamanan dan Keselamatan di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia	830.173.632.000	820.337.541.539	98,82%
564	11901WA	Program Dukungan Manajemen	169.002.255.000	158.728.980.134	93,92%
565	12001CL	Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	147.245.751.000	145.956.943.105	99,12%
566	12001WA	Program Dukungan Manajemen	194.744.962.000	191.937.536.883	98,56%
567	12201AH	Program Pembinaan Ideologi Pancasila	158.260.955.000	143.280.994.768	90,53%
568	12201WA	Program Dukungan Manajemen	189.580.060.000	184.452.651.873	97,30%
569	12301BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	228.341.726.000	227.737.694.918	99,74%
570	12301WA	Program Dukungan Manajemen	67.892.668.000	66.503.804.696	97,95%
571	12401KB	Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	2.437.074.524.000	1.630.704.905.396	66,91%
572	12401WA	Program Dukungan Manajemen	3.919.087.484.000	3.546.081.266.156	90,48%
573	12501HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	345.294.719.000	334.179.287.914	96,78%
574	12501WA	Program Dukungan Manajemen	119.481.984.000	108.979.632.857	91,21%
575	12601EH	Program Pengembangan Kawasan Strategis	91.168.580.000	88.330.837.167	96,89%
576	12601WA	Program Dukungan Manajemen	194.740.796.000	181.324.510.302	93,11%
577	9990106	Program Pengelolaan Utang Negara	441.400.000.000.000	439.882.584.341.259	99,66%
578	9990207	Program Pengelolaan Hibah Negara	238.197.041.000	219.137.141.303	92,00%
579	9990510	Program Pengelolaan Anggaran Transfer ke Daerah	887.815.612.668.000	881.430.544.208.454	99,28%
580	9990711	Program Pengelolaan Subsidi	271.079.597.815.000	269.592.086.053.747	99,45%
581	9990812	Program Pengelolaan Belanja Lainnya	226.014.496.194.000	224.316.238.098.211	99,25%
582	9999913	Program Pengelolaan Transaksi Khusus	153.703.976.089.000	153.001.958.314.050	99,54%
Total			3.175.388.849.316.000	3.120.623.071.899.620	98,28%

TIM PENYUSUN

TIM PENYUSUN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN
TAHUN 2023

Pengarah

Fahma Sari Fatma

Penyunting

Ingelia Puspita

Kontributor

Asep Resmana, Manggala Adi Windoro,
Agun Mahrudi, Muhammad Adnan Putra Pamungkas,
Adi Yoanto



DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Jl. Budi Utomo No.6, Pasar Baru, Sawah Besar,
Jakarta 10710